



LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD)
TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
TAHUN 2025



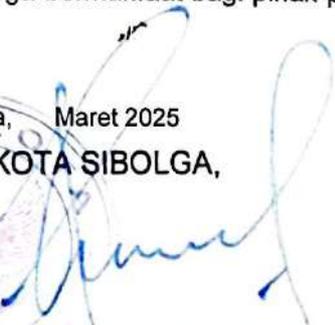
KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianya lah Pemerintah Kota Sibolga dapat melaksanakan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka mewujudkan tertib pelaksanaan fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah.

Wali Kota Sibolga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Sumatera Utara. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021 - 2026 selanjutnya diharapkan laporan ini menjadi media informasi eksternal sekaligus menjadi alat koreksi internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Disadari pula bahwa berbagai kendala dan tantangan masih mewarnai pelaksanaan tugas sebagai upaya implementasi kewenangan pengelolaan pemerintah daerah kedepan. Namun demikian, the show must go on karena banyak inspirasi, inovasi serta keinginan dan kemauan yang masih harus diwujudkan di masa yang akan datang, oleh karenanya menjadikan tantangan dan hambatan menjadi peluang dan awal keberhasilan di masa datang.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun 2024 ini disusun semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sibolga, Maret 2025
WALI KOTA SIBOLGA,

AKHMAD SYUKRI NAZRY PENARIK



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL		i
KATA PENGANTAR		1
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1. LATAR BELAKANG	1
	1.1.1 PENJELASAN UMUM	1
	a. Undang-undang Pembentukan Daerah;	1
	b. Data Geografis Wilayah;	1
	c. Jumlah Penduduk;	7
	d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan (untuk Kabupaten/Kota);	15
	e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah;	15
	f. Pegawai Pemerintah; dan	
	g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;	18
	h. Program /Kegiatan dan Realisasi Organisasi Perangkat Daerah	21
	1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	67
	a.. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah;	67
	b. Visi dan Misi Kepala Daerah;	80
	c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah; dan	84
	d. Kegiatan Pembangunan Daerah ;	85
	e. Dokumen Perencanaan Tahunan.	88
	1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	146
	Dasar Hukum Standar Pelayanan Minimal (SPM)	146
	Arah Kebijakan Strategis	147
BAB II	CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH	150
	2.1 Capaian Kinerja Makro	150
	2.2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	159
	2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	159
	2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	170
	2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	173
	a.. Capaian Kinerja Organisasi	173
	b. Kerangka Pengukuran Kinerja	184
	c. Capaian Kinerja Organisasi	186
	d. Pengukuran Capaian Kinerja disbanding dengan RPJMD	190
	e. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	199
	f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja	235
BAB III	CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	244
	1 DASAR HUKUM PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN	244
	2 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN	244
	3 CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	244
	3.3.1 Target Kinerja	244
	3.3.2 Realisasi	244
	3.3.3 Permasalahan Dan Kendala	244
	3.3.4 Saran dan Tindak Lanjut	244



BAB IV	PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	246
4.1	URUSAN PENDIDIKAN	246
4.1.1	Jenis Pelayanan Dasar	246
4.1.2	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	247
4.1.3	Realisasi	248
4.1.4	Alokasi Anggaran	249
4.1.5	Dukungan Personil	249
4.1.6	Permasalahan dan Solusi	251
4.1.7	Program dan Kegiatan	251
4.2	URUSAN KESEHATAN	253
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	253
4.2.2	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	253
4.2.3	Realisasi	254
4.2.4	Alokasi Anggaran	255
4.2.5	Dukungan Personil	255
4.2.6	Permasalahan dan Solusi	256
4.2.7	Program dan Kegiatan	257
4.3.	URUSAN PEKERJAAN UMUM	258
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	258
4.3.2	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	258
4.3.3	Realisasi	258
4.3.4	Alokasi Anggaran	259
4.3.5	Dukungan Personil	259
4.3.6	Permasalahan dan Solusi	260
4.3.7	Program dan Kegiatan	261
4.4.	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	261
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	261
4.4.2	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah	261
4.4.3	Realisasi	262
4.4.4	Alokasi Anggaran	262
4.4.5	Dukungan Personil	262
4.4.6	Permasalahan dan Solusi	262
4.4.7	Program dan Kegiatan	263
4.5	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	263
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	263
4.5.2	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	263
4.5.3	Realisasi	264
4.5.4	Alokasi Anggaran	264
4.5.5	Dukungan Personil	264
4.5.6	Permasalahan dan Solusi	264
4.5.7	Program dan Kegiatan	265
4.6.	URUSAN SOSIAL	269
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	269
4.6.2	Target Capaian Standar Pelayanan Minimal Oleh Daerah	269
4.6.3	Realisasi	270



4.6.4	Alokasi Anggaran	272
4.6.5	Dukungan Personil	272
4.6.6	Permasalahan dan Solusi	272
4.6.7	Program dan Kegiatan	273
BAB V	PENUTUP	274
INDIKATOR KUNCI URUSAN PEMERINTAH DAERAH		v - lxxv



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-undang Pembentukan Kota Sibolga.

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1965 Sibolga ditetapkan menjadi Daerah Swatantra Tingkat II dengan Nama Kotapraja Sibolga yang dipimpin oleh seorang Walikota dengan wilayah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Residen Tapanuli Nomor 999 tanggal 19 November 1946.
- Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 maka Daerah Swatantra Tingkat II Kotapraja Sibolga diganti sebutannya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga, selanjutnya sistem pengaturan pemerintahan ditetapkan dan dijalankan sesuai dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah.
- Kewenangan Pemerintah Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dirubah kemudian dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga berubah menjadi Kota Sibolga yang statusnya Daerah Otonom yang dipimpin oleh seorang Walikota dan Wakil Walikota sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Sibolga.

b. Data Geografis Wilayah Kota Sibolga

Sibolga merupakan salah satu kota yang berada di Pantai Barat Sumatera. Wilayahnya berada pada ketinggian 0-62 m di atas permukaan laut. Secara astronomis, Sibolga terletak antara 01°42' - 01°46' Lintang Utara dan 98°46'-98°48' Bujur Timur. Kota Sibolga di sebelah Utara, Timur dan Selatan berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Tapani Nauli. Sibolga memiliki wilayah seluas 11,47 km² yang terdiri dari 11,36 km² daratan di Pulau Sumatera dan 0,11 km² daratan berupa kepulauan.



Kota Sibolga termasuk beriklim tropis dengan suhu maksimum pada tahun 2024 mencapai 36,40°C di bulan Februari. Jumlah hari hujan di Kota Sibolga pada tahun 2024 adalah sebanyak 311 hari, lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 263 hari. Sejalan dengan jumlah hari hujan, rata-rata kelembaban udara Kota Sibolga adalah 85,56 persen pada tahun 2024. Sementara itu, rata-rata kecepatan angin di Kota Sibolga pada tahun 2024 adalah sebesar 0,78 knot, dan tekanan udara rata-rata 1008,43 mbar.

Secara rinci letak geografis dan luas wilayah, batas dan jarak 4 Kecamatan ke Pusat Kota Sibolga disajikan pada Tabel di bawah.

Kecamatan <i>District</i>	Tinggi Wilayah (mdpl) <i>Altitude (m.a.s.l)</i>	Jarak ke Ibukota (km) <i>Distance to the Capital (km)</i>
(1)	(2)	(3)
Sibolga Utara	0 - 62	1
Sibolga Kota	0 - 11	1
Sibolga Selatan	0 - 31	3
Sibolga Sambas	0 - 10	1

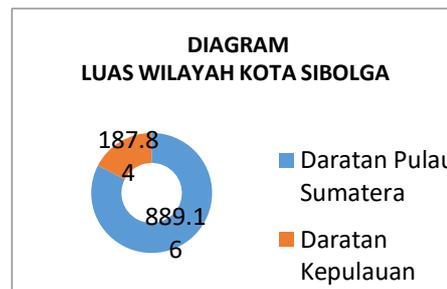
Sumber data : Kantor BPS Kota Sibolga (Sibolga dalam Angka) Tahun 2025

Adapun rincian luas wilayah Kota Sibolga dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

TABEL 1
LUAS WILAYAH KOTA SIBOLGA

NO.	WILAYAH	LUAS (Ha.)
1	2	3
1.	Daratan :	
	Daratan Pulau Sumatera	889,16
	Daratan Kepulauan	187,84
	JUMLAH	1.077

Sumber: SIPD Kota Sibolga



Daratan Kota Sibolga berada pada rata-rata ketinggian antara 1-200 m diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan adalah daratan rendah berupa bekas rawa dan pantai serta pegunungan yang permukaannya terjal. Kondisi ini menjadikan keadaan topografi wilayah Kota Sibolga terdiri dari 2 kategori, yaitu :

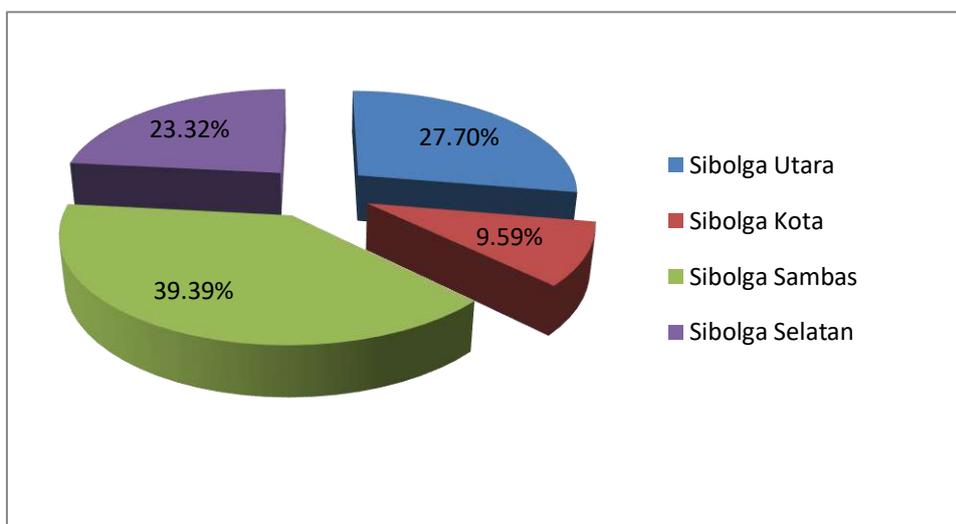


- Pertama : Wilayah landai/datar mempunyai kemiringan lahan 0-2 % yang luasnya mencapai 29,14% dari total wilayah daratan Kota Sibolga.
- Kedua : Wilayah lereng mempunyai kemiringan > 40% dengan luasnya mencapai 638,2 Ha atau mencapai 59,62% dari total wilayah daratan Kota Sibolga.

Dari kondisi topografi yang seperti ini, menyebabkan Kota Sibolga memiliki iklim yang cukup panas dan termasuk daerah beriklim tropis.

Secara administratif Kota Sibolga terbagi kedalam 4 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Sibolga Utara, Sibolga Kota, Sibolga Sambas dan Sibolga Selatan yang luas wilayah masing-masing tergambar pada diagram berikut.

Diagram Luas Wilayah Sibolga Menurut Kecamatan (%)



Sumber: BPN Kantor Pertanahan Kota Sibolga



TABEL 2
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI KOTA SIBOLGA

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	2	3	4
I	SIBOLGA UTARA	3,333	27,70
	1. Sibolga Ilir	0,78	5,79
	2. Angin Nauli	0,87	6,48
	3. Huta Tonga-tonga	0,40	2,94
	4. Huta Barangan	0,57	7,20
	5. Simare-mare	0,71	5,30
II	SIBOLGA KOTA	2,732	9,59
	1. Kota Baringin	0,29	1,77
	2. Pasar Baru	0,46	1,33
	3. Pasar Belakang	1,08	4,34
	4. Pancuran Gerobak	0,90	2,15
III	SIBOLGA SELATAN	3,139	23,32
	1. Aek Habil	0,614	4,55
	2. Aek Manis	1,235	9,20
	3. Aek Parombunan	0,898	6,66
	4. Aek Muara Pinang	0,392	2,91
IV	SIBOLGA SAMBAS	1,566	39,39
	1. Pancuran Pinang	0,18	7,94
	2. Pancuran Kerambil	0,33	6,83
	3. Pancuran Dewa	0,51	9,19
	4. Pancuran Bambu	0,54	15,42
	KOTA SIBOLGA	10,77	100

Sumber : Kelurahan dan Kecamatan Kota Sibolga



TABEL 3
Letak Geografis Kecamatan Kota Sibolga

DAERAH	URAIAN	KETERANGAN
1	2	3
SIBOLGA UTARA	Letak	010 42"-010 44" LU 980 46" - 980 48" BT
	Letak Di atas Permukaan Laut	0 – 54 m
	Luas Wilayah	333,33 ha
	Batas Wilayah	
	Sebelah Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Sebelah Selatan	Sungai Aek Doras dan Kecamatan Sibolga Kota
	Sebelah Barat	Teluk Tapian Nauli
	Sebelah Timur	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Jarak kantor Camat ke kantor Walikota	0,30 km
	SIBOLGA KOTA	Letak
Letak Di atas Permukaan Laut		0 - 8 m
Luas Wilayah		273,23 ha
Batas Wilayah		
Sebelah Utara		Kecamatan Sibolga Utara
Sebelah Selatan		Kecamatan Sibolga Sambas
Sebelah Barat		Kecamatan Sibolga Utara
Sebelah Timur		Kabupaten Tapanuli Tengah
Jarak kantor Camat ke kantor Walikota		0,60 km
SIBOLGA SELATAN		Letak
	Letak Di atas Permukaan Laut	0 - 29 m
	Luas Wilayah	313,85 ha
	Batas Wilayah	
	Sebelah Utara	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Sebelah Selatan	Teluk Tapian Nauli
	Sebelah Barat	Kecamatan Sibolga Sambas
	Sebelah Timur	Kabupaten Tapanuli Tengah
	Jarak kantor Camat ke kantor Walikota	3,4 km
	SIBOLGA SAMBAS	Letak
Letak Di atas Permukaan Laut		0 - 13 m
Luas Wilayah		156,59 ha
Batas Wilayah		
Sebelah Utara		Kecamatan Sibolga Utara
Sebelah Selatan		Teluk Tapian Nauli
Sebelah Barat		Kecamatan Sibolga Kota
Sebelah Timur		Kecamatan Sibolga Selatan
Jarak kantor Camat ke kantor Walikota		1,0 km

Sumber data : Kantor Pertanahan Kota Sibolga/ Land Office of Sibolga Municipality

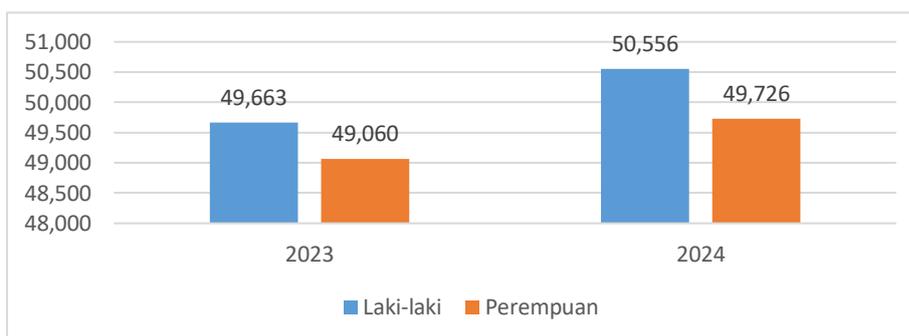


c. Informasi Umum Data Kependudukan

Secara demografi, berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, jumlah Penduduk Kota Sibolga tahun 2024 berjumlah 100.282 jiwa yang terdiri dari **50.556** jiwa penduduk laki-laki dan 49.726 jiwa perempuan dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduknya mencapai 9.311 jiwa per km². Dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Sibolga Sambas yang mencapai 14.514 jiwa per km² dan terendah di Kecamatan Sibolga Kota sebesar 6.254 jiwa per km². Untuk tahun 2023 jumlah penduduk berjumlah **98.723** jiwa dengan **49.663** jiwa penduduk laki-laki dan **49.060** jiwa penduduk perempuan, dengan data demikian bahwa penduduk Kota Sibolga bertambah sebanyak 1.559 jiwa dari tahun 2023 dengan persentase 1,579 %.

Grafik

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2023-2024



TABEL 4

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2024

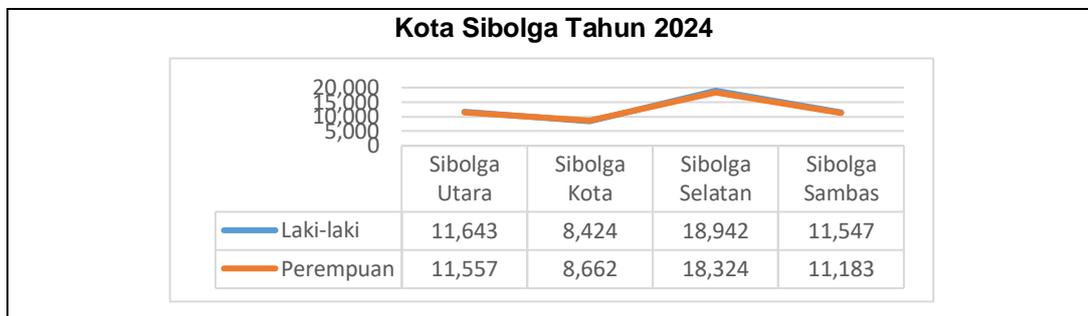
Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		L+P	
	n	%	n	%	n	%
1	2	3	4	5	6	7
Sibolga Utara	11.643	11,61	11.557	11,52	23.200	23,13
Sibolga Kota	8.424	8,4	8.662	8,64	17.086	17,04
Sibolga Selatan	18.942	18,89	18.324	18,27	37.266	37,16
Sibolga Sambas	11.547	11,51	11.183	11,15	22.730	22,67
Kota Sibolga	50.556	50,41	49.726	49,77	100.282	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2024



Grafik

Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin



TABEL 5

JUMLAH DAN PROPORSI PENDUDUK BERDASARKAN KELOMPOK UMUR DAN JENIS KELAMIN KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

No.	Usia Penduduk	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
1.	Usia 0 Tahun	597	0,60	572	0,57	1.169	1,17
2.	Usia 1 Tahun	740	0,74	667	0,67	1.407	1,40
3.	Usia 2 Tahun	780	0,78	749	0,75	1.529	1,52
4.	Usia 3 Tahun	817	0,81	712	0,71	1.529	1,52
5.	Usia 4 Tahun	801	0,80	822	0,82	1.623	1,62
6.	Usia 5 Tahun	867	0,86	831	0,83	1.698	1,69
7.	Usia 6 Tahun	866	0,86	833	0,83	1.699	1,69
8.	Usia 7 Tahun	953	0,95	799	0,80	1.752	1,75
9.	Usia 8 Tahun	907	0,90	790	0,79	1.697	1,69
10.	Usia 9 Tahun	959	0,96	888	0,89	1.847	1,84
11.	Usia 10 Tahun	970	0,97	903	0,90	1.873	1,87
12.	Usia 11 Tahun	979	0,98	918	0,92	1.897	1,89
13.	Usia 12 Tahun	935	0,93	912	0,91	1.847	1,84
14.	Usia 13 Tahun	992	0,99	948	0,95	1.940	1,93
15.	Usia 14 Tahun	969	0,97	935	0,93	1.904	1,90
16.	Usia 15 Tahun	981	0,98	914	0,91	1.895	1,89
17.	Usia 16 Tahun	987	0,98	951	0,95	1.938	1,93
18.	Usia 17 Tahun	969	0,97	883	0,88	1.852	1,85
19.	Usia 18 Tahun	977	0,97	918	0,92	1.895	1,89
20.	Usia 19 Tahun	999	1,00	951	0,95	1.950	1,94
21.	Usia 20 Tahun	971	0,97	964	0,96	1.935	1,93
22.	Usia 21 Tahun	1071	1,07	933	0,93	2.004	2,00
23.	Usia 22 Tahun	984	0,98	958	0,96	1.942	1,94



No.	Usia Penduduk	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
24.	Usia 23 Tahun	911	0,91	853	0,85	1.764	1,76
25.	Usia 24 Tahun	965	0,96	928	0,93	1.893	1,89
26.	Usia 25 Tahun	901	0,90	912	0,91	1.813	1,81
27.	Usia 26 Tahun	777	0,77	820	0,82	1.597	1,59
28.	Usia 27 Tahun	848	0,85	789	0,79	1.637	1,63
29.	Usia 28 Tahun	831	0,83	878	0,88	1.709	1,70
30.	Usia 29 Tahun	846	0,84	820	0,82	1.666	1,66
31.	Usia 30 Tahun	832	0,83	721	0,72	1.553	1,55
32.	Usia 31 Tahun	820	0,82	767	0,76	1.587	1,58
33.	Usia 32 Tahun	810	0,81	733	0,73	1.543	1,54
34.	Usia 33 Tahun	699	0,70	662	0,66	1.361	1,36
35.	Usia 34 Tahun	810	0,81	750	0,75	1.560	1,56
36.	Usia 35 Tahun	791	0,79	748	0,75	1.539	1,53
37.	Usia 36 Tahun	851	0,85	733	0,73	1.584	1,58
38.	Usia 37 Tahun	788	0,79	704	0,70	1.492	1,49
39.	Usia 38 Tahun	853	0,85	720	0,72	1.573	1,57
40.	Usia 39 Tahun	866	0,86	737	0,73	1.603	1,60
41.	Usia 40 Tahun	773	0,77	733	0,73	1.506	1,50
42.	Usia 41 Tahun	742	0,74	785	0,78	1.527	1,52
43.	Usia 42 Tahun	844	0,84	821	0,82	1.665	1,66
44.	Usia 43 Tahun	694	0,69	694	0,69	1.388	1,38
45.	Usia 44 Tahun	852	0,85	807	0,80	1.659	1,65
46.	Usia 45 Tahun	767	0,76	722	0,72	1.489	1,48
47.	Usia 46 Tahun	660	0,66	672	0,67	1.332	1,33
48.	Usia 47 Tahun	643	0,64	616	0,61	1.259	1,26
49.	Usia 48 Tahun	629	0,63	566	0,56	1.195	1,19
50.	Usia 49 Tahun	652	0,65	612	0,61	1.264	1,26
51.	Usia 50 Tahun	589	0,59	542	0,54	1.131	1,13
52.	Usia 51 Tahun	544	0,54	555	0,55	1.099	1,10
53.	Usia 52 Tahun	565	0,56	550	0,55	1.115	1,11
54.	Usia 53 Tahun	467	0,47	458	0,46	925	0,92
55.	Usia 54 Tahun	534	0,53	514	0,51	1.048	1,05
56.	Usia 55 Tahun	472	0,47	443	0,44	915	0,91
57.	Usia 56 Tahun	447	0,45	513	0,51	960	0,96
58.	Usia 57 Tahun	365	0,36	427	0,43	792	0,79
59.	Usia 58 Tahun	302	0,30	349	0,35	651	0,65
60.	Usia 59 Tahun	409	0,41	480	0,48	889	0,89



No.	Usia Penduduk	Laki-Laki		Perempuan		Jumlah	
		Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
61.	Usia 60 Tahun	320	0,32	399	0,40	719	0,72
62.	Usia 61 Tahun	265	0,26	338	0,34	603	0,60
63.	Usia 62 Tahun	266	0,27	392	0,39	658	0,66
64.	Usia 63 Tahun	242	0,24	283	0,28	525	0,52
65.	Usia 64 Tahun	305	0,30	351	0,35	656	0,65
66.	Usia 65 Tahun	225	0,22	296	0,30	521	0,52
67.	Usia 66 Tahun	248	0,25	329	0,33	577	0,58
68.	Usia 67 Tahun	210	0,21	270	0,27	480	0,48
69.	Usia 68 Tahun	173	0,17	291	0,29	464	0,46
70.	Usia 69 Tahun	158	0,16	230	0,23	388	0,39
71.	Usia 70 Tahun	162	0,16	222	0,22	384	0,38
72.	Usia 71 Tahun	118	0,12	208	0,21	326	0,33
73.	Usia 72 Tahun	158	0,16	172	0,17	330	0,33
74.	Usia 73 Tahun	77	0,08	121	0,12	198	0,20
75.	Usia 74 Tahun	75	0,07	156	0,16	231	0,23
76.	Usia 75 Tahun	65	0,06	102	0,10	167	0,17
77.	Usia > 75 Tahun	269	0,27	681	0,68	950	0,95
JUMLAH		50.556	50,41	49.726	49,59	100.282	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2024

- **Distribusi Penduduk Menurut Tingkat pendidikan yang ditamatkan dan Jenis kelamin kota sibolga tahun 2024**

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Sibolga hampir merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SLTP/MTs sederajat, SLTA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SLTA / sederajat sebesar 27,77%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi jumlahnya hanya sekitar 3,18%, yang terdiri dari tamatan Diploma I/II/III sebesar 0,73% dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 2,45%. Berikut ini tabel penduduk Kota Sibolga dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.



TABEL 6
Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2024

Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	Persentase (%)
1	2	3	4	
Tidak/Belum Sekolah	13.055	12.103	25.158	25,09
Belum tamat SD/Sederajat	5.730	5.305	11.035	11,00
Tamat SD/Sederajat	6.934	6.796	13.730	13,69
SLTP/Sederajat	7.578	6.996	14.574	14,53
SLTA/Sederajat	14.024	13.820	27.844	27,77
Diploma I/II	85	224	309	0,31
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda	628	1.313	1.941	1,94
Diploma IV/Strata 1	2.394	3.096	5.490	5,47
Strata 2	124	72	196	0,20
Strata 3	4	1	5	0,00
Jumlah	50.556	49.726	100.282	100

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2024

- Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin Kota Sibolga Tahun 2024

Berdasarkan mata pencahariannya, sebagian besar penduduk Kota Sibolga bekerja sebagai Nelayan/Perikanan (5,07%), mengurus rumah tangga (18,93%), wiraswasta (8,43%) dan PNS/TNI/POLRI (2,93%), Buruh Harian Lepas (6,42%), Buruh Nelayan/Perikanan (1,38%), Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara lengkap dapat terlihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 7
Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan dan Jenis Kelamin
Kota Sibolga Tahun 2024

No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	%
1	2	3	4	5	6
1.	Belum/Tidak Bekerja	14.453	13.102	27.555	27,48
2.	Mengurus Rumah Tangga	0	18.984	18.984	18,93
3.	Pelajar/Mahasiswa	11.683	10.514	22.197	22,13
4.	Pensiunan	390	461	851	0,85
5.	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	1.003	1.391	2.394	2,39
6.	Tentara Nasional Indonesia (TNI)	348	1	349	0,35



No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	%
1	2	3	4	5	6
7.	Kepolisian RI (POLRI)	189	9	198	0,20
8.	Perdagangan	2	1	3	0,00
9.	Petani/Pekebun	193	139	332	0,33
10.	Peternak	2	0	2	0,00
11.	Nelayan/Perikanan	5.063	17	5.080	5,07
12.	Industri	1	0	1	0,00
13.	Konstruksi	2	0	2	0,00
14.	Transportasi	134	0	134	0,13
15.	Karyawan Swasta	1.514	679	2.193	2,19
16.	Karyawan Bumh	148	67	215	0,21
17.	Karyawan Bumd	53	21	74	0,07
18.	Karyawan Honoror	372	324	696	0,69
19.	Buruh Harian Lepas	5.461	980	6.441	6,42
20.	Buruh Tani/Perkebunan	43	16	59	0,06
21.	Buruh Nelayan/Perikanan	1.353	34	1.387	1,38
22.	Buruh Peternakan	0	3	3	0,00
23.	Pembantu Rumah Tangga	0	33	33	0,03
24.	Tukang Cukur	16	0	16	0,02
25.	Tukang Listrik	4	0	4	0,00
26.	Tukang Batu	12	1	13	0,01
27.	Tukang Kayu	18	0	18	0,02
28.	Tukang Sol Sepatu	3	1	4	0,00
29.	Tukang Las/Pandai Besi	14	0	14	0,01
30.	Tukang Jahit	27	30	57	0,06
31.	Penata Rias	0	3	3	0,00
32.	Penata Rambut	2	10	12	0,01
33.	Mekanik	43	0	43	0,04
34.	Seniman	4	0	4	0,00
35.	Imam Masjid	2	0	2	0,00
36.	Pendeta	44	9	53	0,05
37.	Pastor	60	0	60	0,06
38.	Wartawan	10	1	11	0,01
39.	Ustadz/Mubaligh	7	0	7	0,01
40.	Promotor Acara	1	0	1	0,00
41.	Wakil Walikota	1	0	1	0,00
42.	Anggota DPRD Kab/Kota	7	3	10	0,01
43.	Dosen	17	19	36	0,04
44.	Guru	150	435	585	0,58



No.	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan	L+P	%
1	2	3	4	5	6
45.	Pengacara	5	1	6	0,01
46.	Notaris	0	5	5	0,00
47.	Arsitek	2	0	2	0,00
48.	Konsultan	2	0	2	0,00
49.	Dokter	24	45	69	0,07
50.	Bidan	0	112	112	0,11
51.	Perawat	19	57	76	0,08
52.	Apoteker	0	3	3	0,00
53.	Penyiar Radio	0	1	1	0,00
54.	Pelaut	49	0	49	0,05
55.	Sopir	328	0	328	0,33
56.	Pedagang	452	522	974	0,97
57.	Perangkat Desa	2	0	2	0,00
58.	Biarawan/Biarawati	2	51	53	0,05
59.	Wiraswasta	6.814	1.637	8.451	8,43
60.	Pekerjaan Lainnya	8	4	12	0,01
Jumlah		50.556	49.726	100.282	100,00

Sumber: Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II 2024

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan Kota Sibolga

Secara administrasi Kota Sibolga memiliki luas wilayah 10,77 Km², dan terbagi atas 4 Kecamatan dan 17 Kelurahan, secara rinci luas masing-masing kecamatan, seperti yang tertera dalam tabel di bawah ini:



TABEL 8
Pembagian Wilayah Administrasi Kota Sibolga

No.	Kecamatan/ Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
I	Sibolga Utara	3,33	30,92
	1. Sibolga Ilir	0,78	
	2. Angin Nauli	0,87	
	3. Huta Tonga-tonga	0,40	
	4. Huta Barangan	0,57	
	5. Simare-mare	0,71	
II	Sibolga Kota	2,73	25,37
	1. Kota Baringin	0,29	
	2. Pasar Baru	0,46	
	3. Pasar Belakang	1,08	
	4. Pancuran Gerobak	0,90	
III	Sibolga Selatan	3,14	29,16
	1. Aek Habil	0,61	
	2. Aek Manis	1,24	
	3. Aek Parombunan	0,90	
	4. Aek Muara Pinang	0,39	
IV	Sibolga Sambas	1,57	14,58
	1. Pancuran Pinang	0,18	
	2. Pancuran Kerambil	0,33	
	3. Pancuran Dewa	0,51	
	4. Pancuran Bambu	0,54	
KOTA SIBOLGA		10,77	100

Sumber : SIPD Kota Sibolga tahun 2017

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.

Urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, akan dilaksanakan oleh OPD se-Kota Sibolga sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sibolga tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga. Urusan pemerintahan daerah tersebut meliputi:



TABEL 9

Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017
2	Sekretariat DPRD	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 2 Tahun 2017
3	Inspektorat	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 3 Tahun 2017
4	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 4 Tahun 2017
5	Dinas Kesehatan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 5 Tahun 2017
6	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 6 Tahun 2017
7	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 7 Tahun 2017
8	Dinas Sosial	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 8 Tahun 2017
9	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 9 Tahun 2017
10	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 10 Tahun 2017
11	Dinas Perikanan Ketahanan Pangan dan Pertanian	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 11 Tahun 2017
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 12 Tahun 2017
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 13 Tahun 2017
14	Dinas Perhubungan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 14 Tahun 2017
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 15 Tahun 2017
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 16 Tahun 2017
17	Dinas Pariwisata Pemuda & Olahraga	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 17 Tahun 2017
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 18 Tahun 2017
19	Dinas Perpustakaan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 19 Tahun 2017
20	Satuan Polisi Pamong Praja	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 20 Tahun 2017
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 21 Tahun 2017
22	Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 22 Tahun 2017



No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
23	Badan Kepegawaian Daerah	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 23 Tahun 2017
24	Kecamatan Sibolga Utara	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017
25	Kecamatan Sibolga Kota	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017
26	Kecamatan Sibolga Selatan	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017
27	Kecamatan Sibolga Sambas	Peraturan Walikota Sibolga Nomor 24 Tahun 2017
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2019
29	Kesatuan Bangsa & Politik	Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2012
30	RSU Dr F L Tobing	

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada disetiap Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, potensi daerah dan fleksibilitas, Pemerintah Kota Sibolga telah menindaklanjuti kebijakan penataan kelembagaan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebutan Kotamadya Daerah Tingkat II Sibolga berubah menjadi Kota Sibolga, Penataan kelembagaan di Kota Sibolga diatur Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Sibolga yang terdiri dari 30 Perangkat Daerah, yaitu : Jumlah PNS Pemerintah Kota Sibolga yang menerima pelayanan Kepegawaian se Kota Sibolga berdasarkan data yang terakhir sampai dengan bulan Desember Tahun 2024 sebanyak 2.238 orang, terdiri dari PNS Non Guru dan Kesehatan Sebanyak 1.032 orang, PNS Guru sebanyak 693 orang dan PNS Tenaga Kesehatan Sebanyak 513 orang dengan perincian sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, yang terdiri dari 6 Bagian
2. Sekretariat DPRD, yang terdiri dari 3 Bagian
3. Inspektorat
4. Dinas : 16
5. Badan : 3
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah



7. Rumah Sakit Umum Daerah
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Kecamatan : 4

TABEL 10
JUMLAH PEGAWAI ASN DI LUAR GURU DAN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2024

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	12	14	29	55
2	DINAS KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	16	6	18	40
3	RSU Dr F L TOBING	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	20		15	35
4	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	10	7	31	48
5	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	9	9	20	38
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	5	7	4	16
7	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	6	8	13	27
8	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	7	3	15	25
9	DINAS SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR	4	4	14	22
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	13	1	6	20
11	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	6	8	11	25



NO	NAMA PERANGKAT DAERAH	URUSAN PEMERINTAHAN/ FUNGSI PENUNJANG	RINCIAN ASN			TOTAL
			STRUKTURAL	FUNGSIONAL	PELAKSANA	
12	DINAS PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	14	2	17	33
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	6	6	7	19
14	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN KETENAGAKERJAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	6	3	9	18
15	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	4	5	8	18
16	DINAS PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	4	7	8	19
17	DINAS PERIKANAN KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	8	10	13	31
18	DINAS PARIWISATA PEMUDA & OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	9	6	11	26
19	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR	8	13	21	42
20	SEKRETARIAT DAERAH	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	14	20	44	78
21	SEKRETARIAT DPRD KOTA SIBOLGA	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	3	32	39
22	INSPEKTORAT	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5	36	13	54
23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	8	7	17	32
24	BADAN PENGELOLA KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	17	2	35	54
25	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	4	6	34	44
26	KESATUAN BANGSA & POLITIK	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5		8	13
27	KANTOR KECAMATAN SIBOLGA UTARA	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	32		21	53
28	KANTOR KECAMATAN SIBOLGA KOTA	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	25		8	33
29	KANTOR KECAMATAN SIBOLGA SELATAN	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	26		14	40
30	KECAMATAN SIBOLGA SAMBAS	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	24		12	36
Jumlah			331	193	508	1032



g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Sibolga berdasarkan data yang terakhir Tahun 2024 Kota Sibolga, Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 645.706.656.615,77 yaitu 83,79 % dari Target Rp. 770.632.709.977,00 dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 634.531.479.175,44 yaitu 84,07 % dari Target Rp. 783.924.231.052,00 dengan perincian yang terdapat pada Tabel :

TABEL 11
PEMERINTAH KOTA SIBOLGA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DAN 2023
Unaudited

REK	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024	%	REALISASI 2023
4	PENDAPATAN - LRA	770.632.709.977,00	645.706.656.615,77	83,79%	614.234.638.127,75
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	219.245.395.513,00	86.577.030.313,34	39,49%	87.147.635.472,40
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	13.957.960.628,00	12.373.706.574,00	88,65%	12.982.876.029,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	14.812.729.755,00	5.540.909.774,00	37,41%	4.489.457.120,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	9.688.781.094,00	9.816.845.722,00	101,32%	9.159.505.525,00
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	180.785.924.036,00	58.845.568.243,34	32,55%	60.515.796.798,40
4.2	PENDAPATAN TRANSFER - LRA	543.024.939.164,00	552.842.579.426,00	101,81%	521.061.553.958,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA	531.069.444.000,00	526.151.358.147,00	99,07%	484.395.252.248,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	524.195.917.000,00	519.277.831.147,00	99,06%	474.764.063.248,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	14.244.617.000,00	16.788.145.000,00	117,86%	17.828.293.062,00
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum	417.751.627.000,00	416.863.636.472,00	99,79%	398.534.199.406,00
4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus - Fisik	42.856.064.000,00	39.617.484.382,00	92,44%	14.878.158.026,00
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	49.343.609.000,00	46.008.565.293,00	93,24%	43.523.412.754,00



4.2.01.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LRA	6.873.527.000,00	6.873.527.000,00	100,00%	9.631.189.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00%	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	6.873.527.000,00	6.873.527.000,00	100,00%	9.631.189.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah	11.955.495.164,00	26.691.221.279,00	223,25%	36.666.301.710,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11.955.495.164,00	26.691.221.279,00	223,25%	33.078.510.710,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00%	3.587.791.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	8.362.375.300,00	6.287.046.876,43	75,18%	6.025.448.697,35
4.3.01	Pendapatan Hibah - LRA	0,00	48.916.642,43	0,00%	26.529.806,35
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	8.362.375.300,00	6.238.130.234,00	74,60%	5.998.918.891,00
5	BELANJA	783.924.231.052,00	634.531.479.175,44	80,94%	691.532.020.360,52
5.1	BELANJA OPERASI	670.599.989.938,00	539.304.755.852,44	80,42%	609.192.245.704,52
5.1.01	Belanja Pegawai	331.319.158.017,00	252.686.424.106,25	76,27%	238.198.448.986,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	298.508.111.680,00	249.335.473.398,19	83,53%	352.062.046.486,52
5.1.03	Belanja Bunga	4.810.720.372,00	4.810.720.372,00	100,00%	4.575.855.298,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	33.238.399.869,00	30.344.169.976,00	91,29%	12.580.266.434,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.723.600.000,00	2.127.968.000,00	78,13%	1.775.628.500,00
5.2	BELANJA MODAL	109.436.929.811,00	94.093.777.097,00	85,98%	79.275.024.577,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.203.893.237,00	3.190.184.400,00	75,89%	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.156.882.330,00	45.563.355.122,00	92,69%	25.687.606.720,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.111.691.984,00	24.509.089.004,00	81,39%	27.393.445.197,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.837.389.960,00	17.516.454.071,00	80,21%	20.732.843.550,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.652.072.300,00	3.314.694.500,00	90,76%	4.872.864.110,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	475.000.000,00	0,00	0,00%	588.265.000,00



5.3	BELANJA TAK TERDUGA	3.887.311.303,00	1.132.946.226,00	29,14%	3.064.750.079,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	3.887.311.303,00	1.132.946.226,00	29,14%	3.064.750.079,00
5.4	BELANJA TRANSFER	0,00	0,00	0,00%	0,00
5.4.01	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00%	0,00
	JUMLAH BELANJA	783.924.231.052,00	634.531.479.175,44	80,94%	691.532.020.360,52
	SURPLUS / (DEFISIT)	-13.291.521.075,00	11.175.177.440,33	-84,08%	-77.297.382.232,77
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	36.089.326.063,00	6.659.235.660,41	18,45%	87.156.069.140,18
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	36.089.326.063,00	6.659.235.660,41	18,45%	87.156.069.140,18
6.1.02	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22.797.804.988,00	12.797.804.988,00	56,14%	3.199.451.247,00
6.2.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00%	0,00
6.2.02	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	12.797.804.988,00	12.797.804.988,00	100,00%	3.199.451.247,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000.000,00	0,00	0,00%	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	13.291.521.075,00	-6.138.569.327,59	-46,18%	83.956.617.893,18
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	0,00	5.036.608.112,74	0,00%	6.659.235.660,41



- h. Pelaksanaan Program Berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang memuat alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja.

TABEL 12
PROGRAM/KEGIATAN DAN REALISASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KOTA SIBOLGA

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	INSTANSI
1	2	3	4	5
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	98.485.198.247	76.269.738.656	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.490.600	4.998.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	123.006.000	122.848.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.290.900	0	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.227.240	41.991.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.849.800	24.769.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14.270.900	10.450.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	83.729.000	83.139.390	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.505.000	5.496.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	199.103.245	136.668.571	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.525.000.000	2.190.800.000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	79.933.200	67.005.000	
	Pemeliharaan Mebel	8.400.000	8.400.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.930.000	12.900.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.708.000	10.600.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	21.275.200	14.226.500	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	26.002.750	21.651.250	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	3.839.454.300	3.836.254.300	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	2.358.548.545	2.346.984.300	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	4.317.086.600	4.315.035.700	



	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	6.301.857.500	3.214.250.099	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasa	157.499.670	156.048.600	
	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	377.504.150	353.154.150	
	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	609.499.800	608.933.900	
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.185.000	1.180.000	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.999.998.000	1.991.252.600	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.497.874.201	1.493.162.600	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.999.991.400	1.999.239.600	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	4.316.998.000	2.298.041.265	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	91.999.500	89.908.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	499.999.000	499.421.200	
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	599.968.034	594.177.600	
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	1.320.000.000	934.800.000	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	1.999.941.237	1.999.535.022	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	2.023.657.279	2.002.952.400	
	Pengelolaan Dana BOP PAUD	1.505.000.000	1.444.342.000	
	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	49.997.548	44.539.300	
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	41.581.995	35.918.000	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	329.293.860	325.492.500	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	270.995.000	267.660.000	
	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	234.639.668	212.430.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
1	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	470.288.453	451.992.500	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1.360.575.700	1.032.911.590	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
1	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	372.541.400	347.641.000	
	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	589.300.200	571.288.600	
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga



1	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	50.753.260	42.488.000	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	159.629.650	158.831.300	
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
1	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	56.792.900	56.573.100	
	Penetapan Cagar Budaya	114.346.850	70.743.500	
	Pelindungan Cagar Budaya	86.250.000	83.000.500	
	Pengembangan Cagar Budaya	87.400.950	41.597.900	
	BELANJA DAERAH	88.388.182.565	66.643.856.243	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	BELANJA OPERASI	81.910.572.685	61.198.871.943	
	Belanja Pegawai	38.604.091.323	31.614.335.134	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	25.831.137.838	22.309.264.763	
	Belanja Gaji Pokok ASN	19.412.797.545	17.747.595.616	
	Belanja Gaji Pokok PNS	17.464.185.663	15.975.786.354	
	Belanja Gaji Pokok PPPK	1.948.611.882	1.771.809.262	
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1.869.750.354	1.451.174.995	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	1.727.775.114	1.309.397.263	
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	141.975.240	141.777.732	
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	335.184.091	201.090.267	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	335.184.091	201.090.267	
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	2.734.114.840	1.884.885.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	2.487.331.930	1.814.145.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	246.782.910	70.740.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	190.817.258	110.060.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	82.121.558	50.140.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	108.695.700	59.920.000	
	Belanja Tunjangan Beras ASN	1.267.291.093	905.250.000	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.152.893.492	803.934.420	
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	114.397.601	101.315.580	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.109.915	8.944.657	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	11.677.659	8.944.657	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	7.432.256	0	
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.072.742	264.228	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.513.750	226.984	
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	558.992	37.244	
	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	8.227.071.245	6.482.911.325	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	8.227.071.245	6.482.911.325	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	7.977.071.245	6.482.911.325	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	250.000.000	0	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	4.545.882.240	2.822.159.046	
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.545.882.240	2.822.159.046	
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	4.545.882.240	2.822.159.046	
	Belanja Honorarium	0	0	
	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	0	0	
	Belanja Barang dan Jasa	43.306.481.362	29.584.536.809	
	Belanja Barang	11.945.296.430	6.027.808.197	
	Belanja Barang Pakai Habis	11.945.296.430	6.027.808.197	
	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	4.973.500	4.940.000	



	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	380.716.800	328.516.400	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	5.940.000	5.175.000	
	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	1.631.400	1.631.400	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	0	0	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	108.575.200	0	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	281.579.707	73.633.147	
	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	1.910.712.050	153.373.500	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	637.492.300	518.264.900	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	376.516.200	329.520.600	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	1.748.594.384	1.116.123.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	20.295.000	17.412.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	339.790.800	281.946.200	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	179.546.800	170.185.300	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	73.963.800	69.224.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.550.200	2.200.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	126.000	0	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	9.732.700	4.009.500	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	64.390.340	51.440.000	
	Belanja Obat-Obatan-Obat	2.893.167.342	1.242.312.829	
	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obat Lainnya	505.419.690	425.053.636	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.848.400	0	
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	809.145.274	493.216.324	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.545.135.143	739.630.461	
	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	41.453.400	0	
	Belanja Jasa	24.201.244.485	18.928.692.526	
	Belanja Jasa Kantor	7.561.727.015	5.496.270.156	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	812.790.000	223.560.000	
	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	101.480.000	29.860.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	3.661.408.000	3.040.975.200	
	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	187.499.000	6.485.500	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	125.250.000	125.250.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	169.000.000	168.000.000	
	Belanja Jasa Tenaga Supir	114.000.000	95.000.000	
	Belanja Jasa Kalibrasi	169.134.250	49.985.000	
	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	39.000.000	32.758.502	
	Belanja Tagihan Telepon	0	0	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Belanja Tagihan Air	132.835.365	126.424.452	
	Belanja Tagihan Listrik	570.118.800	570.115.814	
	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	113.993.600	93.901.099	
	Belanja Paket/Pengiriman	1.170.000	295.840	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	21.500.000	10.056.250	Dinas Kesehatan



	Belanja Pengolahan Air Limbah	0	0	Kota Sibolga
	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	1.342.548.000	923.602.499	
	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	15.967.228.200	12.928.873.200	
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	15.799.228.200	12.842.078.800	
	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBU dan BP Kelas 3	168.000.000	86.794.400	
	Belanja Sewa Tanah	8.750.000	8.750.000	
	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	8.750.000	8.750.000	
	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	128.695.000	68.720.000	
	Belanja Sewa Mebel	32.495.000	19.520.000	
	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.500.000	14.500.000	
	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	30.500.000	10.500.000	
	Belanja Sewa Alat Kesehatan Kerja	7.800.000	7.800.000	
	Belanja Sewa Peralatan Umum	43.400.000	16.400.000	
	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	143.600.000	61.750.000	
	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	143.600.000	61.750.000	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Belanja Sewa Hotel	0	0	
	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0	0	
	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	0	0	
	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	0	0	
	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	391.244.270	364.329.170	
	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	17.080.000	0	
	Belanja Bimbingan Teknis	374.164.270	364.329.170	
	Belanja Pemeliharaan	210.960.500	166.660.500	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	161.510.000	117.210.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.470.000	5.000.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	0	0	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2.520.000	1.160.000	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	47.580.000	40.465.000	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	77.940.000	70.585.000	
	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	49.450.500	49.450.500	
	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Industri	49.450.500	49.450.500	
	Belanja Perjalanan Dinas	2.133.392.947	1.010.294.567	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.133.392.947	1.010.294.567	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	294.678.608	112.787.567	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.032.213.339	501.735.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	806.501.000	395.772.000	
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.650.000	400.000	
	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6.650.000	400.000	
	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	6.250.000	0	Dinas Kesehatan Kota Sibolga
	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	400.000	400.000	
	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.808.937.000	3.450.681.019	



	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.808.937.000	3.450.681.019	
	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	4.808.937.000	3.450.681.019	
	BELANJA MODAL	6.477.609.880	5.444.984.300	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.694.352.800	4.957.384.400	
	Belanja Modal Alat Besar	196.540.200	188.000.000	
	Belanja Modal Alat Bantu	196.540.200	188.000.000	
	Belanja Modal Electric Generating Set	196.540.200	188.000.000	
	Belanja Modal Alat Angkutan	106.241.000	90.000.000	
	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	106.241.000	90.000.000	
	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	106.241.000	90.000.000	
	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	377.184.441	347.627.600	
	Belanja Modal Alat Kantor	9.901.341	0	
	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	0	0	
	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	9.901.341	0	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	367.283.100	347.627.600	
	Belanja Modal Mebel	68.717.000	52.891.000	
	Belanja Modal Alat Pendingin	104.291.000	102.226.000	
	Belanja Modal Alat Dapur	4.275.100	2.510.600	
	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	190.000.000	190.000.000	
	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	6.971.700	3.500.000	
	Belanja Modal Alat Studio	6.971.700	3.500.000	
	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	6.971.700	3.500.000	
	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.422.849.800	893.620.800	
	Belanja Modal Alat Kedokteran	1.417.726.000	888.497.000	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	772.018.000	312.327.000	
	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	79.294.000	49.170.000	
	Belanja Modal Alat Kedokteran THT	192.609.000	181.400.000	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	174.414.000	174.000.000	
	Belanja Modal Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	75.555.000	65.500.000	
	Belanja Modal Alat Kedokteran Jantung	123.836.000	106.100.000	
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	5.123.800	5.123.800	
	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	5.123.800	5.123.800	
	Belanja Modal Alat Laboratorium	594.891.480	530.500.000	
	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	594.891.480	530.500.000	
	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	587.388.000	525.000.000	
	Belanja Modal Alat Laboratorium Hematologi	0	0	
	Belanja Modal Alat Laboratorium Farmasi	0	0	
	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	7.503.480	5.500.000	
	Belanja Modal Komputer	327.800.179	264.686.000	
	Belanja Modal Komputer Unit	266.196.500	239.136.000	
	Belanja Modal Personal Computer	266.196.500	239.136.000	
	Belanja Modal Peralatan Komputer	61.603.679	25.550.000	
	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	61.603.679	25.550.000	
	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	2.661.874.000	2.639.450.000	
	Belanja Modal Pengolahan dan Pemurnian	2.661.874.000	2.639.450.000	
	Belanja Modal Alat Pengolahan Air	2.661.874.000	2.639.450.000	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	783.257.080	487.599.900	
	Belanja Modal Bangunan Gedung	783.257.080	487.599.900	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	783.257.080	487.599.900	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	295.657.180	0	
	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	487.599.900	487.599.900	
	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	0	
	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	0	0	
	Belanja Modal Pagar	0	0	



	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.313.753.169	4.097.576.199	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.323.300	9.693.200	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	223.703.600	186.313.600	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	130.203.600	130.203.600	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	93.500.000	56.110.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.124.153.400	1.023.255.599	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.524.000	6.521.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	153.591.800	125.787.200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	416.286.300	403.950.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	107.523.800	86.150.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	68.155.800	49.431.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.500.000	13.770.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347.572.000	337.644.799	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	19.680.000	3.450.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	179.754.060	142.288.482	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.376.617.500	6.276.200.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	168.233.000	133.614.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.507.861.900	2.190.705.350	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	116.930.200	104.806.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.960.000	10.145.000	
	Program Pengembanan Perumahan			
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitas Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	199.999.650	7.352.500	
2	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	107.737.251	80.794.642	
	Program Kawasan Permukiman			
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	416.675.274	140.921.450	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Penyusunan/Review/Legalisisasi Kebijakan Bidang PKP	158.212.150	140.921.450	
2	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh)	258.463.124	170.015.440	



	Ha			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	76.869.424	18.861.440	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	162.429.800	155.154.000	
	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	19.163.900	0	
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)			
1	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.039.173.600	810.430.400	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.039.173.600	810.430.400	
	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
1	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	101.210.100	67.900.000	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	101.210.100	67.900.000	
	Program Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati (Kehati)			
1	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	211.801.500	175.016.700	
2	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	19.949.100	15.298.100	
	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau izin PPLH	19.949.100	15.298.100	
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat			
1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	51.419.300	38.338.000	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	51.419.300	38.338.000	
	Program Pengelolaan Persampahan			
1	Pengelolaan Sampah	190.075.800	173.766.000	Dinas PKPLH Kota Sibolga
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	190.075.800	173.766.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.693.486.111	6.622.101.084	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.560.828.337	4.564.462.405	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	285.683.269	281.136.100	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.980.000	2.980.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.526.557.805	1.457.914.279	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	317.436.700	315.608.300	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	552.478.694	498.229.050	



	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	552.478.694	498.229.050	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.102.908.399	1.022.236.150	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.102.908.399	1.022.236.150	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.648.844.000	1.612.178.800	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.648.844.000	1.612.178.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	370.167.219	248.165.740	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	370.167.219	248.165.740	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.699.101.950	1.659.544.800	
	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.699.101.950	1.659.544.800	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	20.655.621.948	16.561.556.331	
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	20.655.621.948	16.561.556.331	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	10.621.337.397	9.758.627.823	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Sibolga
1	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.915.601.188	2.594.759.742	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.915.601.188	2.594.759.742	Satpol PP Kota Sibolga
2	Administarsi Umum Perangkat Daerah	1.008.497.074	858.705.330	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	24.998.000	23.132.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.741.900	65.309.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.993.100	23.013.700	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	653.303.274	583.509.070	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.255.800	31.135.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	199.205.000	132.604.460	
3	Administarsi Kepegawaian Perangkat Daerah	306.600.000	303.481.232	Satpol PP Kota Sibolga
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	306.600.000	303.481.232	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15.400.000	15.400.000	Satpol PP Kota Sibolga
	Pengadaan Mebel	4.800.000	4.800.000	
	Pengadaan peralatan dan Lainnya	10.600.000	10.600.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.625.633.635	5.504.158.856	Satpol PP Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15.000.000	14.996.200	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	63.946.035	48.192.656	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.470.400.000	5.440.970.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	825.893.100	482.122.663	Satpol PP Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	791.203.100	458.127.663	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.690.000	23.995.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN	399.878.656	263.063.840	Satpol PP



	DAN KETERTIBAN UMUM			Kota Sibolga
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	366.797.040	231.342.040	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	366.797.040	231.342.040	
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	33.081.616	31.721.800	Satpol PP Kota Sibolga
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	33.081.616	31.721.800	
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	18.750.000	18.750.000	
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.750.000	18.750.000	Satpol PP Kota Sibolga
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	18.750.000	18.750.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.525.519.418	5.095.501.405	
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.851.016.524	1.776.087.076	
	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	2.559.740.727	1.092.598.336	
	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja ASN	1.291.275.797	683.488.740	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	217.800.000	203.165.300	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	129.800.000	129.015.300	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	88.000.000	74.150.000	
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	868.856.340	687.898.061	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	9.992.900	8.546.800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.725.00	42.970.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.728.100	10.115.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	405.725.640	387.435.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	24.083.800	21.463.600	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	25.778.800	17.454.600	
	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	328.822.000	199.911.361	
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.130.477.260	2.067.170.018	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	3.336.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	92.777.260	68.009.018	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.033.200.000	1.995.825.000	
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	251.340.394	196.692.550	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	97.361.550	80.435.300	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	132.236.000	99.732.250	
	Pemeliharaan mebel	5.182.844	4.005.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.560.000	12.520.000	

BPBD Kota Sibolga



	Program Penanggulangan Bencana	206.028.900	164.488.400	
1.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	130.923.900	89.383.400	BPBD Kota Sibolga
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	38.128.000	38.050.800	
	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	92.795.000	51.332.600	
2	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	75.105.000	75.105.000	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencan Kabupaten/Kota	75.105.000	75.105.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.182.922.066	3.544.484.945	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.997.917.730	2.401.493.294	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.997.917.730	2.401.493.294	
2	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	199.477.386	186.021.150	Dinas Sosial Kota Sibolga
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.338.200	3.333.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.409.000	25.203.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.362.900	3.357.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.981.586	12.739.500	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.091.500	11.825.600	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.427.200	6.420.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	135.867.000	123.142.550	
3	Penyediaan Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah	860.673.950	835.047.951	Dinas Sosial Kota Sibolga
	Penyediaan Surat menyurat Daerah	3.870.000	3.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	107.203.950	83.432.951	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	749.600.000	747.815.000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	124.853.000	121.922.550	Dinas Sosial Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.920.000	39.569.200	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	15.383.900	15.251.250	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.540.000	9.315.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan lainnya	58.009.100	57.787.100	
	Program Pemberdayaan Sosial	1.125.124.100	629.910.900	
1	Pengembangan Pengebangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.125.124.100	629.910.900	Dinas Sosial Kota Sibolga
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	675.155.700	375.112.000	
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	449.968.400	254.798.900	
	Program Rehabilitasi Sosial	384.432.820	270.891.600	
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	384.432.820	270.891.600	Dinas Sosial Kota Sibolga



	Penyediaan Permakanan	36.481.750	34.840.800	
	Penyediaan Sandang	20.902.900	11.902.900	
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.339.820	780.000	
	Pemberian Bimbingan fisik, mental spritual dan sosial	233.953.900	167.400.500	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.649.150	0	
	Pemberian Layanan Rujukan	77.105.300	55.967.400	
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	238.481.997	217.080.380	
1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	238.481.997	217.080.380	Dinas Sosial Kota Sibolga
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	123.394.650	102.059.280	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	115.087.347	115.021.100	
	Program Penanganan Bencana	279.387.824	195.166.000	
1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	279.387.824	195.166.000	Dinas Sosial Kota Sibolga
	Penyediaan Makan	167.667.824	120.574.000	
	Penyediaan Sandang	111.720.000	74.592.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.866.596.988	3.262.973.305	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SIBOLGA	3.866.596.988	3.262.973.305	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.372.442.528	3.028.146.686	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.560.754.770	2.312.441.424	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.560.754.770	2.312.441.424	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	248.438.392	221.023.352	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.918.100	8.917.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	52.607.500	52.487.200	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.167.900,	5.164.400	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.197.492	27.197.492	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	25.411.400	25.328.900	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	129.136.000	101.927.860	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425.448.920,	368.198.730	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.700.000	2.676.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	74.548.920	43.322.730	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	348.200.000	322.200.000	
4	Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.272.100	26.160.000	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.527.100	19.415.000	
	Pengadaan Sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	6.745.000	6.745.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	111.528.346	100.323.180	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	48.514.550	43.928.380	



	Jabatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.950.000	15.930.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.063.796	40.464.800	
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	58.499.510	-	
1	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	58.499.510	-	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	58.499.510	-	
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	151.221.725	92.359.023	
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.739.673	50.739.273	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50.739.673	50.739.273	
2	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	65.982.262	7.869.960	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	65.982.262	7.869.960	
3	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34.499.790	33.749.790	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	34.499.790	33.749.790	
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	29.654.950	25.011.050	
1	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	29.654.950	25.011.050	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	29.654.950	25.011.050	
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	254.778.275	117.456.546	
1	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	85.280.535	80.371.784	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA	34.520.000	32.780.700	
	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	50.760.535	47.591.084	
2	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.497.740	37.084.762	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	169.497.740	37.084.762	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	406.726.223	162.306.700	



	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN, PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA SIBOLGA	406.726.223	162.306.700	
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	70.029.210	62.826.650	
1	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	70.029.210	62.826.650	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	70.029.210	62.826.650	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	336.697.013	99.480.050	
1	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	336.697.013	99.480.050	Dinas PMK, PP dan PA Kota Sibolga
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	336.697.013	99.480.050	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	79.503.231	73.236.400	
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	79.503.231	73.236.400	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	79.503.231	73.236.400	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	139.213.630	119.698.300	
1	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	139.213.630	119.698.300	
	Pelayanan antar Kerja	139.213.630	119.698.300	
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	97.534.320	80.506.500	
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	26.070.000	26.070.000	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	26.070.000	26.070.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	71.464.320	54.436.500	
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	71.464.320	54.436.500	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.770.322.382	2.641.196.859	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.996.819.467	2.100.687.080	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.996.819.467	2.100.687.080	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.145.000	24.745.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	14.145.000	14.145.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.000.000	10.600.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	345.576.290	247.494.940	Dinas
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.849.700	4.830.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	73.316.100	70.283.600	



	Kantor			Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	20.064.300	19.358.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.898.790	20.412.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.793.900	10.735.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.116.500	3.081.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	212.537.000	118.793.540	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	11.166.900	-	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.166.900	-	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	319.915.225	227.701.499	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.030.000	3.750.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	85.485.225	25.581.499	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	228.400.000	198.370.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.699.500	40.568.340	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	53.799.500	22.888.340	
	Pemeliharaan Mebel	-	-	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.900.000	17.680.000	
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	40.416.120	35.939.600	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
1	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	40.416.120	35.939.600	
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	40.416.120	35.939.600	
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	21.658.500	21.593.10	
1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	21.658.500	21.593.100	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	21.658.500	21.593.100	
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	37.010.000	37.010.000	Dinas Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga
1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.010.000	37.010.000	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	37.010.000	37.010.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	238.540.600	188.827.300	
1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	238.540.600	188.827.300	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	53.346.030	52.483.500	
	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	32.578.100	32.539.600	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	152.616.470	103.804.200	



	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.590.522.219	3.110.591.223	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	569.700	516.000	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	569.700	516.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.632.014.966	2.161.802.137	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.632.014.966	2.161.802.137	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	324.248.738	323.304.750	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.790.700	21.140.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	68.334.400	68.275.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	31.795.500	31.784.350	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.892.838	25.881.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	62.635.000	62.539.400	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	25.967.300	25.966.700	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	87.833.000	87.717.800	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	577.420.715	568.991.086	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.095.000	4.080.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.725.715	158.511.086	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	407.600.000	406.400.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	56.268.100	55.977.250	Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	14.952.700	14.944.500	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	20.085.400	19.903.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.230.000	21.129.250	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	4,001,574,195	4,203,893,237	
1	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	4,001,574,195	4,203,893,237	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	4,001,574,195	4,203,893,237	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1,660,657,330	1,251,166,733	
1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	500,953,900	230,569,138	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3,489,500	2,337,800	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97,424,100	45,002,400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,290,700	7,568,900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12,043,500	8,037,500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24,377,700	9,547,138	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	14,195,400	9,505,400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	338,133,000	148,570,000	



2	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	992,408,480	905,831,095	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5,985,000	2,130,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	234,023,480	165,701,095	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	752,400,000	738,000,000	
3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	167,294,950	114,766,500	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	139,644,950	103,886,500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27,650,000	10,880,000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	0	15,099,920	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	0	15,099,920	
		Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	0	15,099,920
	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0	7,241,278,758	Dinas Perikanan, Ketahanan Pangan dan Pertanian
1	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0	7,241,278,758	
		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.307.051.049	4.384.751.264	Disduk dan Catpil Kota Sibolga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.612.405.179	2.833.797.976	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.612.405.179	2.833.797.976	
	Belanja Gaji Pokok ASN	1.684.337.738	1.433.603.435	
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	182.811.319	114.197.344	
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	232.016.400	145.110.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	129.600.000	0	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	54.985.392	33.220.000	
	Belanja Tunjangan Beras ASN	118.521.761	72.057.900	
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	5.937.945	1.183.951	
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	247.952	20.821	
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.203.946.672	1.034.404.525	
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	659.864.210	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		428.836.700	361.366.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor		47.257.600	45.253.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover		23.901.600	23.386.000	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer		357.677.500	292.727.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		11.565.100	10.744.700	
Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor		11.565.100	10.744.700	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor		9.265.010	8.281.000	
Belanja Natura dan Pakan Natura		2.365.900	2.358.000	
Belanja Makanan dan Minuman Rapat		0	0	
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu		6.899.110	5.923.000	



	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	67.118.400	66.138.200	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	67.118.400	66.138.200	
	Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	143.079.000	112.125.752	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	143.079.000	112.125.752	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.592.000	41.592.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.592.000	41.592.000	
	Belanja Modal alat kantor lainnya	0	0	
	Belanja Modal Personal Computer	34.932.000	34.932.000	
	Belanja Modal Peralatan Personal Komputer	6.660.000	6.660.000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	838.784.360	802.279.571	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.015.000	2.010.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	3.015.000	2.010.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	158.769.360	123.269.571	
	Belanja Tagihan Air	12.885.000	3.767.080	
	Belanja Tagihan Listrik	104.638.400	84.118.690	
	Belanja kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	41.245.960	35.383.801	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	677.000.000	677.000.000	
	Belanja Jasa Administrasi	594.800.000	594.800.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.000.000	13.000.000	
	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	30.800.000	30.800.000	
	Belanja Jasa Tenaga Supir	38.000.000	38.000.000	
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	400.000	400.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	154.405.300	148.426.065	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.558.200	67.139.465	
	Belanja Barang Pakai Habis	30.138.200	27.122.950	
	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	30.138.200	27.122.950	
	Belanja Jasa Kantor	4.000.000	1.731.515	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	4.000.000	1.731.515	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.420.000	38.285.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.420.000	38.285.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.580.000	14.157.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	7.190.000	7.140.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	2.440.000	2.110.000	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personel Computer	4.950.000	4.907.000	
	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	63.752.000	63.752.000	
	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	63.752.000	63.752.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3.515.100	3.377.600	
	Belanja Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	3.515.100	3.377.600	
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	36.769.800	34.146.000	
1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	15.030.800	14.956.500	Disduk dan Catpil Kota



	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	15.030.800	14.956.500	Sibolga
	Belanja Barang Pakai Habis	1.190.800	1.116.500	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	523.200	514.500	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	667.600	602.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	13.840.000	13.840.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.840.000	13.840.000	
2	Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	21.739.000	19.189.500	
	Pelayanan Secara Aktif pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk. (lamar dusanak)	21.739.000	19.189.500	
	Belanja Barang Pakai Habis	11.039.000	10.019.500	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	571.800	559.500	Disduk dan Catpil Kota Sibolga
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.467.200	9.460.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	10.700.000	9.170.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.700.000	9.170.000	
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	79.108.610	70.865.500	
1	Pelayanan Pencatatan Sipil	79.108.610	70.865.500	
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	79.108.610	70.865.500	
	Belanja Barang Pakai Habis	13.893.610	10.025.500	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	785.100	738.500	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1.993.100	1.623.000	Disduk dan Catpil Kota Sibolga
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	4.840.100	4.295.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.275.310	3.369.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.215.000	60.840.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	65.215.000	60.840.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	37.115.200	37.038.000	
2	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.115.200	37.038.000	
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	37.115.200	37.038.000	Disduk dan Catpil Kota Sibolga
	Belanja Barang Pakai Habis	1.365.200	1.288.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	697.600	686.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	667.600	602.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	35.750.000	35.750.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	35.750.000	35.750.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	26.977.600	26.906.000	
1	Penyusunan Profil Kependudukan	26.977.600	26.906.000	
	Penyediaan data Kependudukan Kab/Kota	9.113.800	9.078.000	
	Belanja Barang Pakai Habis	9.113.800	9.078.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.000	27.000	Disduk dan Catpil Kota Sibolga
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	8.750.000	8.750.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	333.800	301.000	
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan			



	Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	17.863.800	17.828.000	
	Belanja Barang Pakai Habis	17.863.800	17.828.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	30.000	27.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	17.500.000	17.500.000	
	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	333.800	301.000	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.298.100	3.250.500	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.298.100	3.250.500	
2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.085.410.722	3.282.491.321	
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	4.085.410.722	3.282.491.321	
3	Adminstrasi Kepegawaian Perangkat daerah	273.449.500	265.072.385	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.	265.072.385	265.072.385	
4	Adminstrasi Umum Perangkat Daerah	451.126.652	420.786.325	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	25.537.900	5.531.300	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.893.800	160.921.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.699.400	12.688.500	
	Penyediaan Bahan Logistik	34.590.252	34.046.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56.300.000	56.141.025	
	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.207.300	8.760.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	147.898.000	122.698.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	151.852.400	141.820.000	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	151.852.400	141.820.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.341.237.620	2.284.575.683	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
	Penyediaan Surat Menyurat	13.215.000	13.125.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik	226.222.620	191.850.683	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.101.800.000	2.079.600.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	444.056.763	437.425.810	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	405.555.350	399.349.810	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	24.690.000	24.265.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	13.811.413	13.811.413	
	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			
1	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/ Kota	311.058.000	304.124.500	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	261.980.200	256.532.000	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	49.077.800	47.592.500	



2	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	50.200.000	49.800.000	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
	Revitalisasi Terminal Type C (Fasilitas Utamad dan Penunjang)	50.200.000	49.800.000	
3	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	694.403.900	445.604.500	
	Pengawasan dan pengendalian Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	694.403.900	445.604.500	
4	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau barang antar Kota Dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota	78.094.000	77.780.000	
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	78.094.000	77.780.000	
5	Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	103.953.200	100.951.000	Dinas Perhubungan Kota Sibolga
4	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	103.953.200	100.951.000	
	Program Pengelolaan Pelayaran	176.818.800	175.680.000	
1	Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	176.818.800	175.680.000	
	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	176.818.800	175.680.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	14.684.195.648	11.778.966.260	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	4.394.530.305	3.840.540.045	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.913.117.628	2.369.220.145	
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.752.706.228	2.248.024.445	
	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.476.28.328	1.983.286.650	
	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	275.777.900	264.737.795	
2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	160.411.400	121.195.700	
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	10.500.000	10.500.000	
	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	149.911.400	110.695.700	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.481.412.677	1.471.319.900	
1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	50.005.825	46.742.400	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1.431.406.852	1.424.577.500	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	10.289.665.343	7.938.426.215	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.706.068.793	7.403.611.386	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.284.473.226	4.566.197.187	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.284.473.226	4.566.197.187	



2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	454.783.950	437.847.619	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	17.247.900	16.034.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	96.544.200	93.505.400	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	69.172.100	66.129.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.080.150	22.809.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	61.704.630	61.702.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	8.658.000	8.645.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.376.970	169.023.219	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.632.436.543	2.192.675.280	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.100.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.341.936.543	928.875.280	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.286.000.000	1.259.700.000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	334.375.074	206.891.300	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	101.905.500	99.846.250	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	220.309.574	102.555.050	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12.160.000	4.490.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	583.596.550	534.814.829	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga
1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	583.596.550	534.814.829	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	583.596.550	534.814.829	
	BELANJA DAERAH	15.524.531.063	6.960.097.894	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	BELANJA OPERASI	12.019.730.114	5.493.601.794	
	Belanja Pegawai	3.475.293.189	2.904.712.347	
	Belanja Barang Dan Jasa	8.544.436.925	2.588.889.447	
	BELANJA MODAL	3.504.800.949	1.466.496.100	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.264.315.200	952.262.000	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	2.240.485.749	514.234.100	
	Program penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.236.152.725	4.445.356.689	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.444.793.189	2.875.612.347	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	29.034.300	0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.951.600	11.119.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.901.000	3.492.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.410.500	5.538.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	0	0	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	228.565.299	189.132.577	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	48.750.000	48.750.000	
	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	3.270.000	0	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	161.939.130	93.505.128	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.109.309	58.988.500	



	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	888.600.000	854.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	171.383.837	136.191.137	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	790.000	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	171.654.561	169.027.000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.538.188.912	179.260.200	
	Pelaksanaan Survei/Pendapatan Indeks Pengetahuan Masyarakat Tentang Kependudukan	527.475.040	117.000.000	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	473.370.980	8.131.800	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistim Informasi Keluarga	60.043.362	41.847.000	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	79.803.300	0	
	Pencatatan dan Pengumpulan data keluarga	35.616.380	0	
	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	27.050.100	0	
	Pembentukan dan operasionalisasi rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program bangga kencana di sector lain	169.280.670	8.862.600	
	Pembinaan dan pengawasan pencatatan dan pelaporan program bangga kencana	64.999.800	0	
	Pemetaan program pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana (Bangga Kencana)	99.949.600	3.418.800	
	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.762.958.631	1.956.888.105	
	Pengendalian Program KKBPK	180.040.422	68.794.300	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	250.000.000	77.580.000	
	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program bangga Kencana Melalui Rapat Kecamatan (Rakorcam) Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokarya	249.999.925	63.382.057	
	Promosi dan KIE Program bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	173.678.196	47.135.000	
	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	173.523.820	10.302.500	
	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	0	0	
	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	1.795.222.248	0	
	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	359.976.356	600.000	
	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan Oleh PKB/PLKB	249.971.650	188.219.300	
	Pengendalian Pendistribusian Alkon dan Saran Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya	94.999.709	7.179.748	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	499.999.684	20.718.500	
	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	50.000.000	0	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan sarana Penunjang Pelayanan KB	29.999.910	0	

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana



	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.499.999.700	1.444.349.100	
	Pembinaan Pasca Pelayanan Bagi Peserta KB	67.999.850	0	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringannya	13.949.824	819.000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	68.000.000	0	
	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	71.399.600	17.475.200	
	Peningkatan Kesertaan KB Pria	99.999.567	0	
	Peningkatan Kompetensi pengelola dan Petugas Logistik Alkon Serta Penunjang Pelayanan Kb	59.999.950	0	
	Promosi dan Konseling Pasca Persalinaan	79.999.950	0	
	Penguatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	199.999.660	0	
	Integrasi Pembangunan Lintas sector di Kampung KB	199.999.800	7.037.400	
	Pembinaan Terpadu Kampung KB	199.999.900	0	
	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	94.198.710	3.296.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.987.230.795	378.592.900	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelola Keuangan Keluarga	149.999.950	22.944.300	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Petrencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	149.998.750	21.052.600	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKR,PPKS, dan UPPKA)	32.683.855	0	
	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKR,PPKS, dan UPPKA)	216.000.000	0	
	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKR,PPKS, dan UPPKA)	321.300.000	289.170.000	
	Penyediaan Biaya Operasional Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKR,PPKS, dan UPPKA)	349.914.370	8.775.000	
	Pembentukan Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKR,PPKS, dan UPPKA)	167.405.227	11.071.000	
	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,BKL,BKR,PPKS, dan UPPKA)	249.997.520	25.580.000	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Bagi Mitra Kerja	349.931.123	0	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.129.847.850	1.111.498.005	Dinas Pariwisata, Pemuda dan
1	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan	1.112.862.875	1.094.695.130	



	Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			Olahraga
	oordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	312.152.320	308.078.820	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	291.311.835	286.350.135	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	509.398.720	500.266.175	
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	0	0	
2	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	16.984.975	16.802.875	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi	16.984.975	16.802.875	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	72.485.800	71.794.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah	33.161.100	32.741.100	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	33.161.100	32.741.100	
2	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah	0	0	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	0	0	
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	0	0	
4	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	39.324.700	39.052.900	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Seleksi Atlet Daerah	39.324.700	39.052.900	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	0	0	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	0	0	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	5.353.679.807	4.195.036.010	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.016.052.772	2.902.725.859	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.016.052.772	2.902.725.859	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.000.000	15.960.000	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.000.000	15.960.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.407.934	327.061.779	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.769.600	2.686.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40.399.800	35.459.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21.297.300	20.717.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	21.928.854	21.363.879	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.103.180	21.574.100	



	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.894.200	5.880.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	221.015.000	219.381.300	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	845.840.325	821.630.042	Dinas Pariwisata, Pemudan dan Olahraga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.440.000	9.990.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	129.000.325	105.240.042	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	706.400.000	706.400.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.378.776	127.658.330	Dinas Pariwisata, Pemudan dan Olahraga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	77.307.900	71.049.000	
	Pemeliharaan Mebel	0	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.210.000	35.925.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.860.876	20.684.330	
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	260.463.048	252.875.800	
1	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	191.677.500	184.277.400	Dinas Pariwisata, Pemudan dan Olahraga
	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	191.677.500	184.277.400	
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	68.785.548	68.598.400	
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/ Kota	68.785.548	68.598.400	
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	117.742.300	117.437.200	
1	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	117.742.300	117.437.200	Dinas Pariwisata, Pemudan dan Olahraga
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/ Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	97.314.800	97.009.700	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	20.427.500	20.427.500	
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	102.285.290	101.969.090	
1	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	0	0	Dinas Pariwisata, Pemudan dan Olahraga
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0	0	
2	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	102.285.290	101.969.090	
	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	102.285.290	101.969.090	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	4.274.103.128	3.318.271.852	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.906.757.328	2.957.379.152	Dinas PMPPTSP Kota Sibolga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.870.928.483	1.990.187.220	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.870.928.483	1.990.187.220	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	63.360.000	63.360.000	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan	63.360.000	63.360.000	



	Perundang-Undangan			
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	413.249.300	411.446.720	Dinas PMPPTSP Kota Sibolga
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.014.900	3.825.100	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	152.491.800	152.061.900	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	53.142.200	53.087.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.118.900	24.004.100	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.484.800	3.448.800	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.889.700	2.889.700	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.107.000	172.129.920	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	500.405.045	433.667.712	Dinas PMPPTSP Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.400.000	5.325.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	62.605.045	49.342.712	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	432.400.000	379.000.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	58.814.500	58.717.500	Dinas PMPPTSP Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	52.524.500	52.427.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.290.000	6.290.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	91.915.800	91.693.700	Dinas PMPPTSP Kota Sibolga
1	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	91.915.800	91.693.700	
		Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	91.915.800	91.693.700
	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	180.522.800	176.702.400	Dinas PMPPTSP Kota Sibolga
1	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	180.522.800	176.702.400	
		Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	180.522.800	
	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	78.707.200	76.296.600	Dinas PMPPTSP Kota Sibolga
1	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	78.707.200	76.296.600	
		Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui/Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik	24.364.200	22.114.600
	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis resiko	10.800.000	10.800.000	
	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	43.543.000	43.382.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	16.200.000	16.200.000	Dinas PMPPTSP Kota Sibolga
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	16.200.000	16.200.000	
		Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	16.200.000	16.200.000
	Belanja	7.526.055.234	5.471.920.126	Dinas Komunikasi dan
	Belanja Operasi	6.965.420.934	5.444.320.126	



	Belanja Modal	560.634.300	27.600.000	Informasi Kota Sibolga
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.430.343.836	3.791.574.026	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.813.381.136	2.312.501.006	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	505.015.900	436.552.945	
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	988.219.900	925.251.350	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	123.726.900	117.268.725	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFOMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	49.980.000	35.420.000	
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	49.980.000	35.420.000	
	PROGRAM PENGELOLAN APLIKASI INFOMATIKA	3.045.731.398	1.644.926.100	Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Sibolga
1	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	659.731.498	105.154.400	
2	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.385.999.900	1.539.771.700	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	-	-	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	-	-	
1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			Sekretariat Daerah Kota Sibolga
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.762.740	6.677.500	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.612.723.375	9.177.518.361	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.243.800	4.026.400	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.152.600	7.524.600	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	102.869.533	63.055.060	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	88.844.025	64.169.800	
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
	Penyediaan Komponen Instalasi	151.972.700	151.929.500	Sekretariat



	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Daerah Kota Sibolga
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	322.823.100	322.738.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	479.834.900	478.588.350	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.472.590.800	1.472.370.705	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	574.124.900	535.970.526	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.071.466.000	2.071.297.968	
6	pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Sekretariat Daerah Kota Sibolga
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	790.000.000	780.000.000	
	Pengadaan Mebel			
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	704.478.930	688.930.880	
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat Daerah Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	31.455.000	31.440.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.513.621.660	1.460.798.952	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	255.021.200	239.298.845	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.592.600.000	2.507.660.000	
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Sekretariat Daerah Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.106.691.800	2.078.821.023	
	Pemeliharaan Mebel	60.000.000	59.751.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	459.499.100	458.703.200	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	876.026.280	873.568.916	
9	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			Sekretariat Daerah Kota Sibolga
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	229.487.373	159.559.446	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	213.600.000	212.500.000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	400.000.000	370.000.000	
10	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			Sekretariat Daerah Kota Sibolga
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	611.914.700	609.940.200	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	318.516.800	274.376.400	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	90.191.800	89.993.200	
11	Penataan Organisasi			Sekretariat Daerah Kota Sibolga
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	279.832.250	205.959.524	
	Fasilitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	193.625.010	109.746.300	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	227.892.530	185.225.806	
12	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			Sekretariat Daerah Kota Sibolga
	Fasilitas Komunikasi Pimpinan	1.006.757.000	959.079.350	



	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				
1	Administrasi Tata Pemerintahan			Sekretariat Daerah Kota Sibolga	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	150.122.400	122.152.400		
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	54.415.643	30.314.300		
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	607.612.242	480.935.374		
2	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat				
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3.414.427.170	3.361.123.680		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	1.025.000.000	673.447.200		
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	38.594.000	37.619.200		
3	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum				
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	243.509.300	214.699.241		
	Fasilitasi Bantuan Hukum	388.464.200	356.292.883		
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	155.744.750	132.773.787		
4	Fasilitasi Kerjasama Daerah				
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	66.395.560	35.585.800		
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN				
1	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			Sekretariat Daerah Kota Sibolga	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	613.954.637	612.230.437		
2	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan				
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	113.391.000	105.353.800		
3	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1.019.547.200	948.419.100		
	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	446.536.700	306.793.379		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.661.043.932	21.073.994.332		
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	108.375.032	81.246.600		Sekretariat DPRD Kota Sibolga
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24.992.832	12.766.800		
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	63.424.360	51.883.400		
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.957.840	16.596.400		
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.602.808.675	3.650.241.818		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.523.879.923	3.589.218.618		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	49.070.832	37.501.600		
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	29.857.920	23.521.600		
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	712.541.000	555.272.078		
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	473.805.000	472.175.400		
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	143.000.000	63.360.000		
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	95.736.000	19.736.678		
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.465.327.140	1.748.853.100	Sekretariat DPRD Kota Sibolga	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	55.275.600	46.835.400		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	295.310.700	244.070.100		
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	223.335.940	212.928.600		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	709.972.500	576.014.200		
	Penyediaan Barang Cetak dan	539.113.000	418.195.600		
				Sekretariat	



	Penggandaan			DPRD Kota Sibolga
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	123.005.400	78.597.600	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	519.314.000	172.211.600	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.661.505.769	2.829.143.460	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.049.691.700	1.860.250.000	
	Pengadaan Mebel	83.246.300	82.868.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	327.747.495	215.455.500	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.200.820.274	670.569.960	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.833.892.900	1.655.070.269	Sekretariat DPRD Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	17.100.000	14.250.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	618.392.900	446.420.269	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.198.400.000	1.194.400.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.213.851.609	1.392.617.634	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.272.905.830	900.819.755	
	Pemeliharaan Mebel	24.285.000	21.399.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	526.822.079	183.554.979	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	236.628.700	195.960.000	Sekretariat DPRD Kota Sibolga
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	153.210.000	90.883.900	
8	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	9.445.329.107	7.896.454.838	
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	8.867.743.007	7.401.536.238	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	497.586.100	494.918.600	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	80.000.000	0	
9	Layanan Administrasi DPRD	1.617.412.700	1.265.094.535	
	Fasilitasi Fraksi DPRD	291.515.400	282.111.000	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	918.133.600	754.337.535	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	407.763.700	228.646.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24.952.550.620	16.783.633.382	Sekretariat DPRD Kota Sibolga
1	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	1.154.645.320	110.153.520	
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	674.532.200	57.184.200	
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	480.113.120	52.969.320	
2	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1.082.618.000	380.430.500	
	Pembahasan KUA dan PPAS	24.315.100	24.315.100	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	25.302.000	0	
	Pembahasan APBD	340.618.100	81.110.700	
	Pembahasan APBD Perubahan	339.540.800	0	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	352.842.000	275.004.700	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	305.577.920	200.652.065	
	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	305.577.920	200.652.065	
3	Peningkatan Kapasitas DPRD	2.349.089.500	874.605.300	



	Pendalaman Tugas DPRD	1.545.178.000	460.966.800	Sekretariat DPRD Kota Sibolga
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	476.000.000	215.000.000	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	206.000.000	140.000.000	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	58.638.500	58.638.500	
	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	63.273.000	0	
4	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3.206.539.800	306.632.400	
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	40.900.000	0	
	Pelaksanaan Reses	3.165.639.800	306.632.400	
5	Fasilitasi Tugas DPRD	16.854.080.080	14.911.159.597	
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	16.854.080.080	14.911.159.597	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN /KOTA	88,253,920,728	79,619,291,501	Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sibolga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	27,309,090,969	24,506,833,889	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	27,309,090,969	24,506,833,889	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	358,959,659	355,414,904	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	258,176,659	255,790,500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,783,000	99,624,404	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	215,600,000	215,600,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	215,600,000	215,600,000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	370,270,100	325,871,310	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60,944,100	36,164,460	
	62,798,000	62,653,850		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	246,528,000	227,053,000	
5	Peningkatan Pelayanan BLUD	60,000,000,000	54,215,571,398	
	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	60,000,000,000	54,215,571,398	
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	45,335,276,718	45,134,851,509	
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	45,331,276,718	45,130,951,509	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	12,694,478,050	12,694,476,050	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan kesehatan	1,082,401,000	1,080,000,000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	31,330,460,368	31,159,389,329	
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	159,537,300	138,221,700	
	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	64,400,000	58,864,430	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4,000,000	3,900,000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	4,000,000	3,900,000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.618.463.090	26.922.145.200	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32.977.685.846	16.478.293.124	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	32.977.685.846	16.478.293.124	
2	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan	23.421.100	22.691.900	



	Perangkat Daerah			
	Pengolahan Data Retribusi Daerah	23.421.100	22.691.900	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	348.110.000	287.820.100	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	146.400.000	129.652.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	201.710.000	158.168.100	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.029.017.688	1.006.035.925	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.535.600	29.869.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	197.208.800	187.076.100	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	270.731.488	263.938.600	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	41.377.600,00	40.627.500,00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	29.998.200	27.014.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	459.166.000	457.510.725	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	386.576.800	362.650.000	
	Pengadaan Mebel	41.866.800	40.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	344.710.000	322.650.000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.958.790.710	8.032.200.951	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.985.000	11.988.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.929.005.710	7.019.612.951	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.014.800.000	1.000.600.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	894.860.946	732.453.200	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	262.339.600	179.250.700	
	Pemeliharaan Mebel	26.000.000	25.339.500	
8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	149.677.600	136.010.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	182.824.746	175.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	274.019.000	216.853.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	16.850.063.015	6.130.523.974	
1	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	3.668.947.015	2.784.436.532	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	147.581.675	122.150.300	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	147.706.600	-	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	94.034.300	92.779.500	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA- SKPD	39.918.150	35.828.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	93.909.300	92.371.000	
	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA- SKPD	281.727.900	277.961.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	527.030.900	388.376.989	
	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan	799.460.400	619.479.400	



	Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD			
	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.041.362.604	769.463.400	
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	496.215.186	386.026.943	
2	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1.286.184.525	1.201.041.155	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	691.449.600	684.721.033	
	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	69.257.400	66.296.700	
	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	34.131.600	33.467.719	
	Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	112.165.700	111.151.403	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	53.071.000	46.275.400	
	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	37.159.700	36.149.000	
	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	43.804.275	34.251.600	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	245.145.250	188.728.300	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	495.459.800	462.898.402	
	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	55.702.800	39.951.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	241.651.700	238.633.602	
	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	79.247.600	78.343.600	
	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	118.857.700	105.970.200	
3	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	11.399.471.675	1.682.147.885	
	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	4.810.720.372	146.001.659	
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	6.588.751.303	1.536.146.226	
	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.797.492.500	1.347.598.622	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.797.492.500	1.347.598.622	
	Penyusunan Standar Harga	192.533.850	134.230.100	
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	7.789.000	7.268.000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	111.562.700	76.652.200	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	194.069.800	186.316.900	
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	297.742.350	249.057.800	



	Pengamanan Barang Milik Daerah	176.497.050	130.725.100	
	Penilaian Barang Milik Daerah	73.275.500,00	36.616.700,00	
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	169.065.100	128.792.522	
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	157.284.000	89.262.500	
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	81.645.500	47.440.200	
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	154.929.100	136.573.600	
	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	181.098.550	124.663.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.192.786.570	2.993.404.593	
1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	4.192.786.570	2.993.404.593	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	332.753.200	269.931.694	
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	322.830.700	132.811.462	
	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	160.734.770	136.845.000	
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	302.922.800	281.041.500	
	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	318.700.000	290.547.700	
	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	513.613.700	339.003.200	
	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	217.462.900	163.655.634	
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	201.931.900	196.493.750	
	Penagihan Pajak Daerah	179.539.800	164.178.600	
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	185.399.900	164.093.500	
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1.285.861.800	687.005.553	
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	171.035.100,00	167.797.000,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	8.674.269.544	8.019.602.881	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.312.353.266	7.150.403.913	Inspektorat Kota Sibolga
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.312.353.266	7.150.403.913	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	45.500.000	0	
	Pendidikan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	45.500.000	0	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	601.477.393	333.207.518	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.671.000	4.155.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.080.400	25.155.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.047.600	8.892.800	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	10.049.266	4.075.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.190.000	13.177.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	537.439.127	277.752.218	
4	Penyediaan Jasa Penunjang	644.308.585	510.515.760	Inspektorat Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	275.000	183.500	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.633.585	52.132.260	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	561.400.000	458.200.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	70.630.300	25.475.690	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	57.270.300	17.930.690	



	Jabatan			
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.360.000	7.545.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	267.624.196	216.071.900	Inspektorat Kota Sibolga
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	171.683.146	125.407.700	Inspektorat Kota Sibolga
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	21.237.800	19.103.300	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	79.977.300	79.650.000	
	Reviu Laporan Kinerja	4.925.600	3.376.800	
	Reviu Laporan Keuangan	23.420.000	23.077.100	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	42.122.446	200.500	
2	Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	95.941.050	90.664.200	Inspektorat Kota Sibolga
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	52.015.250	47.865.900	
	Pengawasan Dengan Tujuan tertentu	43.925.800	42.798.300	
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	161.850.750	122.146.700	Inspektorat Kota Sibolga
1	Pendampingan dan Asistensi	161.850.750	122.146.700	Inspektorat Kota Sibolga
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	161.850.750	122.146.700	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	6.865.796.940	5.225.317.574	
1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	5.347.153.190	3.971.548.069	Badan Kepegawaia n Daerah Kota Sibolga
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.347.153.190	3.971.548.069	
2	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	686.583.200	509.993.335	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	65.323.700	63.595.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.443.400	143.861.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	79.145.700	72.340.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.650.700	34.708.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	47.597.700	43.440.500	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	295.422.000	152.048.335	
3	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	672.142.300	603.337.412	Badan Kepegawaia n Daerah Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.010.000	17.265.650	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	173.732.300	139.271.762	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	472.400.000	446.800.000	
4	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	159.918.250	140.438.758	Badan Kepegawaia n Daerah Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.508.250	86.198.758	
	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.017.403.281	663.736.405	Badan Kepegawaian Daerah Kota Sibolga
1	PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	1.017.403.281	663.736.405	
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	31.206.000	30.943.835	
	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	806.197.281	452.792.570	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	180.000.000	180.000.000	



	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	5.329.919.320	4.006.978.832	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.730.550.070	3.592.330.523	Bappeda Kota Sibolga
	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	4.730.550.070	3.592.330.523	
	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	4.730.550.070	3.592.330.523	
	Belanja Gaji Pokok ASN	2.387.626.504	1.865.988.172	
	Belanja Gaji Pokok PNS	2.387.626.504	1.865.988.172	
	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	255.927.880	191.128.524	
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	255.927.880	191.128.524	
	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	232.016.400	164.460.000	
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	232.016.400	164.460.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	129.600.000	0	
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	129.600.000	0	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	70.552.944	49.155.000	
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	70.552.944	49.155.000	
	Belanja Tunjangan Beras ASN	148.874.894	103.415.760	
	Belanja Tunjangan Beras PNS	148.874.894	103.415.760	
	Belanja Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus ASN	6.638.018	3.461.471	
	Belanja Tunjangan PPH/ Tunjangan Khusus PNS	6.638.018	3.461.471	
	Belanja Pembulatan Gaji ASN	350.101	25.696	
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	350.101	25.696	
	Belanja Tunjangan Penghasilan ASN	1.498.963.329	1.214.695.900	
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN	1.498.963.329	1.214.695.900		
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS	1.498.963.329	1.214.695.900		
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	316.399.750	207.646.391	Bappeda Kota Sibolga
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.193.000	3.125.500	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	3.193.000	3.125.500	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54.497.100	48.244.600	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	25.921.900	22.876.600	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	25.287.700	22.453.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.287.500	2.915.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.079.500	7.847.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	8.079.500	7.847.000	
	Penyediaan Bahan Logistik	10.948.150	9.564.500	
	Belanja Natura dan Pakan-Natura	5.572.000	4.192.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.376.150	5.372.500	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	32.195.000	31.852.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	32.195.000	31.852.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	207.487.000	107.012.791	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	207.487.000	107.012.791	
	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	207.013.000	
Penyediaan jasa surat menyurat		6.990.000	5.592.000	
Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		6.990.000	5.592.000	
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		43.623.000	29.103.995	
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan		43.623.000	29.103.995	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan		1.200.000	1.200.000	



	kantor			
	Belanja jasa Pencucian Pakaian, Alat kesenian dan Kebudayaan, serta alat Rumah Tangga	1.200.000	1.200.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	155.200.000	144.700.000	
	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	123.200.000	123.200.000	
	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	13.000.000	13.000.000	
	Belanja Jasa Tenaga Supir	19.000.000	8.500.000	
4	Pemereliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.956.500	26.405.923	Bappeda Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.156.500	18.170.923	
	Belanja Bahan Bakar dan Pelumas	25.686.500	10.800.000	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	33.470.000	7.370.923	
	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	--	--	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.600.000	0	
	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.600.000	0	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.200.000	8.235.000	
	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit Personal Komputer	14.200.000	8.235.000	
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	324.389.100	221.267.666	Bappeda Kota Sibolga
1	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	74.391.000	57.091.300	
	Pelaksanaan Musrenbang Kab/ Kota	74.391.000	57.091.300	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.206.100	2.062.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.232.000	4.920.000	Bappeda Kota Sibolga
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.307.100	1.263.900	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.445.500	2.915.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk kegiatan kantor – Perabot kantor	1.166.000	1.090.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.931.300	14.550.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	1.400.000	500.000	
	Belanja Perjanan Dinas Biasa	42.703.000	29.790.400	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	249.998.100	164.176.366	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	2.975.200	2.796.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	8.952.000	8.670.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	14.887.000	14.637.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	8.731.000	7.290.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.002.900	12.200.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	18.508.000	12.400.000	
	Belanja jasa Tenaga Ahli	56.040.000	56.040.000	
	Belanja Perjanan Dinas Biasa	125.902.000	50.143.366	
	Program Koordinasi Dan Sikronisasi	175.489.109	107.943.000	Bappeda



	Perencanaan Pembangunan Daerah			Kota Sibolga
1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia	90.437.009	69.125.800	Kota Sibolga
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	90.437.009	69.125.800	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	4.233.400	3.968.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.576.300	2.416.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.829.100	1.829.100	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	5.566.700	5.171.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.247.509	4.515.500	
	Belanja Perjanjian Dinas Biasa	69.984.000	51.226.200	
2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	85.048.100	38.817.200	Bappeda Kota Sibolga
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	85.048.100	38.817.200	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	7.768.400	7.527.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.915.700	1.500.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.724.000	1.455.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.686.000	9.600.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	9.200.000	0	
	Belanja Perjanjian Dinas Biasa	44.754.000	18.735.200	
3	Penelitian dan Pengembangan	256.545.700	197.125.899	Bappeda Kota Sibolga
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	256.545.700	197.125.899	
1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	46.777.200	33.779.500	Bappeda Kota Sibolga
	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	46.777.200	33.779.500	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.511.100	1.256.500	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.116.500	1.180.500	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	850.800	825.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	1.395.300	1.252.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.459.500	3.220.000	
	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	37.444.000	26.146.000	
2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi Dan Pembangunan	209.768.500	163.346.399	Bappeda Kota Sibolga
	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	209.768.500	163.346.399	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	1.689.900	1.536.500	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.790.400	1.734.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.273.000	2.575.000	
	Belanja Alat/ Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer	3.592.200	3.291.000	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	25.749.000	18.955.000	
	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	34.800.000	29.034.900	
	Belanja sewa bangunan gedung tempat pertemuan	12.000.000	12.000.000	



	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	126.874.000	94.219.999	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.652.120.633	4.455.124.075	
1	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	5.169.313.492	3.118.119.744	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.169.313.492	3.118.119.744	
2	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	339.937.100	293.894.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.781.400	11.109.500	Kecamatan Sibolga Kota
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	99.895.100	80.693.500	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.288.400	20.841.200	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	64.986.800	60.324.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	55.906.900	45.588.200	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	9.749.500	9.738.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	66.329.000	65.600.000	
3	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	1.012.053.415	952.815.731	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.120.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	180.153.415	135.195.731	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	828.000.000	814.500.000	
4	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	130.816.626	90.293.800	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.794.800	58.133.800	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	44.170.000	32.160.000	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan GedungTempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	10.851.826	-	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79.600.025	70.139.600	
1	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat</i>	79.600.025	70.139.600	Kecamatan Sibolga Kota
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di TingkatKecamatan	30.381.825	20.947.800	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	49.218.200	49.191.800	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KEAMANAN UMUM	26.022.250	16.828.500	
1	<i>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum</i>	26.022.250	16.828.500	Kecamatan Sibolga Kota
	Sinergitas Dengan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	26.022.250	16.828.500	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	828.779.675	817.405.644	
1	<i>Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan</i>	28.779.675	27.344.100	Kecamatan Sibolga Kota
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum MusyawarahPerencanaan Pembangunan di Kelurahan	28.779.675	27.344.100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN KOTA BARINGIN	200.000.000	196.915.386	
1	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	101.187.240	100.387.240	Kecamatan Sibolga Kota
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	98.812.760	96.528.146	
	Pemberdayaan Mukim			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN	200.000.000	197.715.386	Kecamatan



	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PANCURAN GEROBAK			Sibolga Kota
1	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	101.187.240	101.187.240	
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	98.812.760	96.528.146	
	Pemberdayaan Mukim	-	-	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PASAR BARU	200.000.000	197.715.386	
1	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	101.187.240	101.187.240	Kecamatan Sibolga Kota
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	98.812.760	96.528.146	
	Pemberdayaan Mukim			
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN PASAR BELAKANG	200.000.000	197.715.386	
1	Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan	101.187.240	101.187.240	Kecamatan Sibolga Kota
2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	98.812.760	96.528.146	
	Pemberdayaan Mukim			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	6.321.714.723	5.250.983.991	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.536.007.191	3.553.345.650	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.536.007.191	3.553.345.650	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	306.520.432	269.735.484	
	Penyediaan Komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	11.049.400	11.037.485	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.790.100	95.064.800	Kecamatan Sibolga Selatan
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14.306.100	12.852.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.671.332	83.715.200	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	22.750.000	22.749.900	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	9.749.500	7.730.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	65.204.000	36.585.599	
3	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	1.378.913.950	1.339.088.357	
	Penyediaan jasa surat menyurat	5.520.000	4.416.000	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	130.393.950	91.672.357	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.243.000.000	1.243.000.000	Kecamatan Sibolga Selatan
4	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100.273.150	88.814.500	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	71.133.150	61.384.500	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.140.000	27.430.000	
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	824.318.622	557.057.139	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	465.511.662	207.845.700	
	Pemberdayaan masyarakat di kelurahan	465.511.662	207.845.700	Kecamatan Sibolga Selatan
2	Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	358.806.960	349.211.439	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	358.806.960	349.211.439	
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.301.518	24.807.800	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	25.301.518	24.807.800	Kecamatan Sibolga Selatan
	Sinergitas dengan Kepolisian Republik	25.301.518	24.807.800	



	Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.448.362.703	5.542.748.976	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.961.395.872	4.104.965.056	Kecamatan Sibolga Utara
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.961.395.872	4.104.965.056	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.326.199	166.705.800	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	20.843.800	20.836.300	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.499.200	32.498.700	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	51.995.999	49.143.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	21.999.700	21.998.300	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	6.380.500	6.379.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	47.607.000	35.850.000	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.209.235.200	1.182.054.151	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.900.000	3.900.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	94.920.200	70.259.651	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	65.015.000	62.494.500	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.045.400.000	1.045.400.000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.405.432	89.023.969	Kecamatan Sibolga Utara
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	55.234.850	52.363.969	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21.860.000	21.860.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	19.310.582	14.800.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	123.763.093	97.885.900	
1	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	86.710.440	61.381.800	Kecamatan Sibolga Utara
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50.000.000	34.196.200	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	36.710.440	27.185.600	
2	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	20.146.408	19.705.000	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.146.408	19.705.000	
3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	16.906.245	16.799.100	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	16.906.245	16.799.100	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.029.999.804	752.773.223	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	29.999.804	29.267.100	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	29.999.804	29.267.100	



	KELURAHAN ANGIN NAULI	200.000.000	130.090.736	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.300	40.138.390	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.300	40.138.390	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	89.999.700	89.952.346	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	89.999.700	89.952.346	
	KELURAHAN HUTA BARANGAN	200.000.000	199.933.464	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.300	109.981.117	Kecamatan Sibolga Utara
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.300	109.981.117	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	89.999.700	89.952.347	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	89.999.700	89.952.347	
	KELURAHAN HUTA TONGA-TONGA	200.000.000	40.138.090	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.000	40.138.090	Kecamatan Sibolga Utara
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.000	40.138.090	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90.000.000	-	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	-	
	KELURAHAN SIBOLGA ILIR	200.000.000	153.368.577	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.000	63.374.138	Kecamatan Sibolga Utara
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.000	63.374.138	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90.000.000	89.994.439	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	89.994.439	
	KELURAHAN SIMAREMARE	200.000.000	199.975.256	
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	110.000.000	109.980.817	Kecamatan Sibolga Utara
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	110.000.000	109.980.817	
2	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	90.000.000	89.994.439	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	90.000.000	89.994.439	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	16.022.000	
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	20.000.000	16.022.000	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	20.000.000	16.022.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.382.299.837	4.497.444.555	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.027.852.152	3.257.698.133	Kecamatan Sibolga Sambat
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.027.852.152	3.257.698.133	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	301.480.940	251.133.250	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19.756.600	14.557.400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	116.999.900	97.018.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	19.800.000	19.152.900	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	65.266.240	63.163.950	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.060.500	16.571.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	12.620.700	12.620.100	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	49.977.000	28.049.400	



3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	910.582.235	865.977.172	Kecamatan Sibolga Sambah
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.175.000	2.748.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	112.007.235	69.829.172	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	793.400.000	793.400.000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	142.384.510	122.636.000	Kecamatan Sibolga Sambah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kenderaan Dinas Operasional atau Lapangan	51.989.400	33.639.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.040.000	26.560.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.355.110	62.437.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	114.376.900	102.641.700	Kecamatan Sibolga Sambah
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	53.379.800	50.171.500	
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	53.379.800	50.171.500	
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	60.997.100	52.470.200	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60.997.100	52.470.200	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.803.600	27.217.600	Kecamatan Sibolga Sambah
1	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	27.803.600	27.217.600	
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27.803.600	27.217.600	
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.228.146	40.480.660	Kecamatan Sibolga Sambah
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	43.228.146	40.480.660	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	43.228.146	40.480.660	
1	KELURAHAN PANCURAN BAMBU	200.000.000	122.200.250	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153.183.800	75.431.800	Kecamatan Sibolga Sambah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	46.816.200	46.768.450	
	2	KELURAHAN PANCURAN DEWA	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153.183.800	111.282.600	Kecamatan Sibolga Sambah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	46.816.200	46.773.450	
	3	KELURAHAN PANCURAN KERAMBIL	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153.183.800	77.817.000	Kecamatan Sibolga Sambah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	46.816.200	46.773.450	
	4	KELURAHAN PANCURAN PINANG	200.000.000	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	153.183.800	78.578.000	Kecamatan Sibolga Sambah
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	46.816.200	46.773.450	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	2.327.831.809	1.860.016.169	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.759.305.678	1.307.271.405	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.759.305.678	1.307.271.405	



2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	199.647.081	199.307.155	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	3.348.800	3.341.700	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.099.700	20.086.100	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.347.800	3.343.300	
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	40.627.281	40.619.455	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	6.707.500	6.707.300	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	125.516.000	125.209.300	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan			
	pengadaan pakaian dinas dan atribut kelengkapannya			
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	264.290.115	254.132.183	
	Penyediaan jasa surat menyurat	2.340.000	2.340.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45.150.115	34.992.183	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	216.800.000	216.800.000	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	0	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	104.588.935	99.305.426	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.683.050	57.129.541	
	Pemeliharaan Mebel	3.200.000	3.200.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.110.000	9.380.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	29.595.885	29.595.885	
	pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	578.767.919	577.981.786	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	578.767.919	577.981.786	
	Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan			
	Pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	396.822.435	396.036.302	
	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporani di bidang ideologi wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan	181.945.484	181.945.484	
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	24.171.677.837	23.037.337.426	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi,	24.171.677.837	23.037.337.426	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga



	fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik			
	Penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	353.708.897	319.368.486	
	Pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah			
	Pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, Peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah serta pemantauan situasi politik di daerah	23.817.968.940	22.717.968.940	
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	4.586.852.032	3.295.136.000	
1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	4.586.852.032	3.295.136.000	
	Penyusunan bahan perumusan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah	4.586.852.032	3.295.136.000	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
	Pelaksanaan kebijakan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah			
	Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormasn asing di daerah			
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	0	0	
1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya	0	0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sibolga
	Pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			
	Pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitas pencegahan penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah			
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	0	0	
1	Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	0	0	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
	Pelaksanaan koordinasi di bidang			



kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah			Sibolga
Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah			
Pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan serta penanganan konflik di daerah			

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.

Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi, permasalahan yang muncul juga berdasarkan hasil evaluasi pembangunan Kota Sibolga yang disajikan pada Bab.II Dokumen ini. Mempercepat pemulihan pasca pandemi COVID-19 dengan mengadopsi cara-cara baru dan pengembangan sumber pertumbuhan baru seiring pergeseran preferensi permintaan konsumen ke arah gaya hidup sehat dan pembangunan berkelanjutan, maka permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pembangunan Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah
2. Belum optimalnya peningkatan sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai
3. Rendahnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas
4. Rendahnya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi wisata
5. Rendahnya kualitas kehidupan dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya
6. Kurangnya pelayanan sosial kemasyarakatan
7. Rendahnya Kuantitas Infrastruktur pembangunan daerah

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang dipicu oleh beberapa akar masalah yang bisa dilihat pada tabel di bawah ini:



TABEL 13
PEMETAAN PERMASALAHAN UNTUK PENENTUAN PRIORITAS DAN SASARAN
PEMBANGUNAN DAERAH

No	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Perlu peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan di daerah.	1. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. 2. Masih kurangnya kesadaran aparat pemerintah sebagai pelayan masyarakat
2	Belum optimalnya peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Belum optimalnya kualitas pelayanan Publik	1. Kurangnya Pendidikan untuk pengembangan SDM 2. Masih rendahnya sarana dan prasarana pada pelayanan publik
3	Belum optimalnya peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan	Fasilitas yang Kurang dalam menunjang pendidikan	1. Perekonomian yang tidak mendukung. 2. Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan. 3. Pembangunan yang tidak Merata terhadap wilayah- wilayah kecil 4. Kualitas pengajar yang terbilang rendah.
4	Belum optimalnya peningkatan destinasi	Rendahnya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi wisata	1. Kurangnya keikutsertaan pada event-event pameran 2. Kurangnya koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder pariwisata 3. Kurangnya sarana dan prasarana pada destinasi wisata
5	Belum optimalnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Rendahnya kualitas kehidupan dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal Sesuai dengan fungsinya	1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui upaya perbaikan prasarana dan sarana dasar lingkungan, serta pengembangan ekonomi produktif dan pembukaan lapangan kerja baru serta program sosial lainnya
6	Belum optimalnya Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kurangnya pelayanan sosial kemasyarakatan	1. Belum maksimalnya penanganan penuntasan kemiskinan ekstrim, pengendalian inflasi dan pengurangan angka pengangguran.
7	Belum optimalnya peningkatan Infrastruktur Dasar	Rendahnya Kuantitas Infrastruktur pembangunan daerah	1. Belum optimalnya pelayanan persampahan



No	PERMASALAHAN POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
			2. Kurangnya SDM pengawasan LPJU, TPA dan pembibitan.
			3. Tempat pembuangan akhir (TPA) sudah sangat terbatas dan jenuh
			4. Kapasitas produksi air bersih dan pengembangannya oleh PDAM masih terbatas.
			5. Belum adanya sistem jaringan khusus air limbah dan sistem pengelolaan air limbah, baik pada rumah tangga maupun secara kolektif.

- IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

TABEL 14
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PER URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA SIBOLGA

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	2	3	4
	ASPEK PELAYANAN UMUM		
	Layanan Urusan Wajib Dasar		
1	Pendidikan		
	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D4	- Masih kurangnya guru PAUD yang tammatan S1/D4	- Performa guru sangat mempengaruhi keberhasilan yang merupakan output dari siswa PAUD.



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan		Faktor Penentu Keberhasilan
	Rasio pengawas dan penilik PAUD	-	Kurangnya Pengawas dan Penilik PAUD	-	Pengawas itu penjamin mutu pendidikan, dengan keterbatasan pengawas, maka proses pembinaan, pengawasan pembelajaran untuk meningkatkan mutu kualitas pembelajaran bagi guru dan kepala sekolah kurang optimal
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	-	Masih kurangnya kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	-	Melaksanakan perbaikan mutu pembelajaran.
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-	Masih kurangnya kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	-	Melaksanakan perbaikan mutu pembelajaran.
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasio	-	Rendahnya kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	-	Melaksanakan perbaikan mutu pembelajaran.
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	-	Rendahnya kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	-	Melaksanakan perbaikan mutu pembelajaran.
2	Kesehatan				
	Dinas Kesehatan				
	Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar	-	Minimnya Alat Kesehatan Sesuai Standar	-	Meningkatkan kualitas pelayanan
	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	-	Meningkatnya Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	-	Peningkatan kesehatan ibu dan anak
	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	-	Rendahnya Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	-	Peningkatan kesehatan anak melalui kelurahan
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	-	Rendahnya Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	-	pelayanan selama masa kehamilan untuk mendapatkan pelayanan antenatal
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	-	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	-	Meningkatkan kualitas SDM yang di tempatkan pada unit pelayanan kesehatan
	RSU FL Tobing Sibolga				
	Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit	-	Masih rendahnya Ketersediaan Alat Kesehatan Sesuai Standar Rumah Sakit	-	Meningkatkan Sarana dan Prasarana sesuai standar Rumah Sakit



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
	BOR (Bed Occupancy Rate)	- kurangnya pemanfaatan fasilitas perawatan rumah sakit oleh masyarakat	- Prosedur yang belum terstandarisasi, sehingga pasien cenderung memilih prosedur pengobatan yang telah teruji.
3	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang		
	Tingkat kemantapan jalan	- Kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan terhadap penyelenggaraan jalan	- Membangun dan memelihara Infrastruktur jalan, baik itu jalan Provinsi atau pun jalan perkotaan
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	- Masih ada masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh	- Rehabilitasi rumah tidak layak huni pada lingkungan pemukiman kumuh dengan memanfaatkan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota.
	Persentase luasan permukiman kumuh dikawasan perkotaan	- Masih ada masyarakat yang tinggal di lingkungan kumuh di kawasan perkotaan	- Perencanaan pada kawasan kumuh
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		
	Satpol PP		
	persentase penegakkan perda	- Masih rendahnya tingkat keamanan dan ketertiban masyarakat	- Menjamin kepastian hukum, menciptakan, serta memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
	BPBD		
	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	- Belum optimalnya penduduk yang di kawasan rawan bencana memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman	- Upaya pemberian informasi mengenai pencegahan dan kesiapsiagaan bencana ini dilakukan bersamaan dengan pemberian informasi tentang risiko bencana.



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan		Faktor Penentu Keberhasilan
6	Sosial				
	PMKS/PPKS skala Kab./Kota yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	-	Masih ada PMKS/PPKS skala Kota yang tidak memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar.	-	Upaya peningkatan layanan kesejahteraan Sosial.
	Wajib Non Dasar				
1	Tenaga Kerja				
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	Masih kurangnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	-	Upaya peningkatan pengadaan kegiatan pelatihan dan menyediakan tenaga ahli yang akan memberikan pelatihan berbasis kompetensi.
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak				
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	-	Rendahnya kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor non pertanian	-	Meningkatkan peran perempuan dibidang ekonomi.
3	Pangan				
	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	Belum optimalnya pemerataan pemanfaatan hasil produksi pangan	-	Ketersedianya pasokan pangan untuk penduduk baik dari segi kuantitas dan kualitas.
4	Pertanahan				
	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	-	Belum adanya data Luas Lahan Bersertifikat	-	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pertanahan
	Penyelesaian Ijin Lokasi	-	Belum optimalnya Penyelesaian Ijin Lokasi	-	Peningkatan kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang
5	Lingkungan Hidup				
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	-	Belum optimalnya hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	-	Peningkatan pengendalian lingkungan hidup
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	-	Belum optimalnya hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	-	Peningkatan pengendalian lingkungan hidup



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Permasalahan	Faktor Penentu Keberhasilan
6	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil		
	Rasio pasangan berakate nikah	- Masih kurangnya kesadaran pasangan untuk mengurus dokumen akte nikah	- Meningkatkan sosialisasi tentang pentingnya dokumen akte nikah.
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		
	Swadaya masyarakat terhadap Program Pemberdayaan masyarakat	- Masih kurangnya swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	- Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terhadap program pemberdayaan masyarakat
	Pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan masyarakat	- Masih kurangnya pemeliharaan Pasca program Pemberdayaan masyarakat	- Meningkatkan kualitas kinerja pemerintahan terhadap pasca program pemberdayaan masyarakat
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	- Masih kurangnya perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB	- Penguatan Program KB
	Persentase Penggunaan Kontasepsi Jangka Panjang (MKJP)	- Kurangnya minat masyarakat dalam penggunaan kontrasepsi jangka panjang	- Pengadakan sosialisasi tentang penggunaan kontrasepsi jangka panjang
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	- Rendahnya cakupan anggota bina keluarga lansia ber-KB	- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	- Rendahnya pembiayaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga melalui APBD	- Pembiayaan program kependudukan, KB dan pembangunan keluarga dengan memanfaatkan sumber dana dari APBN, APBD Provinsi.
9	Perhubungan		
	Rasio Ijin Trayek	- Belum optimalnya kualitas pelayanan ijin trayek	- Monitoring ke pengusaha yang menggunakan pelayanan ijin trayek
	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	- Tidak adanya uji KIR angkutan umum di Kota Sibolga	- Peningkatan sarana dan prasarana uji KIR angkutan umum
	Persentase Layanan Angkutan Darat	- Rendahnya kualitas layanan angkutan darat	- Mengadakan Diklat untuk meningkatkan SDM layanan angkutan darat.



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan		Faktor Penentu Keberhasilan
10	Komunikasi dan Informatika				
11	Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah				
	Persentase koperasi aktif	-	Banyaknya koperasi yang aktif tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan	-	Memaksimalkan monitoring ke koperasi yang aktif
	Persentase usaha mikro dan kecil	-	Banyaknya usaha mikro dan kecil yang sudah di fasilitasi kemudian tutup	-	Melaksanakan monitoring terhadap usaha mikro dan kecil
	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif	-	Rendahnya pelaku ekonomi kreatif	-	Meningkatkan pelaku ekonomi kreatif yang berdaya saing
12	Penanaman Modal				
	Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)	-	Belum optimalnya dukungan pembinaan dalam penerbitan regulasi kemudahan berinvestasi.	-	Menetapkan kebijakan dan regulasi yang pro investasi.
13	Kepemudaan dan Olah Raga				
	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	-	Masih rendahnya pelatih yang bersertifikasi	-	Peningkatan pembinaan keolahragaan yang bersertifikat
14	Statistik				
	Buku "kabupaten dalam angka"	-	Tidak adanya buku "kabupaten dalam angka"	-	Melaksanakan penyusunan buku "kabupaten dalam angka"
	Buku "PDRB"	-	Tidak adanya buku "PDRB"	-	Melaksanakan penyusunan buku "PDRB"
15	Persandian				
16	Kebudayaan				
	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	Tidak adanya penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	Melaksanakan penyelenggaraan festival seni dan budaya
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	Kurang optimalnya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	-	Melestarikan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan.
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	Minimnya Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	dRevitalisasi dan inventarisasi Jumlah karya budaya.
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	Mengelola Cagar Budaya
	Kebudayaan daerah yang dilestarikan dan dikembangkan	-	Kurang optimalnya Kebudayaan daerah yang dilestarikan dan dikembangkan	-	Melestarikan dan mengembangkan Kebudayaan daerah
	Jumlah Adat Istiadat / Sejarah yang dibina	-	Kurang optimalnya Adat Istiadat / Sejarah yang dibina	-	Melestarikan adat Istiadat /sejarah



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan		Faktor Penentu Keberhasilan
	Pembangunan Gedung Museum	-	Tidak adanya Pembangunan Gedung Museum	-	Pembangunan Gedung Museum
17	Perpustakaan				
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	-	Kurangnya minat baca pengunjung	-	Melakukan promosi-promosi yang kreatif secara berkelanjutan untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang perpustakaan
18	Kearsipan				
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	-	Minimnya SDM pengelola kearsipan	-	Peningkatan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang arsip
PILIHAN					
1	Pariwisata				
	PAD Sektor Pariwisata	-	Masih minimnya PAD sektor Pariwisata	-	Peningkatan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan event, pameran, media sosial, media cetak dan elektronik
2	Pertanian				
	Cakupan bina kelompok petani	-	Minimnya lahan pertanian	-	Peningkatan SDM penyuluhan pertanian dan peningkatan keterampilan petani dan kelompok petani
3	Kehutanan				
	TIDAK ADA				
4	Energi dan Sumber Daya Menieral				
	TIDAK ADA				
5	Perdagangan				
	Ekspor Bersih Perdagangan	-	tidak dapat dilaksanakan	-	tidak dapat dilaksanakan
6	Perindustrian				
	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin	-	Belum optimalnya cakupan bina kelompok pengrajin	-	Peningkatan kualitas SDM industri kecil menengah melalui pelatihan dan pendampingan
7	Transmigrasi				
	TIDAK ADA				
8	Kelautan dan Perikanan				
	Cakupan bina kelompok nelayan	-	Kesejahteraan nelayan secara ekonomi dan sosial masih jauh dari harapan nelayan	-	Regulasi pemerintah yang kondusif untuk mendukung pengembangan usaha kelautan dan perikanan
Penunjang					
1	Sekretariat Daerah				



No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Permasalahan		Faktor Penentu Keberhasilan
	Indexs Reformasi Birokrasi	-	Masih belum optimalnya Indeks Reformasi Birokrasi	-	Pemerintahan harus melakukan pelayanan publik yang berkualitas yang efektif dan efisien, bersih dari KKN.
2	Sekretariat Dewan				
	- Rapat Dengar Pendapat	-	Proses Integrasi dan sinergitas lembaga legislatif dan eksekutif	-	Persamaan persepsi dalam menyikapi masalah-masalah pembangunan
3	Perencanaan				
	Tingkat konsistensi prioritas perencanaan pembangunan kedalam APBD	-	Belum optimalnya pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap rencana pembangunan dan target capaian prioritas pembangunan daerah	-	Kurangnya SDM Perencana yang telah melakukan pelatihan
4	Keuangan				
	Persentase laporan aset daerah yang di susun	-	Perlu ditingkatkan kualitas laporan terkait dengan inventaris aset	-	Peningkatan kapasitas SDM
5	Kepegawaian				
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-	Masih minimnya rata-rata lama pegawai yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	-	Peningkatan SDM
6	Penelitian dan Pengembangan				
	Persentase perangkat Daerah yang difasilitasi dalam penerapan Inovasi daerah	-	Minimnya OPD yang mengusulkan Inovasi Daerah	-	Monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan hasil penelitian dan peningkatan SDM bidang penelitian dan pengembangan
7	Pengawasan				
	Maturitas SPIP	-	Masih minimnya Kualitas penyelenggaraan SPIP	-	Meningkatkan standar operasional pemeriksaan
	Level Kapabilitas APIP	-	Masih pada level 2	-	Meningkatkan standar operasional pemeriksaan
8	Kewilayahan				
	Indeks Kepuasan Masyarakat	-	Masih belum tercapainya target IKM	-	Peningkatan pelayanan masyarakat
Pemerintahan Umum					
9	Kesatuan Bangsa dan Poilitik				
	Masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	-	Masih kurangnya masyarakat yang menerima pemahaman wawasan kebangsaan	-	Melaksanakan sosialisasi pemahaman wawasan kebangsaan



- Isu Strategis

Perumusan isu strategis selain berdasarkan pada permasalahan pokok diatas juga berdasarkan pada permasalahan pembangunan dalam RPJMD Kota Sibolga, permasalahan pembangunan hasil evaluasi RKPD, arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan RKP. Maka isu strategis Kota Sibolga tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Faktor yang menyebabkan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip- prinsip Good Governance, fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja.
2. Belum optimalnya sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai Faktor yang menyebabkan belum optimalnya sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai adalah rendahnya sumber daya, minimnya jumlah petugas, rendahnya motivasi, kurangnya kerjasama, kurang disiplin, kurangnya pemahaman SOP, terbatasnya anggaran dan kurangnya komunikasi dan koordinasi.
3. Rendahnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas Faktor yang menyebabkan rendahnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas adalah rendahnya kualitas tenaga pengajar dan prestasi siswa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Banyak guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai serta masih banyaknya guru honorer. Selain itu pemberian Bantuan Operasional Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya perlu penerapan kurikulum pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja yang memungkinkan skill tenaga kerja dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya.
4. Rendahnya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi wisata Faktor yang menyebabkan Rendahnya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi wisata adalah Promosi pariwisata bukan hanya bertujuan mengenalkan satu destinasi wisata, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kepada wisatawan tentang nilai penting destinasi tersebut.
5. Belum optimalnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian Faktor yang menyebabkan Belum optimalnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian adalah Kurangnya keterlibatan masyarakat, Ketidakefektifan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta, Kurangnya alokasi sumber daya yang memadai, Ketidaktepatan dalam perencanaan.



6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran Faktor yang menyebabkan belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah pemerintah masih mementingkan pembangunan di ibu kota sehingga masih terlihat kemiskinan dimana mana. Untuk pengurangan pengangguran pemerintah harus mendorong investasi di sektor-sektor yang menjanjikan lapangan kerja baru. Serta meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Dan juga memberikan insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja di sektor informal.
7. Belum optimalnya kelanjutan Infrastruktur Dasar Yang menyebabkan pembangunan di Indonesia yang belum merata yaitu dikarenakan pemerintah yang hanya menyediakan fasilitas yang sifatnya kompleks untuk daerah perkotaan, sehingga bagi masyarakat yang letaknya di daerah pedesaan atau terpencil butuh waktu yang lama untuk menikmati.

Konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan dan Isu Strategis pada RKPD 2024

Permasalahan pembangunan dan isu strategis Kota Sibolga yang tertuang dalam RKPD Kota Sibolga 2024 merupakan cakupan dari prioritas pembangunan RPJMD Kota Sibolga 2021 – 2026.

Pada tabel berikut dapat dilihat konsistensi antara Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan dan Isu Strategis pada RKPD 2024.

TABEL 15

KONSISTENSI ANTARA PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH DENGAN PERMASALAHAN ISU STRATEGIS PADA RKPD 2024

No.	Prioritas Kota Sibolga	Permasalahan RKPD 2024	Isu Strategis RKPD 2024
1	Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah	Faktor yang menyebabkan belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih adalah kurangnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip Good Governance , fasilitas yang kurang memadai dan kurangnya disiplin aparatur di waktu jam kerja.
2	Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Belum optimalnya peningkatan sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai	Faktor yang menyebabkan belum optimalnya sarana dan pelayanan kesehatan yang memadai adalah rendahnya sumber daya, minimnya jumlah petugas, rendahnya motivasi, kurangnya kerjasama, kurang disiplin, kurangnya pemahaman SOP, terbatasnya anggaran dan kurangnya komunikasi dan koordinasi.



3	Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan	Rendahnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Ada beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan salah satunya adalah rendahnya kualitas tenaga pengajar dan prestasi siswa serta sarana dan prasarana yang kurang memadai . Banyak guru yang belum memiliki profesionalisme yang memadai serta masih banyaknya guru honorer. Selain itu pemberian Bantuan Operasional Pendidikan bagi siswa miskin berprestasi sangat dibutuhkan. Selanjutnya perlu penerapan kurikulum pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia kerja yang memungkinkan skill tenaga kerja dapat bekerja sesuai dengan kompetensinya.
4	Peningkatan Destinasi Pariwisata	Rendahnya promosi, pemasaran dan pengembangan destinasi wisata	Faktor yang menyebabkan belum optimalnya pemanfaatan potensi daerah berbasis pariwisata adalah peraturan yang tumpang tindih, kurangnya kualitas SDM, kurangnya publikasi, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi, kurang diperhatikannya aspek lingkungan hidup, dan kurangnya perhatian pada objek wisata religi.
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian	Rendahnya kualitas kehidupan dalam bermasyarakat dengan memanfaatkan prasarana yang ada secara optimal sesuai dengan fungsinya	Faktor yang menyebabkan Belum optimalnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian adalah Kurangnya keterlibatan masyarakat, Ketidakefektifan koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta, Kurangnya alokasi sumber daya yang memadai, Ketidaktepatan dalam perencanaan.
6	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Kurangnya pelayanan sosial kemasyarakatan	Faktor yang menyebabkan belum optimalnya penanggulangan kemiskinan dan pengangguran adalah pemerintah masih mementingkan pembangunan di ibu kota sehingga masih terlihat kemiskinan dimana mana. Untuk pengurangan pengangguran pemerintah harus mendorong investasi di sektor-sektor yang menjanjikan lapangan kerja baru. Serta meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja. Dan juga memberikan insentif bagi perusahaan yang menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja di sektor informal.
7	Peningkatan Infrastruktur Dasar	Rendahnya Kuantitas Infrastruktur pembangunan daerah	Yang menyebabkan pembangunan di Indonesia yang belum merata yaitu dikarenakan pemerintah hanya menyediakan fasilitas yang sifatnya kompleks untuk daerah perkotaan , sehingga bagi masyarakat yang letaknya di daerah pedesaan atau terpencil butuh waktu yang lama untuk menikmati.



b. VISI dan MISI Kepala Daerah

Tujuan dan Sasaran pembangunan Kota Sibolga berdasarkan visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Sibolga Sehat, Pintar dan Makmur”**, maka perwujudan visi tersebut memprioritaskan pembangunan sumberdaya manusia terutama dari segi peningkatan pendidikan serta infrastruktur demi menciptakan kesejahteraan masyarakat Kota Sibolga, meningkatkan lebih baik lagi penuntasan masalah kesehatan yang terus masih menjadi keluhan dari masyarakat, serta penguatan ekonomi kerakyatan dengan memperbanyak tumbuhnya usaha-usaha kecil masyarakat.

Perumusan visi merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah sebagai hasil dari analisis permasalahan utama yang terjadi di Kota Sibolga.

Sehat : Derajat kesehatan masyarakat terjaga dengan baik sesuai dengan standar sistem kesehatan nasional. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) yang dicapai dengan menurunnya angka kesakitan terhadap penyakit menular dan tidak menular serta penyakit degeneratif lansia. Derajat kesehatan masyarakat juga ditandai dengan meningkatnya kualitas kesehatan ibu dan bayi yang diukur dengan berkurangnya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Balita. Ada berbagai standar lain yang juga harus dicapai seperti meningkatnya status gizi masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam pengembangan keluarga berencana. Berbagai kondisi tersebut harus dicapai dengan akses masyarakat yang baik terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang terjangkau dan merata di Kota Sibolga.

Pintar : Berkembangnya tingkat pendidikan masyarakat Kota Sibolga ke arah yang semakin baik. Kondisi ini diukur dengan meningkatnya Angka Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah serta Angka Melek Huruf (AMH). Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Sekolah (APS) Jenjang Pendidikan Dasar Sembilan tahun dan Usia Dini. Berbagai kondisi dapat dicapai dengan peningkatan fasilitas pendidikan dasar yang terjangkau dan merata serta pengembangan kualitas tenaga pendidik yang memiliki disiplin dan komitmen kuat.



Makmur : Masyarakat memiliki kondisi kehidupan yang lebih sejahtera secara lahir dan batin. Makmur disini dicirikan melalui masyarakat dengan peluang dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan taraf kehidupannya menjadi lebih baik dari sebelumnya serta mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial yang memadai. Hal ini ditandai dengan Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan per Kapita yang semakin baik dan menurunnya angka Gini Rasio, Angka Kemiskinan serta Angka Pengangguran.

Dalam mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan Kota Sibolga, yaitu :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel
2. Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur
3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City).
4. Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru.
5. Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Sibolga Tahun 2024 mengacu dan memperhatikan Tujuan, Sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026, Hasil evaluasi kinerja RKPD sampai dengan Tahun 2022, Prioritas Nasional dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 dan Rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan tahun 2024.

Pembangunan Kota Sibolga tahun 2024 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan Kota Sibolga periode 2021-2026. Pencapaian target sasaran pembangunan diindikasikan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.



Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sibolga pencapaiannya dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sebagaimana tertuang dalam table 4.1 berikut ini.

TABEL 16
TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SIBOLGA
TAHUN 2024

Misi/Tujuan/Sasaran Pembangunan		Indikator	Target 2024
Misi 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparan dan Akuntabel			
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;	Indeks Reformasi Birokrasi	B
		Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,50
	Sasaran		
	1 Meningkatnya kualitas penyelenggara an pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (AKIP)	B
	2 Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintah	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77,20
Indeks Daya Saing Daerah (IDSG)		0,62	
	Indeks Penilaian Sistem Merit	0,70	
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur			
2.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,94
	Sasaran		
	1 Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,70
		Angka Kematian Ibu	183
		Angka Kematian Bayi	15
Angka Kematian Balita		27	
	Pravalensi wasting pada Balita	6%	
	Pravalensi Angka Stunting	8,5%	
	Kualitas Makanan dan Minuman	92%	
	Penanganan penyakit tidak Menular	100%	
	Ketersediaan Alat Kesehatan sesuai Standar	76%	



		Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk	11 (rasio)
		Puskesmas menjadi BLUD	2
		Kelurahan Stop BABS Pola Pangan Harapan (PPH)	41,2%
		Pola Pangan Harapan (PPH)	80%
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk Menata pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berwawasan kota pintar (Smart City).			
3.	Mewujudkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan	Indeks Resiko Bencana	137,80
	Sasaran		
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,379
	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	RPPLH Kota Sibolga	Ada
		Air Minum layak dan Berkelanjutan	84,25%
		Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	80%
		Luasan Kumuh	40 Ha
Misi 4: Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun, dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru			
4.	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Indeks Pembangunan Manusia	74,94
	Sasaran		
	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah	10,59
Harapan Lama Sekolah		14,13	
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.			
5.	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi;	Pertumbuhan Ekonomi	5,20
6.	Mewujudkan kesejahteraan sosial; Mewujudkan kemudahan perizinan dan investasi	Gini Rasio	0,274
		Angka Kemiskinan	10
		Angka Pengangguran	4610 (6%)
	Sasaran		
	1 Meningkatkan pendapatan masyarakat	Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	69,72
	2 Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Pendapatan Daerah	108.106.881.827
		Indeks Pembangunan Gender	98,03
		Indeks Kesetaraan Gender	75,03
Meningkatkan jumlah Ekonomi Kreatif		5 unit	



c. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN JANGKA MENENGAH.

Pembangunan Kota Sibolga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pembangunan Nasional. Oleh karena itu prioritas pembangunan Kota Sibolga yang dirumuskan harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik ditingkat provinsi maupun tingkat nasional.

Penyusunan RKPD Tahun 2024 disusun melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politik, serta atas-bawah dan bawah-atas. RKPD Tahun 2024 disusun dengan memerhatikan juga keselarasan dengan prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2024.

Adapun tema pembangunan Kota Sibolga pada periode Tahun 2024 adalah Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian melalui penataan kota berbasis pariwisata dan barang/ jasa yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024

Mengingat RKP Tahun 2024 masih dalam proses penyusunan oleh Pemerintah Pusat, maka rancangan awal RKP ini masih mengacu pada tema RKP Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif yang Berkelanjutan”. Dengan skala prioritas pembangunan tahap ke-4 RPJPN 2005-2025 (RPJMN 2020-2024) yaitu percepatan pembangunan dengan menekankan Percepatan pembangunan dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dengan focus pembangunannya adalah

(1) Percepatan penghapusan kemiskinan Ekstrem, (2) Peningkatan kualitas SDM dalam hal kesehatan dan pendidikan, (3) Penanggulangan Pengangguran disertai dengan Peningkatan Decent job, (4) Mendorong pemulihan dunia usaha, (5) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, (6) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, (7) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar air bersih dan sanitasi, (8) Pembangunan Ibu Kota Nusantara

Prioritas Nasional (PN) RKP 2024 adalah agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, antara lain :



PN. 1	Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
PN. 2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
PN. 3	Meningkatkan Sumber daya Manusia berkualitas dan berdaya saing
PN. 4	Revolusi mental dan Pembangunan Kebudayaan
PN. 5	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
PN. 6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
PN. 7	Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik

Pelaksanaan prioritas pembangunan untuk mendukung pencapaian sasaran Pembangunan Nasional pada tahun 2024 antara lain:

- Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,9 persen,
- Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 27 persen,
- Tingkat pengangguran terbuka 5,3-6 persen,
- Rasio gini 0,375-0,378,
- Indeks pembangunan manusia (IPM) 73,29-73,35
- Tingkat kemiskinan 7-8 persen.

d. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2024

Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Sumatera Utara dalam rangka pencapaian Visi “Sumatera Utara yang maju dan bermartabat” sebagaimana RPJMD 2019-2023. Tema RKPD Provinsi Sumatera adalah “Sinergitas pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan Sumatera Utara”. Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara diarahkan kepada 4 (empat) prioritas yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan;
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif;
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan;
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif.

Adapun fokus pembangunan dan kegiatan strategis daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 tersebut yaitu:



1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan dicapai melalui:
 - a. Rehabilitasi, Revitalisas dan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Sekolah;
 - b. Implementasi Teaching Factory Link and Match Vokasi dan Penguatan Pendidikan Universal berbasis kerja sama;
 - c. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak “EMAK” (program edukasi perempuan dan anak);
 - d. Pembangunan Titik baca E-Book Digital dan Pengembangan e-Library;
 - e. Pengembangan Sarana dan Prasarana serta pelayanan RS Haji Medan dan Peningkatan Layanan RSJ. Ildrem;
 - f. Penyediaan makanan pendamping ASI (MP ASI) dengan kandungan pangan lokal (PELITA SUMUT/ Penyediaan Makanan Pendamping ASI Balita Sumut;
 - g. Dukungan capaian Universal Health Coverage pada Kabupaten/ Kota melalui Penerima Bantuan Iuran (PBI) Provinsi;
 - h. Peningkatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS);
 - i. Optimalisasi Jangkauan lokasi dan jenis pelayanan Kesehatan “Mobil Kesehatan Bergerak”
 - j. Sukses Penyelenggaraan PON XXI Tahun 2024 dan Peningkatan Prestasi Olahraga melalui gagasan “SUMUT JUARA”
 - k. Sukses Penyelenggaraan Pemilu dan Pilukada yang damai dan berkeadilan dan Edukasi Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Revolusi Mental, Kesadaran Politik dan Nilai-nilai Demokrasi
 - l. Optimalisasi pengembangan Kampung Bersinar (Bersih Narkoba)
 - m. Sumut Tangguh Bencana;
 - n. Pemberdayaan dan Peningkatan Produktivitas Masyarakat Miskin.
2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dicapai melalui:
 - a. Pembangunan North Sumatra Skill Development Center (NS- DC);
 - b. Peningkatan Sarpras Balai Latihan Kerja dan penguatan fasilitasi kerjasama DUDI (Dunia Usaha Dunia Industri);
 - c. Fasilitasi standarisasi dan Peningkatan pendapatan UMKM dan IKM melalui digitalisasi pemasaran;
 - d. Pembangunan Sistem Pertanian Terintegrasi dalam rangka peningkatan produktifitas hasil pertanian dan kesejahteraan petani;
 - e. Pembentukan Petani Muda Milenial (PMM);
 - f. Travel Fair Dalam dan Luar Negeri;
 - g. Peningkatan Digitalisasi Promosi Pariwisata;



- h. Pengembangan Wellness/Healthy Tourism dan Pariwisata Minat Khusus serta Pola Kunjungan Wisata Terintegrasi dan Peningkatan Kualitas Calender of Event;
 - i. Dukungan Pengembangan Unesco Global Geopark Caldera Toba dan Desa Wisata;
 - j. Penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan Roadmap Pengembangan Ekonomi Kreatif;
 - k. Penyelenggaraan North Sumatera Utara Business Forum & Business Matching dan Pameran Agro Industri Nasional.
3. Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dapat dicapai melalui:
- a. Penanganan ruas jalan dan jembatan di Kawasan Strategis Provinsi;
 - b. Peningkatan Kualitas Jaringan Irigasi.
 - c. Pengurangan Luas Kawasan Kumuh dan Banjir Permukiman
 - d. Pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Persampahan Regional Medan-Deli Serdang;
 - e. Pembangunan Waduk/ Embung Idano Mola di Kepulauan Nias;
 - f. Pengembangan SPAM Mebidang dan Seriti;
 - g. Penataan sungai perkotaan yang bersih dan indah;
 - h. Penyediaan sambungan listrik bagi keluarga kurang mampu;
 - i. Pembangunan PLTS terpusat dalam rangka peningkatan produksi pertanian;
 - j. Pembangunan Satu Data Digital Daerah
 - k. Penurunan emisi gas rumah kaca melalui gagasan "SUMUT HIJAU".
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah yang berkualitas dan Inovatif dapat dicapai melalui:
- a. Mempertahankan pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
 - b. Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi melalui Klinik RB;
 - c. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Negara / ASN melalui pemberian Beasiswa S3 dan pelatihan di dalam dan luar negeri;
 - d. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah melalui Planning and Innovation Corner (PIC) dan Publikasi Capaian Pembangunan melalui Event North Sumatra Innovation and Achievement Summit.

Pelaksanaan prioritas pembangunan dan fokus pembangunan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian 7 (tujuh) sasaran Pembangunan



Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 antara lain:

- Indeks pembangunan manusia (IPM) 72,85-73,15
- Pertumbuhan ekonomi dengan target 5,00-5,20 persen,
- Inflasi 3±1
- Tingkat kemiskinan 8,25-8,15 persen.
- Tingkat pengangguran terbuka 6,00-5,75 persen,
- Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 40,04,
- Rasio gini 0,324

e. KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN.

- Prioritas Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2024

Secara umum prioritas program dan kegiatan di tahun 2024 disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahunan RPJMD Tahun 2021- 2026 serta arahan kebijakan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota, evaluasi RKPD 2023 serta isu-isu strategis dan permasalahan yang belum terselesaikan di tahun 2023.

Adapun prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Kota Sibolga di tahun 2024 diarahkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Prioritas kegiatan tahun 2023 yang tertunda karena adanya realokasi anggaran, terutama yang memiliki dampak pengungkit ke perekonomian masyarakat, menjadi prioritas di tahun 2024.
- 2) Mengupayakan agar indikator dalam RPJMD dapat tercapai di tahun 2024.
- 3) Meningkatkan kualitas capaian indikator RPJMD, melalui monitoring dan evaluasi kinerja tahunan.
- 4) Pemulihan ekonomi nasional.
- 5) Meningkatkan sinergi dan integrasi antar program dan kegiatan agar mencapai hasil yang optimal.

Prioritas RKPD untuk tahun Ketiga RPJMD Kota Sibolga tahapan pembangunan diarahkan untuk mengembangkan pembangunan kawasan yang lain dengan tetap melanjutkan tahapan sebelumnya dengan lebih diarahkan pada pengembangan fungsi kawasan, dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumberdaya manusia. Tema RKPD Kota Sibolga Tahun 2024 "Peningkatan Sarana dan Prasarana Perekonomian Melalui Percepatan Pembangunan Ekonomi Berbasis Kota Pariwisata dan Barang/Jasa yang Berwawasan Lingkungan berkelanjutan".



Prioritas pembangunan daerah Kota Sibolga Tahun 2024 diambil dengan memerhatikan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sibolga Tahun 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, tema pembangunan Kota Sibolga Tahun 2024 serta isu-isu strategis Kota Sibolga, sehingga prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sibolga Tahun 2024 dirumuskan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Peningkatan dan Pemenuhan Akses Pendidikan
4. Peningkatan Destinasi Pariwisata
5. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perekonomian
6. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
7. Peningkatan Infrastruktur Dasar

Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sibolga tersebut dijabarkan kedalam fokus melalui upaya-upaya pencapaiannya sebagai berikut :

- Prioritas Daerah 1 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik

Reformasi birokrasi diharapkan dapat diimplementasikan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin baik, efektivitas program/ kegiatan dan efisiensi anggaran. Reformasi birokrasi terhadap manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan dan manajemen sumber daya manusia aparatur diharapkan juga semakin baik yang didukung dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan mendorong pengembangan inovasi daerah.

1. Pelaksanaan Pelayanan publik yang baik
2. Meningkatkan kinerja pemerintah daerah, melalui upaya Peningkatan sumber daya aparatur yang berkarakter
3. Meningkatkan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.

- Prioritas Daerah 2 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

1. Peningkatan mutu Kesehatan melalui pembangunan dan pengembangan rumah sakit
2. Peningkatan pelayanan dengan memenuhi sarana dan prasarana serta alat kesehatan sesuai standar kelas rumah sakit



- Prioritas Daerah 3 Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan
Peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka
- Prioritas Daerah 4 Peningkatan Destinasi Pariwisata
- Penyediaan dan pembangunan destinasi wisata dan objek wisata
- Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata wisata yang memadai
- Menggalakkan usaha di bidang jasa wisata alam dan kuliner yang mendukung daya tarik wisata;
- Prioritas Daerah 5 Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian
- Penataan Sarana Pendukung Pasar Ikan Modern dan Pasar Modern
- Konektivitas Perdagangan antar Pulau & Hinterland
- Melengkapi sarana/ resulasi perhubungan laut peningkatan status pelabuhan samudera untuk Ekspor
- Peningkatan sarana dan prasarana perikanan

Peningkatan Kualitas usaha kecil dan menengah melalui Pengembangan ekonomi kreatif

- Prioritas Daerah 6 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
 1. Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM serta Pengembangan ekonomi kreatif
 2. Peningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;
 3. Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produk perikanan;
 4. Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif
 5. Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat
 6. Peningkatan upaya perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender.
 7. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi.
- Prioritas Daerah 7 Peningkatan Infrastruktur Dasar
 1. Mewujudkan infrastruktur penghubung antar wilayah yang merata dan layak, Peningkatan kualitas perhubungan dalam mendukung aksesibilitas



- pengembangan wilayah, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, transportasi perkotaan dengan mendukung dan fasilitasi Peningkatan jalur Sibolga-Tarutung sebagai akses keluar masuk manusia dan komoditas mendukung pelayanan pelabuhan Sibolga
2. Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di perkotaan dan pedesaan
 3. Mewujudkan sanitasi yang layak melalui peningkatan rumah tinggal bersanitasi, Peningkatan layanan air minum yang layak, Modernisasi irigasi, Peningkatan jaringan irigasi dengan kondisi baik, pengelolaan airtanah dan air baku berkelanjutan
 4. Mewujudkan kualitas lingkungan yang tetap memenuhi baku mutu lingkungan, Pengendalian pencemaran Air, Peningkatan Kualitas Udara, Peningkatan kualitas tutupan lahan, Peningkatan ruang terbuka hijau.
 5. Meminimalkan dampak bencana daerah, meningkatkan penanganan (mitigasi) bencana.
 6. Penataan Transportasi dan Pergudangan dalam Kota Sibolga

Jika disandingkan dengan target-target capaian dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara di tahun 2024 ini, angka capaian yang ditargetkan Pemerintah Kota Sibolga, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.

TABEL 17
PERBANDINGAN TARGET PEMBANGUNAN DAERAH, PROVINSI DAN NASIONAL
TAHUN 2024

Lingkup	Pertumbuhan Ekonomi	IPM	Kemiskinan	TPT	Gini Rasio
Kota Sibolga	5.20	74.94	9.8	7	0.270
Provinsi Sumatera Utara	5,00-5,20	72,85-73,15	8,25-8,15	6,00-5,75	0.324
Nasional	5.5-6.5	75.54	6.0-7.0	3.6-4,3	0.36-0.37

Sumber: RPJMD Kota Sibolga 2021-2026

Pembangunan daerah ditujukan untuk mensukseskan program nasional dan provinsi yang disusun dalam skala prioritas secara berjenjang. Adapun sasaran pembangunan Pemerintah Kota Sibolga yang diselaraskan dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi dapat dilihat sebagai berikut:



TABEL 18
SASARAN PEMBANGUNAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH RKPD KOTA SIBOLGA TAHUN 2024

Sasaran Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2024				Prioritas RKPd Tahun 2024		Prioritas Nasional dan Provinsi yang terkait	
Sasaran	Indikator	Target 2024					
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;	Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (AKIP)	B	P1	1	Meningkatkan kinerja pemerintah daerah	PN 3 (Meningkatkan Sumber daya Manusia berkualitas dan berdaya saing) PN 7 (Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik)
					2	Meningkatkan manajemen pelayanan publik	
					3	Meningkatkan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	
2	Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	WTP	P2			PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Provinsi 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan
		Indeks Kepuasan Masyarakat	77,20				
		Indeks Daya Saing Daerah (IDSG)	0,62				
		Indeks Penilaian Sistem Merit	0,70				
3	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	69,70	P2		Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat	PN 2 : Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Provinsi 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan
		Angka Kematian Ibu	183		1	Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	
		Angka Kematian Bayi	15		2	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	
		Angka Kematian Balita	27		3	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan	
		Pravalensi wasting pada Balita	6%		4	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	



Sasaran Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2024			Target 2024	Prioritas RKPD Tahun 2024	Prioritas Nasional dan Provinsi yang terkait	
Sasaran	Indikator					
		Pravalensi Angka Stunting	8,5%	Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana. 1 Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana.		
		Kualitas Makanan dan Minuman	92%			
		Penanganan penyakit tidak Menular	100%			
		Ketersediaan Alat Kesehatan sesuai Standar	76%			
		Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk	11 (rasio)			
		Puskesmas menjadi BLUD	2			
		Kelurahan Stop BABS	41,2 %			
		Pola Pangan Harapan (PPH)	80%			
	4	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	Rata-rata lama sekolah			10,59
		Harapan Lama Sekolah	14,13			



Sasaran Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2024				Prioritas RKPD Tahun 2024		Prioritas Nasional dan Provinsi yang terkait
Sasaran	Indikator	Target 2024				
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	73,379	P7	1 Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dengan mengutamakan kawasan pusat pertumbuhan	PN 5 (Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar) PN 6 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim) Prioritas Provinsi 3 : Optimalisasi Kualitas Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan
6	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	RPPLH Kota Sibolga	Ada		2 Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	
		Air Minum layak dan Berkelanjutan	84,25%		3 Peningkatan perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan	
		Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	80%		4 Peningkatan mitigasi bencana dan peningkatan pelayanan tanggap darurat bencana	
		Luasan Kumuh	40 Ha			
7	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	67,72	P4	Peningkatan kunjungan pariwisata di Kota Sibolga 1 Peningkatan kunjungan pariwisata di Kota Sibolga 2 Peningkatan event wisata	PN 1 (Memperkuat ketahanan Ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan) Prioritas Provinsi 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif
				P5	Peningkatan Kualitas usaha kecil dan menengah	Prioritas Provinsi 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif



Sasaran Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2024				Prioritas RKPd Tahun 2024	Prioritas Nasional dan Provinsi yang terkait
Sasaran	Indikator	Target 2024			
				1 Pengembangan ekonomi kreatif 2 Optimalisasi pemanfaatan pasar 3 Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	
8	Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Pendapatan Daerah Indeks Pembangunan Gender Indeks Kesetaraan Gender Meningkatkan jumlah Ekonomi Kreatif	108.106.881.827 98,03 75,03 5 unit	P6 1 Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM; 2 Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan; 3 Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk perikanan 4 Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat	Prioritas Provinsi 1 : Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sosial Kemasyarakatan
9	Mempermudah pelayanan Perizinan dan Investasi	Izin yang diterbitkan	750	Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif	Prioritas Provinsi 2 : Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif



- Strategi dan arah kebijakan Prioritas Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2024

Keterkaitan prioritas daerah dengan strategi dan arah kebijakan yang dilakukan

No	Prioritas Daerah	Fokus Pembangunan	Strategi	Arah kebijakan
	Prioritas Daerah 1 Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang baik	Pelaksanaan Pelayanan publik	Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme akuntabel yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi, inovatif, koordinatif, responsif, akan lebih mengedepankan pelayanan prima berbasis sistem informasi pemerintahan elektronik (<i>E-governance</i>).	Peningkatan sumberdaya aparatur yang berkarakter Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparatur
			Melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat.	Peningkatan penggunaan teknologi informasi
		Meningkatkan kinerja pemerintah daerah, melalui upaya Peningkatan sumberdaya aparatur yang berkarakter	Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme serta secara bertahap akan meningkatkan tambahan bagi ASN sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.	Peningkatan manajemen kinerja pemerintah daerah Peningkatan dan pengembangan inovasi daerah
		Meningkatkan kapasitas sumber daya dan partisipasi masyarakat dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan	Melakukan Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan kegiatan investasi yang bertujuan memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.	Peningkatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan; Peningkatan kapasitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik; Peningkatan upaya pengamanan dan penertiban.
	Prioritas Daerah 2 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan mutu Kesehatan melalui pembangunan dan pengembangan rumah sakit	Memberikan/meningkatkan Subsidi/bantuan iuran BPJS bagi keluarga kurang mampu dan mempermudah pengurusan persyaratan administrasi untuk menjadi peserta BPJS.	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak. Peningkatkan fasilitasi dan bantuan perlindungan sosial;



		Peningkatan pelayanan dengan memenuhi sarana dan prasarana serta alat kesehatan sesuai standar kelas rumah sakit	Memberikan penyuluhan kesehatan/pola hidup masyarakat kurang mampu. Dengan sosialisasi tentang makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi dan tidak berpotensi menimbulkan penyakit.	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit
			Meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas kesehatan yang lebih baik	Peningkatan pelayanan dan mengembangkan metode advokasi dan KIE keluarga berencana.
			Menambah petugas armada kebersihan bagian dari memelihara lingkungan yang sehat	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
			Memberikan penyuluhan secara kontinu untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang penting dan bermanfaatnya membuang sampah di tempatnya, dan pengelolaan sampah sebagai sumber ekonomi masyarakat.	Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat
	Prioritas Daerah 3 Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan	Peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan program sekolah penggerak dan implementasi kurikulum merdeka	Menyiapkan Anggaran untuk subsidi wajib belajar 9 tahun bagi keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam pembiayaan sekolah anak mulai dari pakaian, sepatu, alat tulis dan beban dari kewajiban-kewajiban yang lainnya dan memberikan bantuan beasiswa bagi anak yang berprestasi sampai ke tingkat perguruan tinggi;	Memenuhi kebutuhan sarana prasarana pendidikan secara bertahap
			Meningkatkan kesejahteraan guru honor, tenaga kependidikan dan guru berbasis agama;	Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan
			Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang aktivitas publik yang berpotensi merusak generasi bangsa.	Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
				Menertibkan lokasi-lokasi permainan yang mengganggu aktivitas pelajar dengan mengatur jam operasionalnya dan memberikan sanksi bagi yang melanggar
				Melakukan razia secara terus menerus kepada anak-anak, remaja, pelajar yang bermain Game Warnet



				Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang aktivitas publik yang berpotensi merusak generasi bangsa
			Meningkatkan pembinaan pengelolaan perpustakaan.	Meningkatkan sarana dan kapasitas sumber daya manusia perpustakaan.
Prioritas Daerah 4 Peningkatan Destinasi Pariwisata	Penyediaan dan pembangunan destinasi wisata dan objek wisata	Melaksanakan program pembangunan yang proporsional dengan berbasis jumlah penduduk di suatu daerah, sehingga capaian pembangunan yang direncanakan/diinginkan oleh masyarakat dapat terpenuhi		Pengembangan pariwisata berbasis kawasan dan masyarakat
	Penyediaan sarana dan prasarana pariwisata wisata yang memadai	Melaksanakan program perencanaan tata ruang dan pengawasan serta pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung kota dalam rangka mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota perdagangan dan jasa serta pariwisata		Meningkatkan kapasitas pelaku dan sarana prasarana pariwisata
	Menggalakkan usaha di bidang jasa wisata alam dan kuliner yang mendukung daya Tarik wisata	Menggalakkan usaha di bidang jasa wisata alam dan kuliner yang berimplikasi kepada terbukanya peluang pasar bagi produk-produk		Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif
Prioritas Daerah 5 Peningkatan sarana dan prasarana perekonomian	Penataan Sarana Pendukung Pasar Ikan Modern dan Pasar Modern	Pembangunan dan penataan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dengan mengedepankan input perencanaan yang komprehensif		Meningkatkan produktivitas perikanan dan peningkatan diversifikasi pangan
	Peningkatan sarana dan prasarana perikanan	Memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kepada masyarakat agar ikan sebagai bahan baku dapat diolah menjadi produk kuliner, baik sebagai makanan basah maupun makanan kering seperti kerupuk ikan dan sebagainya		Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk perikanan



Prioritas Daerah 6 Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Peningkatan Kualitas usaha kecil dan menengah melalui Pengembangan ekonomi kreatif	Membuka akses pasar dengan mendirikan BUMD Sandang untuk memudahkan pedagang memenuhi kebutuhan dagangan serta menampung penjualan produk-produk UMKM dengan membangun pasar singgah dan menjalin kerjasama dengan pengusaha ritel waralaba seperti: Indomaret, Alfamidi, Transmart dan lain-lain	Peningkatan kelembagaan, permodalan dan pemberdayaan industri;
	Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM serta Pengembangan ekonomi kreatif	Memberikan bantuan modal dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang telah mampu membuka usaha	Peningkatan pemberdayaan usaha industri, perdagangan, koperasi, dan UMKM
	Peningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan	Memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kepada masyarakat agar ikan sebagai bahan baku dapat diolah menjadi produk kuliner, baik sebagai makanan basah maupun makanan kering seperti kerupuk ikan dan sebagainya	Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan
			Peningkatkan pelatihan dan penempatan tenaga kerja
	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produk perikanan	Membuka lapangan kerja dengan mendirikan perusahaan berbasis perikanan dan kelautan dengan melihat potensi wilayah	Peningkatan kontinuitas, kuantitas dan kualitas produk perikanan
	Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif	Menggalakkan usaha di bidang jasa wisata alam dan kuliner yang berimplikasi kepada terbukanya peluang pasar bagi produk-produk	Peningkatan pelayanan dan promosi investasi
	Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat	Memberikan bantuan modal dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang telah mampu membuka usaha	Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif
Peningkatan upaya perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender.	Meningkatnya perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender dengan melibatkan stakeholder terkait	Peningkatan upaya perlindungan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender melalui partisipasi masyarakat dan penguatan kelembagaan masyarakat	



		Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi.	Membuka akses pasar dengan mendirikan BUMD Sandang untuk memudahkan pedagang memenuhi kebutuhan dagangan serta menampung penjualan produk-produk UMKM dengan membangun pasar singgah dan menjalin kerjasama dengan pengusaha ritel waralaba seperti: Indomaret, Alfamidi, Transmart dan lain-lain	Penguatan kelembagaan masyarakat dan fasilitasi kemitraan dengan BUMD dan badan usaha lainnya
Prioritas Daerah 7 Peningkatan Infrastruktur Dasar	Mewujudkan infrastruktur penghubung antar wilayah yang merata dan layak, Peningkatan kualitas perhubungan dalam mendukung aksesibilitas pengembangan wilayah, serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan, transportasi perkotaan dengan mendukung dan fasilitasi Peningkatan jalur Sibolga-Tarutung sebagai akses keluar masuk manusia dan komoditas mendukung pelayanan pelabuhan Sibolga		Melaksanakan program pembangunan yang proporsional dengan berbasis jumlah penduduk di suatu daerah, sehingga capaian pembangunan yang direncanakan/diinginkan oleh masyarakat dapat terpenuhi	Membangun infrastruktur dan sarana prasarana transportasi pada kawasan pusat pertumbuhan
	Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di perkotaan dan pedesaan		Melaksanakan program perencanaan tata ruang dan pengawasan serta pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung kota dalam rangka mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota perdagangan dan jasa	Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan tata ruang dan pertanahan; Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah dengan mengutamakan kawasan pusat pertumbuhan;



		Mewujudkan sanitasi yang layak melalui peningkatan rumah tinggal bersanitasi, Peningkatan layanan air minum yang layak, Modernisasi irigasi, Peningkatan jaringan irigasi dengan kondisi baik, pengelolaan airtanah dan air baku berkelanjutan	Melakukan Penataan Pemukiman dan sarana prasarana. Khusus MCK dengan memberikan bantuan pembangunan toilet septic tank yang layak di masing-masing rumah penduduk secara bertahap.	Peningkatan manajemen dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
		Mewujudkan kualitas lingkungan yang tetap memenuhi baku mutu lingkungan, Pengendalian pencemaran Air, Peningkatan Kualitas Udara, Peningkatan kualitas tutupan lahan, Peningkatan ruang terbuka hijau.	Memperbaiki bangunan drainase jalan dan membangun jalan drainase baru di pemukiman warga sehingga tidak menimbulkan penyakit akibat tidak dapat menampung aliran air dengan baik.	Peningkatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
		Meminimalkan dampak bencana daerah, meningkatkan penanganan (mitigasi) bencana.		Peningkatan peran masyarakat dalam penanganan bencana.

Setelah diketahui arah kebijakan pemerintah daerah Tahun 2024, maka selanjutnya disajikan program pembangunan serta kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai implementasi dari semua perencanaan yang telah dilaksanakan. Kegiatan dan sub kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD merupakan hasil kesepakatan dan analisa kebutuhan.



TABEL 19
Matrik Program Pembangunan Prioritas Kota Sibolga Tahun 2024

Prioritas RKPD	Program Pembangunan	Capaian Target			Kegiatan	Sub Kegiatan	Perangkat Daerah
		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target Capaian 2024			
Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Terlaksananya Penyusunan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	Penataan Organisasi	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Setdakot
						Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Setdakot
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				Administrasi Tata Pemerintahan	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Setdakot
					Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Setdakot
	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase informasi publik pemerintah daerah yang dipublikasikan	Persen	100	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
						Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dinas Kominfo
						Pelayanan Informasi Publik	Dinas Kominfo



						Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Dinas Kominfo
						Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Dinas Kominfo
						Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo
	Program Aplikasi Informatika					Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo
						Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo
						Penyelenggaraan Sistem Penghubung layanan pemerintah	Dinas Kominfo
						Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas	Dinas Kominfo
						Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dinas Kominfo
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral					Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kominfo
	Program Penyelenggaraan					Penyelenggaraan Pelaksanaan Analisis	Dinas Kominfo



	Persandian Untuk Pengamanan Informasi				Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
						Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektornik dan Non Elektronik	Dinas Kominfo
	Program Perekonomian Dan Pembangunan				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Setdakot
						Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Setdakot
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase capaian pengelolaan keuangan daerah	Persen	100	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	BPKPAD
						Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	BPKPAD
						Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	BPKPAD
						Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	BPKPAD
					Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPAD



						Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	BPKPAD	
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	BPKPAD
						Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan	BPKPAD
						Keuangan Daerah	Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	
							Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	BPKPAD
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah					Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah	BPKPAD
							Pengamanan Barang Milik Daerah	BPKPAD
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	BPKPAD
							Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	BPKPAD
							Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	BPKPAD
							Penetapan Wajib Pajak Daerah	BPKPAD
							Penagihan Pajak Daerah	BPKPAD
							Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	BPKPAD



	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian indikator kota terhadap pembangunan	Persen	90	Penyusunan Perencanaan Pendanaan	Analisis Kondisi daerah, permasalahan, dan isu strategis pembangunan Daerah.	Bappeda
						Pelaksanaan Konsultasi Publik	Bappeda
						Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/ lintas SKPD	Bappeda
						Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Bappeda
						Penyiapan bahan koordinasi Musrenbang kecamatan	Bappeda
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks peningkatan kompetensi PNS	indeks	0,65	Pengembangan Kompetensi ASN	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	BKD
						Fasilitasi pengembangan karir dalam jabatan fungsional	BKD
					Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKD
						Evaluasi hasil penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	BKD
						Pembinaan Disiplin ASN	BKD
						Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	BKD
						Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	BKD
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	Persen	14,08	Pengembangan Kompetensi Teknis	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan	BKD



						Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan	
					Sertifikasi Kelembagaan,	Pembinaan, pengoordinasian, fasilitasi,	BKD
					Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengembangan kompetensi teknis umum, inti dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Capaian Kinerja Program Pendaftaran Penduduk	Persen	74,57	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil				Pelayanan Pencatatan Sipil	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Capaian Kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persen	87,14	Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Koordinasi Antarlembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil



						Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Administrasi Kependudukan.	
						Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Pengelolaan Profil Kependudukan				Penyusunan Profil Kependudukan	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Ketenteraman dan ketertiban umum diwilayah kota sibolga	Persen	80	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Satpol PP
						Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan	Satpol PP



						Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
						Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Capaian Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persen	100	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	KesbangPol
						Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	KesbangPol



						Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase cakupan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persen	100	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten Kota	Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan
						Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan
						Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan



					Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Pada Kondisi Kejadian Luar Biasa	Dinas Kesehatan



						(KLB)	
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan
						Pengelolaan Jaminan	Dinas



						Kesehatan Masyarakat	Kesehatan
						Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
						Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan
						Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Dinas Kesehatan
						Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan
						Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan
						Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Dinas Kesehatan
						Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan	Persentase pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM)	Persen	100	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan
					Pelaksanaan Sehat dalam Rangka	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup	Dinas Kesehatan



					Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Bersih dan Sehat	
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan
	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase Sumber daya manusia kesehatan yang ditingkatkan kapasitasnya	Persen	100	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
						Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Dinas Kesehatan
						Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
					Pengembangan	Pengembangan Mutu	Dinas



					Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan dan minuman	Persentase makanan dan minuman yang memenuhi syarat	Persen	100	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan
					Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan
					Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dinas Kesehatan
					Pemeriksaan dan	Pemeriksaan Post	Dinas



					Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kesehatan
	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase Cakupan dalam Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat.	Persen	100	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	RSU
						Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	RSU
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase capaian pengendalian penduduk	Persen	100	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pengendalian Kuantitas Penduduk	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Dinas PPKB
						Penyusunan dan Pemamfatan Grand Desigen Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas PPKB
						Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dinas PPKB
						Pelaksanaan	Dinas PPKB



						Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	
						Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Dinas PPKB
						Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non Formal	Dinas PPKB
						Penyediaan dan Pengembangan Materi	Dinas PPKB
						Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	
						Advokasi, Sosialisasi dan fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Dinas PPKB
						Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Dinas PPKB
					Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Perumusan Parameter Kependudukan	Dinas PPKB
						Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi	Dinas PPKB



						Program KKBPK di Sektor Lain	
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Dinas PPKB
						Pemanfaatan Data Hasil Pemutahiran Data Keluarga	Dinas PPKB
						Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Dinas PPKB
						Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Dinas PPKB
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase capaian peserta KB Baru dan peserta KB Aktif	Persen	100	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Dinas PPKB
						Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Dinas PPKB
					sesuai kearifan budaya lokal	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dinas PPKB
						Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rekordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Dinas PPKB
						Pengelolaan Operasional Dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Dinas PPKB



						Pengendalian operasional KKBPK	Dinas PPKB
					Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Dinas PPKB
						Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Dinas PPKB
						Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Dinas PPKB
					Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas PPKB
						Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dinas PPKB
						Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Dinas PPKB
						Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Dinas PPKB
						Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta	Dinas PPKB



						KB	
						Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dinas PPKB
						Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Dinas PPKB
						Peningkatan Kesertaan KB Pria	Dinas PPKB
					Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dinas PPKB
						Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Dinas PPKB
						Pembinaan Terpadu Kampung KB	Dinas PPKB
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dinas PPKB



						Pengadaan Sarana Kelompok Ketahanan Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB
						Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB
						Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Dinas PPKB
						Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, BKR,	Dinas PPKB



						PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
						Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Dinas PPKB
						Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Dinas PPKB
						Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK	Dinas PPKB
						Advokasi dan Promosi IPK	Dinas PPKB
						Sosialisasi IPK	Dinas PPKB
						Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Dinas PPKB
						Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Dinas PPKB
					Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan	Dinas PPKB



					Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
						Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Masyarakat dalam Penggerakan Operasional Pembinaan	Dinas PPKB
						Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Capaian program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persen	7	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal	Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian
						Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dinas Perikanan, Ketahanan pangan dan Pertanian
Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan pembinaan anak Paud dan pendidikan Dasar	Persen	100	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penambahan Ruang Kelas Baru	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



						Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Mebel Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengadaan Perlengkapan Siswa	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS SMP	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Non Formal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



						PAUD	
	Program Pengembangan Kurikulum				Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Cakupan pembinaan, pelayanan dan pelatihan PTK PAUD dan Pendidikan dasar	Persen	100	Pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan dasar, PAUD dan pendidikan Non Formal Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan PTK Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



						Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pembinaan Perpustakaan				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Dinas Perpustakaan
						Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Perpustakaan
					Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Dinas Perpustakaan
						Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Dinas Perpustakaan
Peningkatan destinasi pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah daya tarik destinasi wisata yang dikembangkan	Buah	10	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Parpora
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Parpora
						Penerapan Destinasi	Dinas Parpora



						Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
					Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	
						Kesediaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	
	Program Pemasaran Pariwisata				Pemasaran Pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis Pariwisata/Kota	Penyedia Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dinas Parpora
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Parpora



	Program Pengembangan Sumber daya Pariwisata dan Ekonomi kreatif				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Dinas Parpora
						Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Dinas Parpora
						Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Parpora
					Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Dinas Parpora
						Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Dinas Parpora
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Capaian Rencana Induk Kelitbangan, SIDA dan Perhitungan Indeks Kelitbangan	Persen	100	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Bappeda
					Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Bappeda
Peningkatan Sarana dan Prasarana perekonomian	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase Komoditi/Produk yang sesuai dengan Ketentuan yang berlaku		100	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi,	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya	Dinas Perindag



					Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	(PA-B2) Maupun Produsen B2 (P-B2)	
	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan	Cakupan Bina kelompok pedagang/usaha informal	Persen	17,07	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindag
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	Pemantuan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persen	100	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/kota	Dinas Perindag
						Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Dinas Perindag
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Ditera/tera Ulang	Persen	100	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa, Tera, Tera Ulang	Dinas Perindag
						Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	Dinas Perindag
						Penyidikan Metrologi Legal	Dinas Perindag
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Jumlah Promosi, Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri	UMKM	68	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Dinas Perindag



	Program perencanaan dan pembangunan industri	Cakupan bina kelompok IKM/Pengrajin	Persen	60	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Dinas Perindag
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dinas Perindag
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dinas Perindag
						Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dinas Perindag
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan pelaksanaan Konsultasi Produktivitas	Perusahaan	100	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
	Program Hubungan Industrial	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persen	80	Pengesahaan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pengesahaan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
						Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
						Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana	Dinas Koperasi, UKM dan



						Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Tenaga Kerja
	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Capaian pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro	Persen	100	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan,	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
					Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan		
						Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
						Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
						Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Inflasi, Potensi Investasi, Jumlah Penduduk, Kebijakan Daerah, Potensi Daerah			Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif dibidang penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai pemberian Fasilitas/ Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Dinas PMPPTSP
					Pembuatan Peta	Penyusunan Rencana	Dinas



					Potensi Investasi Kabupaten Kota	Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	PMPPTSP
						Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Dinas PMPPTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Kebijakan Daerah, Produk dan Potensi Daerah			Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Dinas PMPPTSP
						Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PMPPTSP
	Program pelayanan penanaman modal	Sop, indeks kepuasan pelayanan, kebijakan daerah			Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas PMPPTSP
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Persen		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Setdakot
Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran Tenaga Kerja yang Mendapatkan pelatihan berbasis Kompetensi	Persen	75	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi	Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Besaran Pencari Kerja yang Terdaftar yang ditempatkan	Persen	70	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten / Kota	Pelayanan antar kerja	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja



						Perluasan Kesempatan Kerja	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
					Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
					Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja
	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persentase capaian Program Perlindungan dan jaminan Sosial	Persen	80	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase capaian program pemberdayaan sosial	Persen	80	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
						Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Capaian program Rehabilitasi sosial	Persen	80	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	Penyediaan Permakanan	Dinas Sosial



					serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	
						Penyediaan Sandang Dinas Sosial
						Penyediaan Alat Bantu Dinas Sosial
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi keluarga Dinas Sosial
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Dinas Sosial
						Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Dinas Sosial
						Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Dinas Sosial
						Pemberian Layanan Kedaruratan Dinas Sosial
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga Dinas Sosial
						Pemberian Layanan Rujukan Dinas Sosial
					Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Dinas Sosial
						Pemberian Layanan Kedaruratan Dinas Sosial
						Penyediaan Permakanan Dinas Sosial
						Penyediaan Sandang Dinas Sosial



						Penyediaan Alat Bantu	Dinas Sosial
						Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Dinas Sosial
						Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Dinas Sosial
						Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Dinas Sosial
						Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Dinas Sosial
						Pemberian Layanan Rujukan	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase capaian program perlindungan dan jaminan sosial	Persen	80	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial
						Rujukan Anak-Anak Terlantar	Dinas Sosial
					Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
						Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Sosial
						Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Persentase capaian program penanganan bencana	Persen	80	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	Dinas Sosial
						Penyediaan Sandang	Dinas Sosial
						Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Dinas Sosial



						Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Dinas Sosial
						Pelayanan Dukungan Psikososial	Dinas Sosial
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Capaian Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Adat dan Hukum Adat			Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kab/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas PMK,PP,PA
						Fasilitasi Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Dinas PMK,PP,PA
						Fasilitasi Tim Penggerak PKK Dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dinas PMK,PP,PA
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase Capaian Kinerja Urusan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Dinas PMK,PP,PA



					Kewenangan Kabupaten/Kota		
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase Capaian Kinerja Perlindungan Perempuan			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMK,PP,PA
					Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		
					Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMK,PP,PA
	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Capaian Kinerja Perlindungan Khusus Anak			Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dinas PMK,PP,PA
					Penyediaan Layanan Bagi Anak yang Memerlukan	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat Bagi Anak yang Memerlukan	Dinas PMK,PP,PA
					Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
Peningkatan infrastruktur dasar	Program Pengelolaan sumber Daya air (SDA)	Persentase rumah tangga yang terlayani air minum layak, perkotaan dan	Persen	87,00	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Dinas PUPR



		perdesaan			Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Persen	92,03	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Rumah Tangga ber Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Persen	80	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Dinas PUPR
						Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Dinas PUPR
	Program Pengelolaan dan Pengembangan sistem Drainase				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas PUPR
						Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Dinas PUPR
						Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dinas PUPR
	Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Jalan Kota Dalam Kondisi Mantap	Persen	89	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Pembangunan Jalan	Dinas PUPR
						Rehabilitasi Jembatan	Dinas PUPR
						Rehabilitasi Jalan	Dinas PUPR
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW	Dinas PUPR



					Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota	
						Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Dinas PUPR
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Dinas PUPR
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Akibat Bencana Alam / Sosial yang tertangani	Persen	100	Pendataan Penyediaan dan rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dinas PKPLH
					Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Dinas PKPLH
	Program Kawasan Permukiman	Persentase rumah tidak layak huni di kawasan kumuh yang tertangani	Persen	100	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Dinas PKPLH
					Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Dinas PKPLH
					Peningkatan Kualitas	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan	Dinas PKPLH



					Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	
						Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas PKPLH
	Program peningkatan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU sesuai kewenangan	Persen	100	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Dinas PKPLH
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Persen	100	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Dinas PKPLH
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Proporsi RTH publik untuk pengelolaan keanekaragaman hayati	Persen	100	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Dinas PKPLH
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Ketaatannya terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH, dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Persen	100	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dinas PKPLH
	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Sampah yang terkelola di Kota	Persen	100	Pengelolaan Sampah	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah	Dinas PKPLH



		Sibolga				Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	
						Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Dinas PKPLH
	Program penanggulangan bencana	Persentase peningkatan pengurangan risiko bencana	Persen	100	Pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	BPBD
						Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	BPBD
					Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	BPBD
						Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	BPBD
						Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	BPBD
						Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD
						Pengelolaan risiko bencana	BPBD



						Kabupaten/Kota	
						Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	BPBD
						Pengembangan kapasitas tim reaksi cepat (trc) bencana Kabupaten/Kota	BPBD
						Penyusunan rencana kontijensi	BPBD
						Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	BPBD
						Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	BPBD
						Pelatihan keluarga tanggap bencana alam	BPBD
					Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Respon cepat kejadian luar biasa penyakit /wabah zoonosis prioritas	BPBD
						Respon cepat darurat bencana kabupaten/kota	BPBD
						Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	BPBD
						Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota	BPBD
						Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	BPBD
					Penataan siste dasar penanggulangan bencana	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	BPBD
						Penguatan kelembagaan bencana kabupaten/kota	BPBD



						Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	BPBD
						Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	BPBD
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Cakupan Pelayanan Transportasi Yang Layak	Persen	100	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan kabupaten/ Kota	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan
						Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Dinas Perhubungan
					Pengelolaan Terminal Penumpang Type C	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Dinas Perhubungan
					Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dinas Perhubungan
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan



						Registrasi kendaraan wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/ Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan
						Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan
					Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Dinas Perhubungan
						Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ	Dinas Perhubungan
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota Dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan
					Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran				Pembangunan dan Penerbitan izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Dinas Perhubungan



1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pemenuhan layanan dasar (Standar Pelayanan Minimal) Penerapan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara meliputi 6 (enam) bidang layanan dasar SPM:

1. Pendidikan,
2. Kesehatan,
3. Pekerjaan umum dan Penataan Ruang,
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman,
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan Sosial.

Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dan hal ini sesuai dengan pasal 18 ayat (6) amandemen UUD 1945 yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya. Peraturan terakhir yang mengatur tentang pembagian urusan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang merupakan pengganti Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu dari enam urusan concurrent (bersama) yang bersifat wajib dan terkait dengan pelayanan dasar adalah Urusan Pendidikan, Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Urusan Sosial.

DASAR HUKUM STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); dan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan daerah kabupaten/kota
- b. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 menjadi Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019. Perubahan aturan menimbulkan perubahan konsep. Peraturan Menteri Kesehatan No. 43 Tahun 2016 memiliki konsep mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal,



- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- d. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 memiliki konsep bahwa SPM merupakan target indikator kinerja Pemerintahan daerah (Kepala daerah) bukan lagi kesehatan atau Kementerian.
- e. Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2019 di Pemerintah Kota Sibolga telah diterapkan pada Tahun 2020.
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- g. Permendagri nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang diundangkan pada tanggal 24 Desember 2021 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa peraturan menteri dalam negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan penerapan standar pelayanan minimal sehingga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

Kebijakan Umum Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kota Sibolga melakukan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja RPJMD dengan efektif dan efisien selama 5 (lima) tahun kedepan. Arsitektur perencanaan pembangunan daerah dipisahkan menjadi dua yakni Perencanaan Strategis yaitu perencanaan pembangunan daerah yang menekankan pada pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, dan Perencanaan Operasional yaitu perencanaan yang menekankan pada pencapaian kinerja layanan pada tiap urusan. Perencanaan Strategis dimaksudkan untuk menerjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam rencana kerja Kota Sibolga, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD maka dianggap strategis. Sedangkan perencanaan operasional dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing – masing misi berdasarkan pendekatan urusan wajib maupun urusan pilihan. tujuan dan



sasaran pembangunan RPJMD yang dituangkan secara lebih rinci kedalam masing – masing Urusan Pelayanan Dasar. Rumusan strategi dan Arah Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Kota Sibolga adalah sebagai berikut :

URUSAN PENDIDIKAN

- a. Pendidikan Anak Usia Dini :
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
- b. Pendidikan Dasar;
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
- c. Pendidikan Kesetaraan.
Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

URUSAN KESEHATAN

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- d. Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
- f. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif
- g. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- h. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
- i. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
- j. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat
- k. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Penyediaan jalan untuk melayani kebutuhan masyarakat
- b. Penyediaan air minum
- c. Penyediaan sanitasi



URUSAN PERUMAHAN

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota

URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN

- a. Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- c. layanan informasi rawan bencana
- d. layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- e. layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

URUSAN SOSIAL

- a. Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b. Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c. Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d. Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota.



BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berdasarkan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, maka Sibolga memiliki 26 Organisasi Perangkat Daerah, 4 kecamatan dan 17 kelurahan. Organisasi perangkat daerah, kecamatan dan kelurahan yang menjadi pelaksana teknis dilapangan untuk merealisasikan pelaksanaan progam dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun, Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja OPD dan Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1 Capaian Kinerja Makro

Kondisi perekonomian Kota Sibolga tidak terlepas dari pengaruh dan kondisi perekonomian nasional yang tengah berkembang, walaupun secara riil kondisi tersebut tidak secara spesifik memiliki dimensi dan menggambarkan aktifitas yang sama mempengaruhi, akan tetapi persoalan-persoalan krusial pada tingkat nasional sangat berpengaruh terhadap kondisi di daerah.



Capaian Kinerja Makro Menggunakan Indikator Kinerja Makro Sebagai Berikut:

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2020	Capaian Kinerja Tahun 2021	Capaian Kinerja Tahun 2022	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Perubahan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Indeks Pembangunan Manusia	73,63	73,94	76,69	77,07	77,52	0.584
2	Angka Kemiskinan	10,49	10,80	10,05	10,02	9,99	-0.299
3	Angka Pengangguran	8,0	8,72	7,05	6,79	6,52	-3.976
4	Pertumbuhan Ekonomi	-1,36	2,10	4,15	4,20	3,92	-6.667
5	Pendapatan Per Kapita	62.57	64,45	69,83	74,74	78,49	5.017
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0,29	0,28	0,346	0,246	0,377	53,252

Sumber data dari BPS Sibolga Tahun 2025, untuk Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) data diolah dari Bappeda Kota Sibolga

1. Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor– sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
2. PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.
3. PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang



sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

4. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya.
5. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu dan Pengeluaran Konsumsi Kolektif. Barang dan jasa individu merupakan barang dan jasa privat, dimana ciri-ciri barang privat adalah a) Scarcity, yaitu ada kelangkaan/keterbatasan dalam jumlah; b) Excludable consumption, yaitu konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga); c) Rivalrous competition, yaitu konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa individu adalah jasa pelayanan kesehatan pemerintah di rumah sakit/puskesmas dan jasa pendidikan di sekolah/universitas negeri. Sedangkan barang dan jasa kolektif ekuivalen dengan barang publik yang memiliki ciri a) Non rivalry, yaitu penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut; b) Non excludable, yaitu apabila suatu barang publik tersedia, maka tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut atau dengan kata lain setiap orang memiliki akses ke barang tersebut. Contoh barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah dan tergolong sebagai barang dan jasa kolektif adalah jasa pertahanan yang dilakukan TNI dan keamanan yang dilakukan kepolisian.
6. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencakup pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang modal. Barang modal dimaksud adalah barang-barang yang digunakan untuk proses produksi, tahan lama atau yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun seperti bangunan, mesin-mesin dan alat angkutan. Termasuk pula di sini perbaikan besar (berat) yang sifatnya memperpanjang umur atau mengubah



bentuk atau kapasitas barang modal tersebut. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer juga dicakup sebagai PMTB. Klasifikasi komponen PMTB dibagi menjadi 6 sub komponen yaitu Konstruksi; Mesin dan Peralatan; Kendaraan; Peralatan Lainnya; Cultivated Biological Resources (CBR) dan Produk Kekayaan Intelektual.

7. Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi perdagangan barang dan jasa dari penduduk (residen) ke bukan penduduk (nonresiden). Impor barang dan jasa adalah transaksi perdagangan dari bukan penduduk ke penduduk. Ekspor atau impor barang terjadi pada saat terjadi perubahan hak kepemilikan barang antara penduduk dengan bukan penduduk (dengan atau tanpa perpindahan fisik barang tersebut). Pada PDB dengan tahun dasar 2010, ekspor dan impor barang dirinci menjadi nonmigas dan migas.
8. Produk Domestik Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar "harga berlaku" dan atas dasar "harga konstan". Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu, dalam publikasi ini digunakan harga tahun 2010.
9. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto diperoleh dari perhitungan PDB atas dasar harga konstan. Diperoleh dengan cara mengurangi nilai PDB pada tahun ke- n terhadap nilai pada tahun ke $n-1$ (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke $n-1$, dikalikan dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Sibolga Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2024 adalah sebesar 7.201,60 miliar rupiah. Sedangkan angka PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) adalah sebesar 4.055,30 miliar rupiah.

Lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor masih menjadi lapangan usaha penyumbang PDRB terbesar di Kota Sibolga pada tahun 2024. Lapangan usaha ini memberi kontribusi sebesar 27,75 persen terhadap PDRB ADHB. Sedangkan lapangan usaha pertambangan dan penggalian menjadi penyumbang terkecil PDRB dengan kontribusi sebesar 0,00 persen.

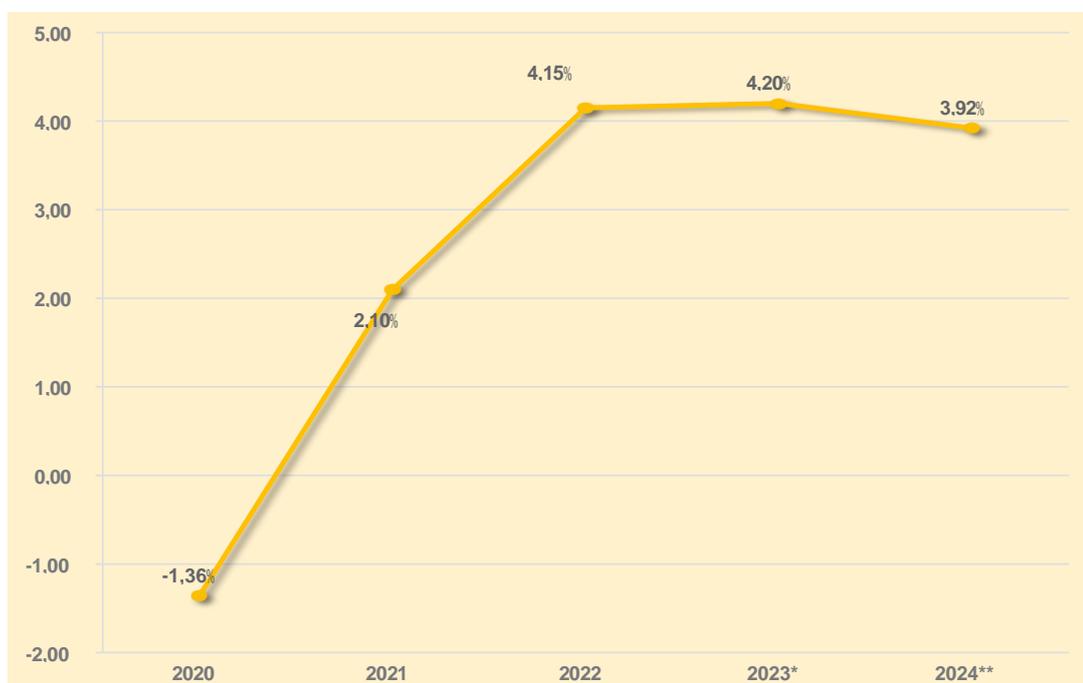
Jika dilihat dari sisi pengeluaran, komponen penyumbang terbesar terhadap PDRB tahun 2024 adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 60,76



persen. sedangkan komponen pengeluaran perubahan inventori menjadi penyumbang terkecil PDRB pengeluaran dengan kontribusi sebesar 1,38 persen.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sibolga mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu, dari 4,20 persen pada tahun 2023 menjadi 3,92 persen di tahun 2024.

Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga, 2020-2024 Sibolga
Municipality Economic Growth, 2020-2024



Catatan/Note : *) Angka Sementara/Preliminary Figures

**) Angka Sangat Sementara/Very Preliminary Figures

Sumber/Source : Diolah dari Hasil Sensus, Survei, dan Berbagai Sumber Lainnya, BPS Kota Sibolga/ Based on Census, Surveys, and Other Sources, Statistics of Sibolga Municipality



TABEL 20
PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2018-2024

No.	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1 067,80	1 119,82	1 130,47	1 096,49	1 179,67	1.257,24	1.280,41
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,12	0,13	0,13	0,13	0,14	0,15	0,15
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	232,71	252,78	260,46	288,55	321,18	338,60	364,13
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,79	5,23	5,47	5,71	6,07	6,30	6,41
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	14,85	16,07	16,54	16,61	17,46	18,12	19,19
F	Konstruksi/Construction	643,55	699,85	676,48	713,60	772,00	829,96	861,47
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	1235,61	1 410,57	1 452,13	1 539,08	1 727,09	1.871,86	1.998,33
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	454,68	498,89	488,46	519,42	589,45	660,45	716,52
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	256,88	279,14	278,37	280,22	310,19	334,98	359,79
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	57,29	63,85	69,22	75,39	81,70	85,38	86,48
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	128,18	134,58	136,70	150,26	168,62	181,92	191,66
L	Real Estat/Real Estate Activities	240,34	264,23	278,76	288,18	306,42	318,70	327,21
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	26,86	30,38	31,16	31,73	36,67	39,54	41,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	410,16	438,32	453,54	452,07	457,65	482,29	527,07
P	Jasa Pendidikan/Education	207,63	228,17	235,98	246,62	265,24	279,92	294,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	64,66	70,86	72,96	72,81	79,12	91,98	100,60
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	17,82	18,67	18,62	19,24	21,70	23,42	25,31
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Domestic Regional Product		4 644,67	5 063,94	5 531,54	5 531,54	5 796,11	6.820,80	7.201,60

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga Tahun 2025



TABEL 21
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha (milyar Rupiah), 2018-2024

No.	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	698,68	703,88	701,55	677,60	690,93	706,56	725,19
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	154,03	159,54	156,02	166,99	173,82	180,50	187,76
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,22	4,44	4,66	4,84	5,03	5,14	5,23
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	10,66	11,34	11,59	11,50	11,98	12,26	12,51
F	Konstruksi/Construction	398,68	422,80	395,76	406,92	414,97	431,27	443,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	878,89	945,69	937,21	983,13	1 038,77	1.093,74	1.145,55
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	304,48	325,76	307,58	318,66	341,79	364,76	383,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	167,65	180,46	179,16	180,15	196,12	208,05	219,42
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	52,20	54,36	58,09	62,63	65,94	67,87	68,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	82,35	85,42	87,14	92,27	96,65	101,16	106,32
L	Real Estat/Real Estate Activities	153,76	163,59	167,57	169,16	174,40	178,61	182,40
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	18,77	19,76	19,42	19,41	21,13	21,97	22,94
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	253,46	264,80	264,16	263,54	263,20	269,76	280,47
P	Jasa Pendidikan/Education	159,50	168,77	172,94	180,33	188,55	195,80	203,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	43,86	46,56	46,23	45,58	47,77	50,36	52,61
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	12,63	13,04	12,53	12,89	13,94	14,50	15,11
	Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	3 393,91	3 570,33	3 521,72	3 595,70	3 745,07	3.902,42	4.055,30

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga Tahun 2025



TABEL 22
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2018-2024

No.	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	21,09	20,24	20,17	18,92	18,61	18,43	17,78
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,60	4,57	4,65	4,98	5,07	4,96	5,06
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09	0,09
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,29	0,29	0,30	0,29	0,28	0,27	0,27
F	Konstruksi/Construction	12,71	12,65	12,07	12,31	12,18	12,17	11,96
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	24,40	25,50	25,91	26,55	27,24	27,44	27,75
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	8,98	9,02	8,71	8,96	9,30	9,68	9,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	5,07	5,05	4,97	4,83	4,89	4,91	5,00
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	1,13	1,15	1,23	1,30	1,29	1,25	1,20
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	2,53	2,43	2,44	2,59	2,66	2,67	2,66
L	Real Estat/Real Estate Activities	4,75	4,78	4,97	4,97	4,83	4,67	4,54
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,53	0,55	0,56	0,55	0,58	0,58	0,58
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	8,10	7,92	8,09	7,80	7,22	7,07	7,32
P	Jasa Pendidikan/Education	4,10	4,12	4,21	4,25	4,18	4,10	4,10
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,28	1,28	1,30	1,26	1,25	1,35	1,40
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,34	0,35
	Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	100	100	100	100	100	100	100,00

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga Tahun 2025



TABEL 23
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut LapanganUsaha (persen), 2018-2024

No.	Lapangan Usaha/Industry	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	3,49	0,74	-0,33	-3,41	1,97	2.26	2,64
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	3,02	3,96	-0,93	1,32	1,46	1.77	2,44
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	3,64	3,57	-2,21	7,03	4,09	3.84	4,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	4,71	5,32	4,95	3,68	3,94	2.37	1,58
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4,54	6,30	2,26	-0,76	4,17	2.34	2,04
F	Konstruksi/Construction	5,89	6,05	-6,40	2,82	1,98	3.93	2,92
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	6,76	7,60	-0,90	4,90	5,66	5.29	4,74
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	6,65	6,99	-5,58	3,60	7,26	6.72	5,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food Service Activities	6,64	7,65	-0,72	0,55	8,86	6.08	5,19
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	4,19	4,13	6,87	7,82	5,28	2.93	0,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	1,91	3,73	2,02	5,89	4,74	4.68	5,09
L	Real Estat/Real Estate Activities	5,45	6,39	2,43	0,95	3,10	2.41	2,12
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	5,44	5,29	-1,73	-0,03	8,86	3.97	4,38
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	3,41	4,47	-0,24	-0,23	-0,13	2.49	3,97
P	Jasa Pendidikan/Education	5,98	5,81	2,47	4,27	4,56	3.84	4,00
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	5,18	6,17	-0,72	-1,40	4,81	5.41	4,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	2,63	3,24	-3,92	2,89	8,09	4.07	4,22
	Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product	5,25	5,20	-1,36	2,10	4,15	4.20	3,92

Sumber Data dari Kantor BPS Kota Sibolga Tahun 2025



2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Sibolga menetapkan program sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dikelompokkan ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga. Sesuai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, RKPD Kota Sibolga merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan pada tingkat daerah/kota. Pada tingkat daerah acuan utama perencanaan pembangunan tertuang dalam RPJPD Kota Sibolga yang merupakan program pembangunan secara makro untuk rentang waktu 20 tahun. Selanjutnya RPJPD Kota Sibolga dijabarkan dalam RPJMD Kota Sibolga untuk rentang waktu 5 tahunan. Baik RPJPD dan RPJMD Kota Sibolga mengacu dan mempedomani RPJPD Provinsi, RPJM Provinsi dan RPJP dan RPJM Nasional.

2.2.1 INDIKATOR KINERJA KUNCI HASIL

Urusan Pemerintahan		Indikator Kinerja Kunci Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Ket .
(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
- Pendidikan					
1.a.1	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan	68,913%	Pembilang dari Dinas Pendidikan dan Penyebut dari Disdukcatpil	
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	96,059%	Pembilang dari Dinas Pendidikan dan Penyebut dari Disdukcatpil	
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	76,999%	Pembilang dari Dinas Pendidikan dan Penyebut dari Disdukcatpil	
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar Jumlah anak usia 7-18 tahun pada Kabupaten /Kota	100%	Sumber data dari Dinas Pendidikan	



- Kesehatan					
1.b.1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit seluruh Kabupaten/ Kota	4,198%	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan RSUD FL Tobing, penyebut dari Disdukcapil	
		Jumlah penduduk Kabupaten/ Kota			
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah rumah sakit yang terakreditasi	100%	Dinas Kesehatan	
		Jumlah rumah sakit Kabupaten/ Kota			
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan	89,29%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
		Jumlah ibu hamil di Kabupaten/ Kota			
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	98,46%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
		Jumlah ibu bersalin Kabupaten/ Kota			
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	98,96%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
		Jumlah bayi baru lahir di Kabupaten/ Kota			
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100 %	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil	
		Jumlah balita di Kabupaten/ Kota			
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100%	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil	
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten/ Kota			
1.b.8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	88,36%	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil	
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten/ Kota			
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	0,09%	Pembilang dari Dinas Kesehatan dan penyebut dari Disdukcapil	
		Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas Kabupaten/ Kota			
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	91,14%	Sumber data dari Dinas Kesehatan	
		Jumlah penderita hipertensi di Kabupaten/ Kota			
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	26,66%	Sumber data dari Dinas Kesehatan	
		Jumlah penderita DM di Kabupaten/ Kota			
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	98,43%	Sumber data dari Dinas Kesehatan	
		Jumlah ODGJ di Kabupaten/ Kota			
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	14,327%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
		Jumlah penderita TBC di Kabupaten/ Kota			
1.b.14	Persentase orang dengan resiko Terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	91,304%	Pembilang dan penyebut dari Dinas Kesehatan	
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten/ Kota			



- Pekerjaan Umum					
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir WS Kewenangan Kabupaten/ Kota (ha) Luas Kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/ Kota (ha)	0%	Memakai Surat dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten/ kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kota (m) Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota	0%	Sumber data dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), di tingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan dipelihara (ha) Luas daerah irigasi kewenangan kota	0%	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga, bahwa Kota Sibolga Tidak memiliki daerah irigasi	
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kota Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kota	100%	Sumber Data dari dinas PUPR Kota Sibolga	
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Jumlah rumah dikota	40,47%	Pembilang dari Dinas PU dan PR dan penyebut dari PDAM	
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya Jumlah IMB yang berlaku	100%	Sumber data dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga	
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan kewenangan Kota yang mantap (km) Panjang jalan keseluruhan diwilayah Kabupaten/ Kota (km)	64,15%	Sumber data dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga dan P2JN Provinsi Sumatera Utara	
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih diwilayah kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis Jumlah kebutuhan tenaga kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis diwilayah kota	0%	Memakai surat keterangan dari Dinas PU dan PR Kota Sibolga, bahwa tidak jumlah tenaga operator/teknisi/analisis yang bersertifikat kompetensi	
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	100%	Sumber data dari Dinas PU dan PR, bahwa seluruh kewenangan pengawasan konstruksi tidak	



				terjadi adanya kecelakaan	
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.d.1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	0%	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH Kota Sibolga	
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan	0%	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH	
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	0%	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PKPLH	
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	2,295%	Penyebut dari Dinas PKPLH dan pembilang berasal dari Dinas PUPR	
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU Jumlah unit rumah kab/kota	0%	Sumber data dari Dinas PKPLH	
- Ketertarikan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah Pengaduan yang ditangani Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk	100%	Sumber data dari Dinas Satpol PP	
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi	54,54%	Sumber data dari Dinas Satpol PP	
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi Rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sesuai target yang ditetapkan	100%	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga	
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga Kabupaten/ Kota yang berada di lokasi rawan bencana	4,35%	Pembilang dan Penyebut dari BPBD Kota Sibolga	
1.e.5	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga yang terkena korban bencana	100%	Sumber data dari Satpol PP Kota Sibolga	
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di Kabupaten/ Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran + Jumlah layanan pemadaman di Kabupaten/ Kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang	100%	Pembilang dan Penyebut dari Satpol PP	



		dibentuk dan atau dibawah pembinaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran			
		Jumlah Kejadian kebakaran di Kabupaten/ Kota			
1.e.7	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran		8,07 menit	Data diolah oleh Satpol PP, berada dibawah SOP dari Permendagri No. 114 Tahun 2018	
- Sosial					
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar ,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indicator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	57,89%	Sumber data dari Dinas Sosial	
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis			
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu anggaran	100 %	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Sosial	
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kota			
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
- Tenaga Kerja					
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu kerencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu RTKD	27,27%	Pembilang dan Penyebut dari Dina Koperasi, UKM dan Ketenaga kerjaan	
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota			
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	0 %	Pembilang Memakai Surat Keterangan dari Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan penyebut berasal dari BPS	
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan			
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	8,508%	Pembilang dari BPS dan Penyebut dari Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah tenaga kerja			
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tatakelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenaga kerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	15,862	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperasi dan Ketenaga kerjaan	
		Jumlah perusahaan			
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencari kerja (penceker) yang ditempatkan	34,090%	Pembilang dan penyebut berasal dari Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan	
		Jumlah pencari kerja (penceker) yang terdaftar			
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD		Sumber data dari BPKPAD/RKA	
		Jumlah seluruh anggaran belanja			



		langsung di Kabupaten/ Kota			
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten/ Kota yang didampingi Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	100 %	Data Simponi Kementerian PPA Tahun 2024, Sumber data dari Dinas PMK, PP dan PA dan Penyebut dari Disdukcatpil	
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan Jumlah penduduk perempuan di Kabupaten/ Kota	11,527%	Pembilang dari Dinas PMK, PP dan PA dan Penyebut dari Dinas Kependudukan dan Catpil	
- Pangan					
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan Kabupaten/ Kota Jumlah kebutuhan pangan Kabupaten/ Kota	0%	Memakai surat keterangan dari Dinas PKPP.	
- Pertanian					
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi	0 %	Memakai surat keterangan dari Dinas PU dan PR	
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0 %	Memakai surat keterangan dari Dinas PU dan PR	
2.i.3	Persentase lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya diatas izin lokasi Luas izin lokasi yang diterbitkan	0 %	Memakai surat keterangan dari Dinas PU dan PR	
2.i.4	Persentase Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha Jumlah tanah penerima tanah obyek landreform	0 %	Memakai surat keterangan dari Dinas PU dan PR	
2.i.5	Persentase ketersediaan tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah Luas izin membukan tanah yang diterbitkan	0 %	Memakai surat keterangan dari Dinas PU dan PR	
2.i.6	Persentase penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan	0 %	Memakai surat keterangan dari Dinas PU dan PR	
- Lingkungan Hidup					
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/ Kota	IKLH Kab/Kota = IKA (30%) + (IKD 30%) + (ITH 40%) IKA =Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	47,42%	Sumber data dari Dinas PKPLH, Aplikasi Indeks kualitas Lingkungan Hidup	
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di Wilayah Kab/Kota	Total volume sampah yang dapat ditangani total volume timbunan sampah kabupaten/kota	100%	Sumber data dari Dinas PKPLH Dokumen terlampir	
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan pemerintah kab/kota	100%	Memakai surat keterangan dari Dinas PKPLH	



	oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan			
- Adm. Kependudukan dan Catatan Sipil					
2.k.1.1	Tingkat perekaman KTP elektronik di Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk berumur 17 tahun keatas yang memiliki KTP Jumlah Penduduk 17 tahun ke atas	99,82%	Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Capil	
2.k.1.2	Persentase anak usia 0-17 tahun yang memiliki KIA	Jumlah anaak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari	91,67%	Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Capil	
2.k.1.3	Tingkat kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kahir Jumlah anak usia 0-18 tahun	99,82%	Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Capil	
2.k.1.4	Persentase perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama Jumlah OPD	50%	Sumber data dari Dinas Kependudukan dan Capil	
- Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan					
2.1.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah Desa tertinggal yang memiliki kriteria Desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks kelurahan Membangun per tahun Jumlah Desa tertinggal (per awal tahun – n)	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024	
2.1.2	Persentase peningkatan status Kelurahan mandiri	Jumlah Desa berkembang yang memenuhi kriteria Desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Kelurahan Membangun per tahun Jumlah Desa berkembang (per awal tahun – n)	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PMK, PP dan PA Berdasarkan Perpres No. 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024	
- Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana					
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)	$= 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ <p>TFR</p> $ASFR_i = \frac{b_i}{p_i} \times k$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur Bi = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu Pi = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama I = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok Umur</p>	2,24%	Sumber data dari Dinas PP dan KB	



		45-49 K = Bilangan Konstanta biasanya 1000			
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB aktif modern Jumlah pasangan usia subur	53,46%	DPPKB	
2.m.3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber KB tetapi tidak terlayani Jumlah Pasangan Usia Subur	41,63%	Sumber data dari Dinas PP dan KB	
- Perhubungan					
2.n.1	Rasio konektivitas Provinsi	Rasio Konektivitas Kabupaten/ Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,83	Sumber data dari Dinas Perhubungan	
2.n.2	V/C Ratio di Jalan Kabupaten/ Kota	V/C Rasio konektivitas kabupaten/ kota	0,16	Sumber data dari Dinas Perhubungan	
- Komunikasi dan Informatika					
2.o.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD	50%	Dinas Kominfo Kota Sibolga	
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah layanan publik	31,42%	Sumber data dari Dinas Kominfo Kota Sibolga	
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lainnya Jumlah penduduk	11,11%	Pemilang dari Dinas Kominfo Kota Sibolga dan Penyebut dari Disdukcatpil Kota Sibolga	
- Koperasi dan Usaha Kecil Menengah					
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset Jumlah seluruh koperasi	30,927%	Sumber data dari Dinas Koperasi, UKM dan Naker	
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha kecil yang menjadi wirausaha Jumlah usaha kecil keseluruhan	7,128%	Sumber data dari Dinas Koperasi dan Naker	
- Penanaman Modal					
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n – jumlah investasi tahun n-1) di Kabupaten/ Kota jumlah investasi tahun n-1 di Kabupaten/ Kota	-7,019%	Sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	
- Kepemudaan dan Olahraga					
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kabupaten/ Kota Jumlah pemuda (16-30 tahun) di Kabupaten/ Kota	3,51%	Sumber data dari Dinas Parpora	
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten/ Kota Jumlah pemuda (16-30 tahun) di	0,84%	Sumber data dari Dinas Parpora	



		Kabupaten/ Kota			
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	33	Sumber data dari Dinas Parpora	
- Statistik					
2.s.1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun Perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jumlah OPD	56,666%	Sumber data dari Dinas Kominfo	
2.s.2	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik Dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah Jumlah OPD	56,666%	Sumber data dari Dinas Kominfo	
- Persandian					
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai area per keamanan informasi Jumlah area penilaian	1,085 %	Sumber data dari Dinas Kominfo Kota Sibolga Kota Sibolga	
- Kebudayaan					
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	19,354 %	Sumber Data dari Dinas Pendidikan	
- Perpustakaan					
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat	68,89%	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Perpustakaan, bahwa tidak melaksanakan survei untuk mengukur tingkat kegemaran membaca	
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM) UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan UPLM 2 = Ketercukupan koleksi UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan UPLM 7 = Anggota perpustakaan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat = $\sum \frac{UPLM}{ALM} \times 100$	72,96%	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Perpustakaan, bahwa tidak melakukan Metode Sensus untuk mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	
- Kearsipan					
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat	$T = (a + l + s + j) / 4$ T = Tingkat ketersediaan arsip	85,88%	Sumber data dari Dinas Perpustakaan Kota	



	bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip i = Persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip s = Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik j = Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		Sibolga	
.2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan Pertanggung jawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepinginan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban M = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten /Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK l = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK	0	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Perpustakaan, bahwa belum pernah melaksanakan NSPKnya atau belum melaksanakan Penyusunan	
3. Urusan Pilihan					
- Kelautan dan Perikanan					
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)		97,52%	Sumber data dari Dinas PKP dan P	
- Pariwisata					
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah wisatawan tahun n –jumlah wisatawan tahun n-1 jumlah wisatawan tahun n-1	-74,56%	Pembilang dan penyebut dari Disparpora	
3.b.2	Pertumbuhan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	Jumlah wisatawan tahun n -Jumlah wisatawan tahun n-1 Jumlah wisatawan tahun n-1	22,18%	Pembilang dan penyebut dari Disparpora	
3.b.3	Tingkat Hunian Akomodasi	Jumlah kamar yang terjual Jumlah kamar yang tersedia	11,67%	Pembilang dan penyebut dari Disparpora	
3.b.4	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku (harga berlaku)		4,99%	Pembilang dari Disparpora, penyebut BPS	
3.b.5	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PAD		2,35%	Pembilang dari Dinas PARPORA dan Penyebut dari LRA Unauditet	
- Pertanian					
3.c.1	Produktivitas pertanian perhektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun Luas panen	0 %	Tidak adanya lahan pertanian di kota sibolga, Sumber data dari Dinas PKP dan P	
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya Jumlah kejadian/kasus penyakit	0,78%	Sumber data dari Dinas PKP dan P	



		hewan menular tahun sebelumnya (t-1)			
- Kehutanan					
3.d	Tidak ada OutCome nya		"tidak perlu diisi"	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019	
- Energi dan Sumber Daya Mineral					
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi	"tidak perlu diisi"	Bukan kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, sesuai dengan Permendagri No 90 Tahun 2019	
- Perdagangan					
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan Ketentuan(IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUPToko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten/ Kota	100%	Memakai Surat Keterangan Dari Dinas Perindag Kota Sibolga	
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	0%	Memakai Surat Keterangan dari Dinas Perindag Kota Sibolga	
3.f.3	Persentase alat –alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota	37,2%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perindag Kota Sibolga	
- Perindustrian					
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah diKabupaten/ Kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n –jumlah industri kecil dan menengah per tahun n - 1 jumlah industri kecil dan menengah per tahun n – 1	8,45%	Pembilang dan Penyebut dari Dinas Perindag Kota Sibolga	
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK	Jika terdapat N indikator pembangunan industri dalam RPIK maka nilai masing-masing bobot indikator adalah (100/N)%	100%	Sumber data dari Dinas Perindag Kota Sibolga	
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	0%	Memakai Surat Keterangan, bahwa Dinas Perindag tidak menerbitkan IUI, karena Pendaftaran Perizinan dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha terintegritas secara Elektronik (OSS)	
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	0 %	Memakai Surat Keterangan, bahwa Dinas Perindag tidak menerbitkan Izin Perluasan Industri (IPIU)	



	instansi terkait				
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan Jumlah izin yang dikeluarkan	0 %	Memakai Surat Keterangan, bahwa Dinas Perindag tidak menerbitkan IUKI dan IPKI, karena Kawasan Industri di Kota Sibolga belum terbentuk	
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	<p>Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)</p> <p>Keterkinian informasi industri :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%) - Tersedianya informasi dengan batas waktu 7-12 bulan (25%) - Tidak tersampainya informasi industri (0%) <p>Kelengkapan informasi industri meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - informasi produksi dan kapasitas produksi (10%) - informasi bahan baku dan bahan penolong (10%) 	<p>40</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p> <p>0</p>	<p>Sumber data dari Dinas Perindag Kota Sibolga</p> <p>Tidak ada Penerbitan Buku Profil T.A 2022</p> <p>Tidak ada Penerbitan Buku Profil T.A 2022</p>	
- Transmigrasi					
3.h	Tidak Perlu diisi			Memakai Surat Keterangan dari Koperasi, UKM dan Ketenagakerjaan bahwa tidak adan daerah transmigrasi	
4. Fungsi Penunjang Pemerintahan					
- (Perencanaan dan Keuangan)					
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Jumlah APBD	25,439%	Sumber data dari BPKPAD dan LRA Unaudit	
4.a.2	Rasio PAD	Jumlah PAD Jumlah Pendapatan pada APBD	13,408%	Sumber data dari BPKPAD dan LRA Unaudit	
4.a.3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan - transfer expenditures Jumlah belanja APBD	60,705%		
4.a.4	Opini Laporan Keuangan	WTP LKPD 2011	LHP atas Laporan Keuangan No. 24.A/LHP/XVIII.MDN/05/2012 Tanggal : 28 Mei 2012	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	



		WDP LKPD 2012	LHP atas Laporan Keuangan No. 82.A/LHP/XVIII.MDN/ 05/2013 Tanggal : 04 Mei 2013	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
		WDP LKPD 2013	LHP atas Laporan Keuangan No. 52.A/LHP/XVIII.MDN/ 07/2014 Tanggal : 11 Juli 2014	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
		WDP LKPD 2014	LHP atas Laporan Keuangan No. 54.A/LHP/XVIII.MDN/ 06/2015 Tanggal :04 Juni 2015	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
		TMP LKPD 2015	LHP atas Laporan Keuangan No. 68.A/LHP/XVIII.MDN/ 09/2016 Tanggal : 22 September 2016	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
		TMP LKPD 2016	LHP atas Laporan Keuangan No. 69.A/LHP/XVIII.MDN/ 08/2017 Tanggal : 9 Agustus 2017	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
		WDP LKPD 2017	LHP atas Laporan Keuangan No. 59.A/LHP/XVIII.MDN/ 06/2018 Tanggal : 4 Juni 2018	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
		WTP LKPD 2018	LHP atas Laporan Keuangan No. 47.A/LHP/XVIII.MDN/ 05/2019 Tanggal : 3 Mei 2019	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
		WTP LKPD 2019	LHP atas Laporan Keuangan No. 40.A/LHP/XVIII.MDN/ 04/2020 Tanggal : 10 April 2020	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
		WTP LKPD 2020	LHP atas Laporan Keuangan No. 42.B/LHP/XVIII.MDN/ 05/2021 tanggal 03 Mei 2021	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
		WTP LKPD 2021	LHP atas Laporan Keuangan No. 43.A/LHP/XVIII.MDN/ 04/2022 Tanggal : 27 April 2022	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	-



		WTP LKPD 2022	LHP atas Laporan Keuangan No. 43.A/LHP/XVIII.MDN/0 5/2023 Tanggal : 4 Mei 2023	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
		WDP LKPD 2023	LHP atas Laporan Keuangan No. 51.A/LHP/XVIII.MDN/0 5/2024 Tanggal : 22 Mei 2024	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
		LKPD 2024	Masih Proses	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
4.a.5	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Laporan Hasil Bimbingan Teknis Peningkatan Level Maturitas SPIP Nomor : PE.09.03/LHP-997/PW02/3.2/2023. Tanggal : 13 Desember 2023	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
4.a.6	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level 2	Laporan hasil penjaminan kualitas atas penilaian mandiri Kapabilitas APIP. Nomor : PE.11.03/S-1357/PW02/6/2024 Tanggal : 06 November 2024	Sumber data dari Inspektorat Kota Sibolga	
- Pemerintahan (Pengadaan)					
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n Jumlah kontrak keseluruhan tahun n	0 %	Memakai Surat Keterangan dari Dinas PU dan PR, bahwa tidak memiliki proyek konstruksi yang dibawa ketahun berikutnya	
4.b.2	Persentase Jumlah Pengadaan yang Dilakukan Dengan Metode Kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	10,483%	Sumber data dari UKPBJ Kota Sibolga	
4.b.3	Rasio Nilai Belanja yang Dilakukan Melalui Pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan Total belanja langsung	14,332%	Sumber data dari LRA Unaudited Kota Sibolga	
4.b.4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n) - Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1) Jumlah Nilai PBJ yang Menggunakan Produk Dlm Negeri, Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Tahun (n-1)	0		
- Pemerintahan (Kepegawaian)					
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/ Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga	Jumlah pegawai menurut pendidikan PT keatas Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga	80,813%	Sumber data dari BKD	



	kesehatan)	kesehatan)			
4.c.2	Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) Seluruh jumlah pegawai pemerintah (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	18,701%	Sumber data dari BKD	
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional Bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi Seluruh jumlah fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	30,569%	Sumber data dari BKD	
Pemerintahan (Manajemen Keuangan)					
4.d.1	Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total Dalam APBD	Nilai absolut dari total belanja dalam realisasi Total belanja APBD dikurangi satu	19,057%	Sumber data dari BPKPAD dan LRA Unauditet	
4.d.2	Revenue Mobilization : Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi Total PAD dalam APBD dikurangi satu	60,511%	Sumber data dari BPKPAD dan LRA Unauditet	
4.d.3	Assets Management	Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak) Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak) Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	Ya Ya Ya Ya	Sumber data dari BPKPAD	
4.d.4	Cash Management : Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA Total belanja anggaran tahun sebelumnya	0,728%	Sumber data dari BPKPAD dan LRA Unauditet	
Pemerintahan (Transparansi dan Partisipasi Publik)					
4.e.1	Informasi Ketersediaan Informasi tentang Sumber Daya yang Tersedia Untuk Pelayanan (Information on Resources Available to Frontline Service Delivery Units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses website Pemda	100%	Sumber data dari Dinas Kominfo Kota Sibolga	
4.e.2	Akses Publik Terhadap Informasi Keuangan Daerah (Public Access to Fiscal Information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda Total jumlah dokumen yang telah dirinci	60%	Sumber data dari Bappeda	
Pemerintahan Umum					
	Kegiatan pembinaan politik di daerah	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan politik	16	Sumber data dari Kantor Kesbang	
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	Menunjukkan jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, ORMAS dan OKP	50	Sumber data dari Kantor Kesbang	

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA

2.3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Analisis Capaian Kinerja bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah



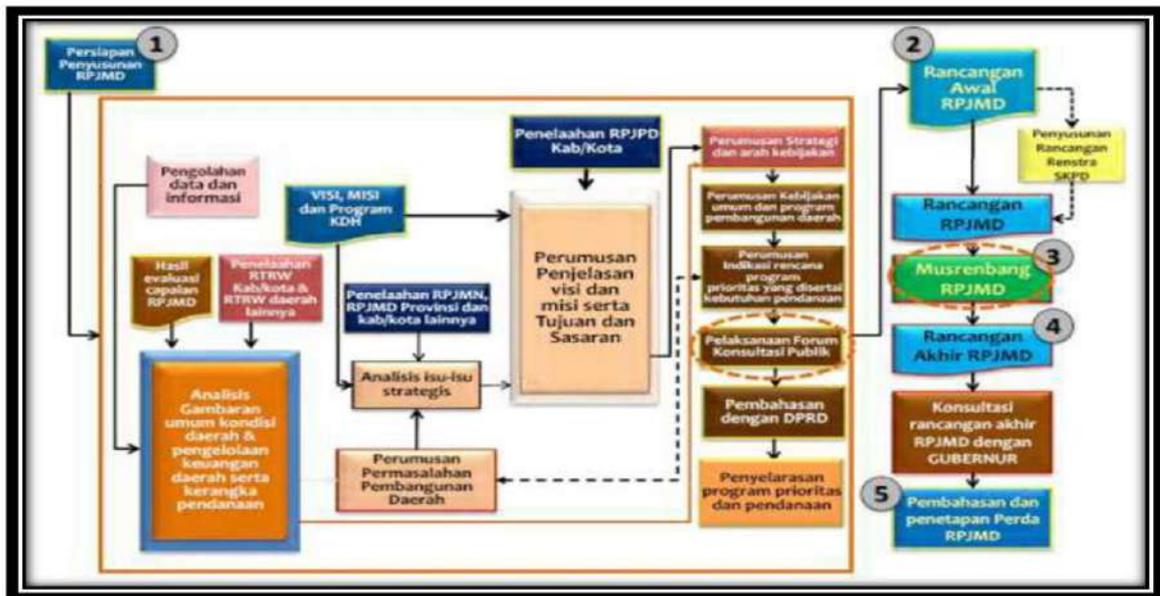
apa yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang diambil oleh masing-masing pemerintah daerah dalam rangka untuk memenuhi target kinerja dari setiap Indikator Kinerja Sasaran (outcome) dan Indikator Kinerja (output) yang ingin dicapai dan dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

Sedangkan perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan - tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kota Sibolga telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sibolga 2005-2025 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010. Salah satu substansi strategis dalam RPJ PD tersebut adalah menetapkan Visi Daerah "Kota Jasa yang Nyaman, Aman, Unggul, Lestari dan Indah (NAULI)" di Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara, yang terdiri dari 6 (enam) Misi yang di dalamnya memuat mengenai indikator dan target capaian. Sebagaimana diketahui pula pada setiap tahap 5 (lima) tahunan RPJMPD tersebut kemudian diuraikan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu: Tahap I (2006-2010), Tahap II (2011-2015), Tahap III (2016-2020) dan Tahap IV (2021-2025). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 5 Ayat (2), bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program Organisasi Perangkat Daerah, lintas organisasi Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana - rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.



Proses penting lainnya dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga ini adalah pemahaman awal posisi Kota Sibolga yang unik atau berbeda dengan daerah lain pada umumnya. Keunikan ini muncul dari faktor karakteristik geografis serta sejarahnya. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021-2026 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat serta dialog yang melibatkan *stakeholders* dan pemangku kepentingan. Adapun proses penyusunan secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar III.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mendepankan akuntabilitas sejauh mana instansi pemerintah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik. Oleh karena itu pentingnya memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Salah satu dasar rujukan yang diacu adalah peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

VISI DAN MISI PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG GOOD GOVERNANCE DENGAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;



Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel;

Strategi : Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme akuntabel yakni Aparatur Sipil Negara (ASN) harus memiliki kompetensi, inovatif, koordinatif, responsif, akan lebih mengedepankan pelayanan prima berbasis sistem informasi pemerintahan elektronik (*E-governance*).

MENINGKATNYA KUALITAS SDM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG RESPONSIF DAN AKUNTABEL;

STRATEGI :

1. Penataan karir ASN sesuai dengan keahlian dan profesionalisme serta secara bertahap akan meningkatkan tambahan bagi ASN sesuai dengan tanggungjawab dan beban kerja.
2. Melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, efisien, ekonomis, efektif dan transparan, bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan dengan memprioritaskan kepentingan masyarakat.
3. Melakukan Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan kegiatan investasi yang bertujuan memberikan manfaat bagi peningkatan Pendapatan Daerah, peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat.

MISI 2 : MEWUJUDKAN DAN MENINGKATKAN KESEHATAN MASYARAKAT SERTA PELAYANAN SEHINGGA DAPAT MELAHIRKAN MASYARAKAT YANG CERDAS, MENUJU MASYARAKAT YANG MAKMUR.

Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat;

Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;

STRATEGI :

MEMBERIKAN / MENINGKATKAN SUBSIDI/ BANTUAN IURAN BPJS BAGI KELUARGA KURANG MAMPU DAN MEMPERMUDAH PENGURUSAN PERSYARATAN ADMINISTRASI UNTUK MENJADI PESERTA BPJS

1. Memberikan penyuluhan kesehatan/ pola hidup masyarakat kurang mampu. Dengan sosialisasi tentang makanan dan minuman yang aman untuk dikonsumsi dan tidak berpotensi menimbulkan penyakit.
2. Meningkatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum dan Puskesmas dengan menyediakan peralatan dan petugas kesehatan yang lebih baik.
3. Melakukan Penataan Pemukiman dan sarana prasarana. Khusus MCK dengan memberikan bantuan pembangunan toilet septic tank yang layak di masing-masing rumah penduduk secara bertahap.



4. Memperbaiki bangunan drainase jalan dan membangun jalan drainase baru di pemukiman warga sehingga tidak menimbulkan penyakit akibat tidak dapat menampung aliran air dengan baik.
5. Memberikan penyuluhan secara kontinu untuk meningkatkan kesadaran kepada masyarakat tentang penting dan bermanfaatnya membuang sampah di tempatnya, dan pengolahan sampah sebagai sumber ekonomi masyarakat.

MISI 3 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG PROPORSIONAL BERBASIS JUMLAH PENDUDUK UNTUK MENATA PEMUKIMAN WARGA AGAR TERCIPTANYA LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG TERANG DENGAN MEMANFAATKAN TATA RUANG YANG BERWAWASAN KOTA PINTAR (*SMART CITY*).

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan;

Sasaran :

I. Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah;

Strategi : Melaksanakan program pembangunan yang proporsional dengan berbasis jumlah penduduk di suatu daerah, sehingga capaian pembangunan yang direncanakan/ diinginkan oleh masyarakat dapat terpenuhi.

II. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

Strategi : Melaksanakan program perencanaan tata ruang dan pengawasan serta pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan memperhatikan daya dukung kota dalam rangka mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota perdagangan dan jasa.

- Pembangunan dan penataan Infrastruktur kota yang berkualitas dengan mengedepankan input perencanaan yang komprehensif (luas dan lengkap).

Melakukan program pembangunan sarana dan prasarana lingkungan dan permukiman yang ramah lingkungan dengan sistem pemberdayaan dan swakelola masyarakat bagi kawasan padat pemukiman khususnya pembangunan jalan lingkungan, gorong-gorong drainase.

Melakukan pembangunan dan perbaikan seluruh trotoar jalan di Kota Sibolga sehingga bermanfaat bagi pengguna jalan untuk mendukung mewujudkan Kota Sibolga sebagai kota tujuan wisata yang nyaman bagi pejalan kaki.

- Melakukan pemasangan dan penataan lampu jalan disetiap lingkungan.

Melakukan perbaikan Infrastruktur pasar dan infrastruktur penunjang kegiatan perdagangan lainnya. Pembenahan pelabuhan ASP Sibolga yang menunjang kegiatan kepulauan Nias. Perdagangan barang dan sarana transportasi ke daerah.

MISI 4 : Mewujudkan Pendidikan yang berkualitas, memberikan subsidi penuh terhadap kebutuhan belajar 9 tahun dan memberikan beasiswa bagi siswa berprestasi untuk melanjutkan studi ke Perguruan tinggi, serta Meningkatkan kesejahteraan guru.



Tujuan : Mewujudkan Pendidikan Berkualitas;

Sasaran : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;

Strategi : Menyiapkan Anggaran untuk subsidi wajib belajar 9 tahun bagi keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka dalam pembiayaan sekolah anak mulai dari pakaian, sepatu, alat tulis dan beban dari kewajiban-kewajiban yang lainnya dan memberikan bantuan beasiswa bagi anak yang berprestasi sampai ke tingkat perguruan tinggi.

- Meningkatkan kesejahteraan guru honor, tenaga kependidikan dan guru berbasis agama.
- Menertibkan lokasi - lokasi permainan yang mengganggu aktivitas pelajar dengan mengatur jam operasionalnya dan memberikan sanksi bagi yang melanggar.
- Melakukan razia secara terus menerus kepada anak-anak, remaja, pelajar yang bermain *Game Warnet*.
- Menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang aktivitas publik yang berpotensi merusak generasi bangsa.

MISI 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang Ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dengan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.

Tujuan : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial;

Sasaran : Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin;

Strategi : Memberikan pelatihan - pelatihan kewirausahaan dan keterampilan kepada masyarakat agar ikan sebagai bahan baku dapat diolah menjadi produk kuliner, baik sebagai makanan basah maupun makanan kering seperti kerupuk ikan dan sebagainya.

Memberikan bantuan modal dalam bentuk dana bergulir kepada masyarakat yang telah mampu membuka usaha.

Menggalakkan usaha di bidang jasa wisata alam dan kuliner yang berimplikasi kepada terbukanya peluang pasar bagi produk – produk.

Membuka akses pasar dengan mendirikan BUMD Sandang untuk memudahkan pedagang memenuhi kebutuhan dagangan serta menampung penjualan produk-produk UMKM dengan membangun pasar singgah dan menjalin kerjasama dengan pengusaha ritel waralaba seperti: Indomaret, Alfamidi, Transmart dan lain-lain.





Tabel III.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR				
MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	2	3	4	5
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang <i>Good Governance</i> Dengan Transparan Dan Akuntabel.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Reformasi Birokrasi. 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. 2. Meningkatnya kualitas SDM penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (AKIP). 2. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Indeks Kepuasan Masyarakat. 4. Indeks Daya Saing Daerah.
Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Serta Pelayanan Sehingga Dapat Melahirkan Masyarakat Yang Cerdas, Menuju Masyarakat Yang Makmur.	Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Sehat.	Indeks Pembangunan Manusia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kesehatan. 2. Pola Pangan Harapan (PPH).



VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR				
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Yang Proporsional Berbasis Jumlah Penduduk Untuk Menata Pemukiman Warga Agar Terciptanya Lingkungan Yang Sehat Dan Infrastruktur Kota Yang Terang Dengan Memanfaatkan Tata Ruang Yang Berwawasan Kota Pintar (<i>Smart City</i>).	Terwujudnya Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan.	Indeks Resiko Bencana.	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 	<ol style="list-style-type: none"> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). RPPLH Kota Sibolga. Air Minum Layak dan Berkelanjutan. Rumah Tangga Bersanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pengurangan Luasan Kumuh.
Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh Terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, Dan Memberikan	Terwujudnya Pendidikan Berkualitas.	Indeks Pembangunan Manusia.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat.	1. Indeks Pendidikan.
VISI : MEWUJUDKAN SIBOLGA SEHAT, PINTAR DAN MAKMUR				
Beasiswa Bagi Siswa Berprestasi Untuk Melanjutkan Studi Ke Perguruan Tinggi, Serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.				

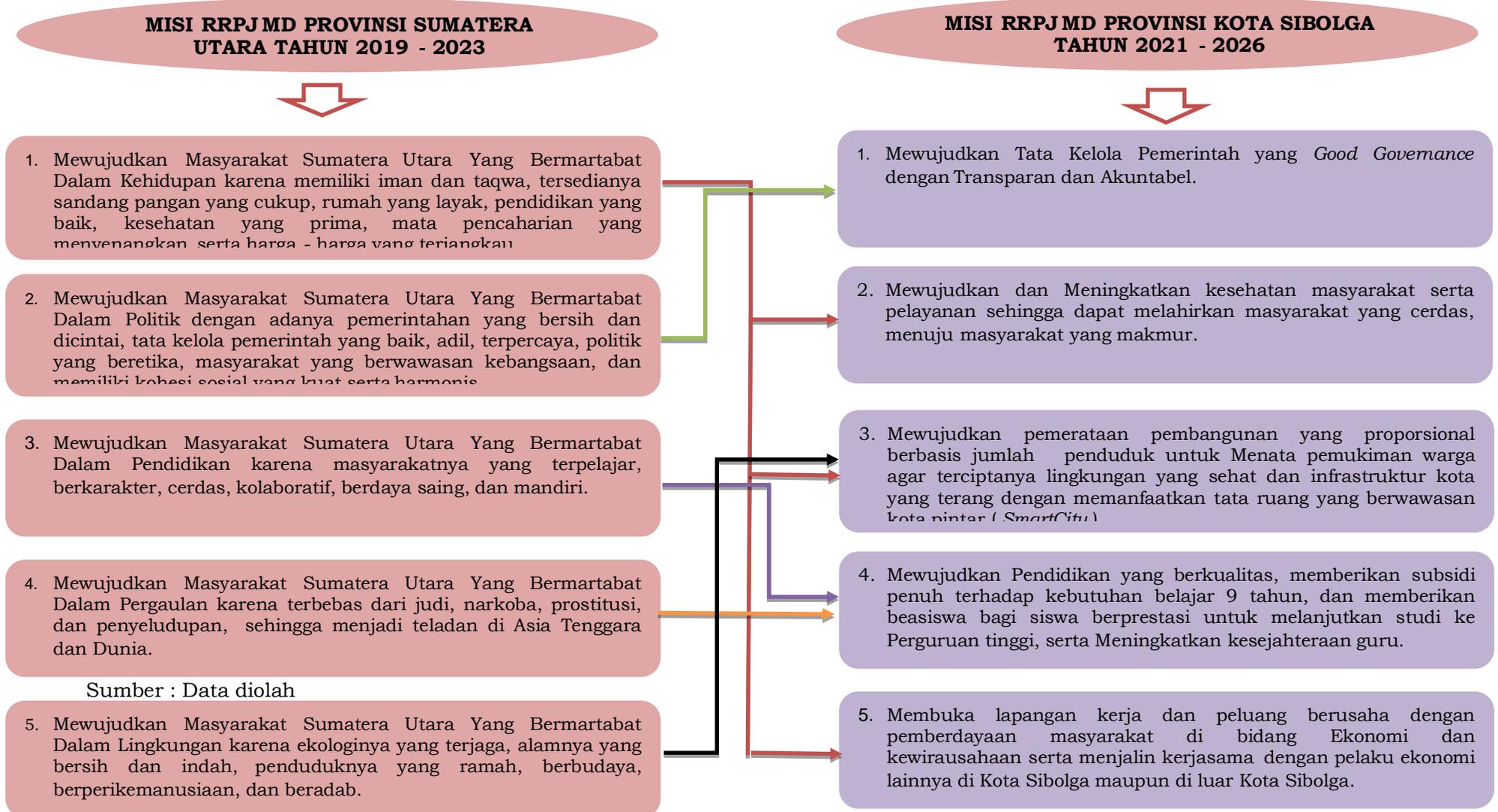


<p>Membuka Lapangan Kerja Dan Peluang Berusaha Dengan Pemberdayaan Masyarakat Dibidang Ekonomi Dan Kewirausahaan Serta Menjalin Kerjasama Dengan Pelaku Ekonomi Lainnya Di Kota Sibolga Maupun Di Luar Kota Sibolga.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi. 2. Terwujudnya Kesejahteraan Sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertumbuhan Ekonomi. 2. Gini Rasio. 3. Angka Kemiskinan. 4. Angka Pengangguran. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat. 2. Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin. 3. Mempermudah pelayanan Perizinan dan Investasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta). 2. Pendapatan Daerah. 3. Indeks Pembangunan Gender. 4. Indeks Kesetaraan Gender. 5. Meningkatnya Jumlah Ekonomi Kreatif. 6. Izin yang diterbitkan.
--	--	---	--	--

Sumber : Data diolah



Gambar 3.2 Keselarasan RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 dengan RPJMD Kota Sibolga Tahun 2021-2026A





B. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Kinerja (*Performance*) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu. Kinerja bisa diketahui hanya jika individu atau kelompok individu tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai. Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya. Dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan perusahaan, organisasi disusun dalam unit-unit kerja yang lebih kecil, dengan pembagian kerja, sistem kerja dan mekanisme kerja yang jelas (Arsenia, 2011). Kinerja adalah melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa pengertian kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika (Martono, 2010).

Penyusunan Pelaporan Kinerja Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 ini mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 terutama terkait dengan peraturan skala nilai peringkat Kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis.

Dalam penyusunan LKIP ini, evaluasi kinerja sasaran adalah merupakan hasil dari setiap nilai capaian kinerja sasaran kemudian diberikan pembobotan untuk memperoleh nilai capaian sasaran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang diukur dengan mempergunakan skala ukuran ordinal sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas kinerja Pemerintah, dengan penilaian sebagai berikut:

Tabel III.2 Kriteria Penilaian Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat rendah

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017



Dalam tabel kriteria penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2. Hasil Sedang Gradasi cukup menunjukkan pencapaian kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah. Gradasi ini menunjukkan pencapaian kinerja capaian belum memenuhi/masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Evaluasi Kinerja Program Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 yang dilakukan menunjukkan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sibolga Tahun 2021 – 2026.

Pengukuran Indikator Kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target setiap indikator kinerja yang telah ditetapkan. Rumus untuk menghitung capaian kinerja setiap indikator atas makna indikator ada dua jenis:

- Indikator bermakna positif, artinya: Jika semakin besar realisasi berarti semakin baik kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin buruk kinerjanya, maka digunakan rumus pendek:

$$\frac{\text{REALISASI}}{\text{TARGET}} \times 100 \%$$

- Indikator bermakna negatif, artinya: Jika semakin besar realisasi berarti semakin buruk kinerjanya, atau sebaliknya semakin kecil realisasi semakin baik kinerjanya, gunakan rumus panjang.

$$\frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{TARGET}} \times 100 \%$$



Nilai capaian kinerja masing-masing sasaran dianggap mempunyai bobot yang sama, sehingga digunakan rumus rata-rata. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, maka capaian kinerja dikategorikan dengan menggunakan skala ordinal, merujuk pada skala penilaian kinerja sebagai berikut:

- Nilai dibawah 55 : Kurang
- Nilai > 55 s/d 80 : Cukup
- Nilai > 80 s/d 95 : Baik
- Nilai > 95 s/d 100 : Sangat baik

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Untuk menilai capaian kinerja digunakan kriteria sebagaimana tercantum dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJP dan RPJMD dan RKPd.

Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kota Sibolga 2021-2026 yang ditetapkan pada tanggal 26 Oktober 2021, menetapkan Tahun 2021 sebagai tahun dasar pelaksanaan Pembangunan Jangka Menengah sebagai tolak ukur pelaksanaan Visi dan Misi Wali Kota. RPJMD tersebut memuat target kinerja Wali Kota Sibolga untuk 5 tahun kedepan. Target tersebut di uraikan dari misi pertama sampai dengan misi kelima.

C1. Membandingkan antara target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel							
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B	CC (56,88)	Tidak tercapai	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,5	2,42	Tidak tercapai	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	B	CC (56,77)	Tidak tercapai	Bagian Organisasi Setdakot
			Indeks Kepuasan Masyarakat	77,20	84,76	Tercapai	Bagian Organisasi
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	2,6775	3,08	Tercapai	Bappeda



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0,70	0,60	Tidak tercapai	Bappeda
			Indeks Inovasi Daerah	inovatif	Inovatif (38,64)	Tercapai	Bappeda
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur							
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	98	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (Smart City).							
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	137,80	165,75	Tidak tercapai	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,30	47,42	Tidak tercapai	PKPLH
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	70	77,75	Tercapai	PU, PKPLH
Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.							
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	80	77,52	Tidak tercapai	Bappeda
			Indeks Pendidikan	14,13	13,78	Tidak tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.							
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80	81,03	Tercapai	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	5,20	3,92	Tidak tercapai	Bappeda
			Gini Ratio	0,270	0,377	Tidak tercapai	Bappeda/BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	69,72	72,01	Tercapai	Bappeda/BPS



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	CAPAIAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
			PDRB Perkapita (Ribu)	78.765,20	78.494,11	Tidak tercapai	Bappeda/BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	9,80	11,39	Tidak tercapai	Bappeda/BPS
			Angka Pengangguran	4610	3107	Tercapai	Bappeda/BPS

C2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024			SUMBER DATA
				Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel									
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	C	C	B	CC (56,88)	Tidak tercapai	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,73	2,24	2,5	2,42	Tidak tercapai	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	CC (53,51)	CC (54,60)	B	CC (56,77)	Tidak tercapai	Bagian Organisasi Setdakot
			Indeks Kepuasan Masyarakat	79,53	85,40	77,20	84,76	Tercapai	Bagian Organisasi
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	2,91	3,08	2,6775	3,08	Tercapai	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	0,70	0,60	Tidak tercapai	Bappeda
			Indeks Inovasi Daerah	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	inovatif	Inovatif (38,64)	Tercapai	Bappeda
MISI 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur									



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024			SUMBER DATA
				Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	98	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (Smart City).									
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	167,20	167,20	137,80	165,75	Tidak tercapai	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,63	64,90	68,30	47,42	Tidak tercapai	PKPLH
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	70	77,75	Tercapai	PU, PKPLH
Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.									
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	74,74	77,07	80	77,52	Tidak tercapai	Bappeda
			Indeks Pendidikan	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	14,13	13,78	Tidak tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.									
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	80	81,03	Tercapai	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	4,15	4,20	5,20	3,92	Tidak tercapai	Bappeda
			Gini Ratio	0,3460	0,2460	0,270	0,377	Tidak tercapai	Bappeda /BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk	-	74,74	69,72	72,01	Tercapai	Bappeda /BPS



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024			SUMBER DATA
				Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			(Juta)						
			PDRB Perkapita (Ribu)	Belum ada (indeks baru)	Belum ada (indeks baru)	78.765,20	78.494,11	Tidak tercapai	Bappeda /BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	11,47	10,05	9,80	11,39	Tidak tercapai	Bappeda /BPS
			Angka Pengangguran	2882	3217	4610	3107	Tercapai	Bappeda /BPS

d. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS (2026)	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel						
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (56,88)	A	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,42	2,80	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	CC (56,77)	B	Bagian Organisasi Setdakot
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84,76	77,55	Bagian Organisasi
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	3,08	2,700	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0,60	Tidak ada (indeks baru)	Bappeda
			Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (38,64)	Tidak ada (indeks baru)	Bappeda
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur						



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS (2026)	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	100	Tidak ada (indeks baru)	Dinas Kesehatan
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (Smart City).						
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	165,75	129,40	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47,42	69,21	PKPLH
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	77,75	Tidak ada (indeks baru)	PU, PKPLH
Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.						
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	77,52	75,08	Bappeda
			Indeks Pendidikan	13,78	Tidak ada (indeks baru)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menajnl kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.						
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	81,03	Tidak ada (indeks baru)	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	3,92	5,90	Bappeda
			Gini Ratio	0,377	0,260	Bappeda/BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	72,01	73,32	Bappeda/BPS
			PDRB Perkapita (Ribu)	78.494,11	Tidak ada (indikator baru)	Bappeda/BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	11,39	9,14	Bappeda/BPS
			Angka Pengangguran	3107	4150	Bappeda/BPS



C4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL/PROVINSI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel						
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	CC (56,88)	BB	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,42	3,86	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	CC (56,77)	B	Bagian Organisasi Setdakot
			Indeks Kepuasan Masyarakat	84,76	85,29	Bagian Organisasi
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	3,08	3,44/3,58	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0,60	0,69	Bappeda
			Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (38,64)	59,93	Bappeda
MISI 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur						
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	100	-	Dinas Kesehatan
MISI 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (Smart City).						
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	165,75	122,11/139,84	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	47,42	73,53	PKPLH
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	77,75	-	PU, PKPLH
MISI 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.						
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	77,52	75,76	Bappeda
			Indeks Pendidikan	13,78	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	STANDAR NASIONAL/PROVINSI	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.						
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	81,03	77,49	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	3,92	5,03	Bappeda
			Gini Ratio	0,377	0,381	Bappeda/BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	72,01	73,57	Bappeda/BPS
			PDRB Perkapita (Ribu)	78.494,11	1146,9	Bappeda/BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	11,39	7,93	Bappeda/BPS
			Angka Pengangguran	3107	457.794	Bappeda/BPS



e. Analisis penyebab keberhasilan /kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel									
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B	CC (56,88)	Tidak tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedia dokumen perencanaan tentang RB seperti ROAP MAP RB. 2. Penetapan target atas kegiatan utama belum sepenuhnya berdasarkan baseline tahun sebelumnya. 3. Penyusunan renaksi yang belum berupa intervensi terhadap prioritas permasalahan utama dan belum relevan untuk mencapai target kegiatan utama. 4. Belum sepenuhnya SDM memiliki kemampuan untuk penyusunan dokumen RB. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan pendampingan penguatan RB kepada OPD dengan menghadirkan Tim Ahli dari Smard ID untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam penyusunan dokumen RB 2. Menyusun Tim Reformasi Birokrasi Kota Sibolga tiap tahunnya dan Tim Reformasi Birokrasi9 Perangkat Daerah dan melibatkan semua pihak. 3. Membangun komitmen melalui pimpinan agar indeks Reformasi Birokrasi menjadi perhatian bersama dengan mengalokasikan program kegiatan yang mendukung Indeks Reformasi pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga 	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,5	2,42	96,8	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam memanfaatkan media SPBE untuk membilikasikan seluruh Program /Kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. 2. Petugas operator (JR) pada sebagian OPD belum terbentuk berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Perintah Tugas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberdayakan tenaga paruh waktu pada Dinas Kominfo Kota Sibolga untuk menjadi petugas operator sementara pada OPD yang tidak memiliki petugas operator. 	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	B	CC (56,77)	Tidak tercapai	<p>Masih terdapat kelemahan dalam dokumen antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Kinerja : <ul style="list-style-type: none"> - PK belum disampaikan secara lengkap - Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya terlihat proses kinerja antara level jabatan secara berjenjang - Indikator Kinerja PK Pemko yang belum memenuhi kriteria SMART - Indikator Kinerja OPD belum terukur dan rencana aksi OPD yang belum memuat penjabaran target triwulan - Terdapat sasaran strategis dan Indikator OPD belum berorientasi hasil - Renaksi yang disusun OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun kerja sama TIM SAKIP Kota Sibolga, antara Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Bagian Organisasi 2. Penyusunan Peraturan Walikota tentang Tim Akselerasi Penguatan SAKIP Kota Sibolga, Pedoman Penyusunan SAKIP Kota Sibolga dan Pemberian Reward dan Punishment oleh Inspektorat Kota Sibolga 3. Melaksanakan kegiatan pendampingan penguatan SAKIP kepada seluruh OPD dengan menghadirkan TIM Ahli dari SMARTID guna menambah pegetahuan OPD untuk meningkatkan kualitas SAKIP Pemerintah Sibolga 	Bagian Organisasi Setdakot



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<p>2. Pengukuran Kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKU OPD belum lengkap dengan defenisi dan fomula - Aplikasi e-sakip belum dimanfaatkan dengan maksimal - Belum sepenuhnya melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang - Hasil pengukuran kinerja belum dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan <p>3. Pelaporan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Kinerja Pemda dan OPD belum dipublikasikan - Laporan Kinerja OPD kurang memadai - Informasi dalam laporan OPD belum sepenuhnya dipergunakan untuk perbaikan tahun berikutnya <p>4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :</p> <ul style="list-style-type: none"> - LHE belum menggambarkan kondisi sebenarnya - LHE belum menyajikan rekomendasi yang cukup - OPD belum memanfaatkan hasil LHE dari inspektorat untuk meningkatkan kinerja. 		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	77,20	84,76	109,79	<p>1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 yaitu 84,76 yang merupakan nilai rata-rata dari 30 perangkat daerah yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, yang berarti mutu pelayanan masuk dalam kategori baik</p> <p>2. Dari 9 usur pelayanan publik yang diukur oleh 30 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat, rata-rata unsur yang diukur masuk dalam Kategori Baik. Namun dari keberhasilan tersebut jika dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 0,64, adapun faktor yang mengakibatkan penurunan yaitu:</p> <p>Terdapat 5 Perangkat Daerah yang mengalami penurunan indeks kepuasan masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun mendatang.</p>		Bagian Organisasi



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	2,6775	3,08	115,03	Pemerintah Kota Sibolga mengalami peningkatan nilai pada pilar 1 antara lain : 1. Menurunnya angka kriminalitas 2. Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan 3. Meningkatnya infrastruktur jalan 4. Meningkatnya institusi kelembangaan		Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0,70	0,60	85,71	1. Hasil penilaian laporan keuangan Pemerintah Kota Sibolga tahun 2024 tidak mendapatkan WTP melainkan WDP, 2. Namun Kota Sibolga mengalami perbaikan klaster, yakni klaster sedang .	1. Melakukan evaluasi dan tindaklanjut 2. Memanfaatkan SPBE untuk upload dokumen sebagai wujud keterbukaan Informasi dan Pemerintahan yang transparan.	Bappeda
			Indeks Inovasi Daerah	inovatif	Inovatif (38,64)	Tercapai	Penguatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Dinas Sosial Kota Sibolga, Rumah Sakit FL. Tobing Kota Sibolga dan Dinas Kesehatan Kota Sibolga untuk membuat Inovasi Pelayanan.		Bappeda
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur									
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	98	100	102,04	1. Melaksanakan program pembangunan kesehatan berwawasan lingkungan 2. Menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi di Kota Sibolga 3. Menciptakan Kelurahan yang masyarakatnya berperilaku hidup bersih dan sehat 4. Menyiapkan petugas kesehatan yang siap siaga 5. Tersedianya fasilitas kesehatan.		Dinas Kesehatan
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (Smart City).									
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	137,80	165,75	79,72	1. Belum tersedia dokumen-dokumen kebencanaan yang mendukung penilaian Indeks kepastian daerah yang dapat mempengaruhi Indeks Resiko Bencana 2. Keterbatasan sarana dan prasarana informasi serta sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat 3. Belum terbentuk penguatan kawasan seperti Forum Penanggulangan Resiko Bencana (FPRB) di Kota Sibolga	1. Memanfaatkan dokumen- dokumen yang ada 2. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, sekaligus menyiapkan dana tahun anggaran berikutnya untuk pemenuhan sarana dan prasarana.	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,30	47,42	69,43	1. Untuk mendapatkan capaian nilai Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2024 terdapat 3 komponen, dimana salah satu komponen yaitu Indeks Kualitas Air tidak memiliki nilai (0) akibat tidak tersedia anggaran untuk melakukan uji laboratorium analisa/pengujian kualitas air sungai dan laut sehingga mengurangi akumulasi nilai secara keseluruhan. 2. Proses pengolahan data pemetaan untuk nilai Indeks Kualitas Lingkungan membutuhkan waktu kajian yang dan peninjauan lapangan yang cukup kompleks	1. Mengupayakan agar anggaran analisa/pengujian kualitas air sungai dan laut dapat tersedia. 2. Melakukan koordinasi dengan pusat pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera untuk mempercepat proses pengolahan data pemetaan.	PKPLH



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	70	77,75	111,07	1. Berkurangnya panjang jalan yang rusak berat dan rusak ringan dari 23,19 KM menjadi 20,09 KM 2. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum		PU, PKPLH
Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.									
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	80	77,52	96,9	Capain indikator tidak mencapai target yang ditentukan, namun ada perbaikan persentase capaian Indeks rata-rata sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kota Sibolga dan tercapainya target Indeks Kesehatan pada tahun 2024 di Kota Sibolga.	Pemerintah Kota Sibolga melakukan upaya untuk memberdayakan akses pendidikan paket C dan Paket B bagi masyarakat Kota Sibolga yang putus sekolah.	Bappeda
			Indeks Pendidikan	14,13	13,78	97,52	Berkurangnya persentase lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Sibolga akibat faktor ekonomi dan keterbatasan Perguruan Tinggi dan Swasta yang ada di Kota Sibolga	Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Pendidikan mengoptimalkan program Paket C dan program beasiswa kepada anak kurang mampu yang memiliki prestasi demi meningkatkan persentase lama sekolah di Kota Sibolga.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.									
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80	81,03	101,29	Hasil Survei/Penelitian dari Kementerian Pertanian bahwa : 1. Peta ketersediaan dan kerentanan pangan Kota Sibolga telah menunjukkan Daerah Hijau 2. Bahwa Akses ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan cukup baik di Kota Sibolga.		Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	5,20	3,92	75,38	Keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sibolga dalam menumbuhkembangkan sektor usaha- usaha baru seperti pengembangan sector wisata.		Bappeda
			Gini Ratio	0,270	0,377	60,37	Semakin merata perbandingan masyarakat antara masyarakat kelas atas, dengan masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas bawah di Kota Sibolga.	Pemerintah Kota Sibolga memperkuat pertumbuhan Usaha mikro dan Kecil demi memperkuat pertumbuhan ekonomi.	Bappeda/BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	69,72	72,01	103,28	Semakin banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tumbuh di Kota Sibolga berdasarkan data pada Dinas Perizinan Kota Sibolga.		Baappeda/BPS



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI	% CAPAIAN	ANALISIS KEBERHASILAN/ KEGAGALAN	SOLUSI YANG DILAKUKAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			PDRB Perkapita (Ribu)	78.765,20	78.494,11	99,65	Sektor Perdagangan di Kota Sibolga yang berjalan dengan baik.		Bappeda/BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	9,80	11,39	83,78	Keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Perbandingan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada di Kota Sibolga	Pemerintah Kota Sibolga melakukan program –program penanggulangan kemiskinan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga dalam rangka pemenuhan hak dasar 2. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat 3. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayann usaha mikro dan kecil 4. Program lain yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin. 	Bappeda/BPS
			Angka Pengangguran	4610	3107	132,60	Dengan keterbatasan keuangan Pemko Sibolga, namun tetap berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil dan upaya memberikan pelatihan bagi tenaga pra pencari kerja.		Bappeda/BPS



e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	SUMBER DATA
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel											
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	B	CC (56,88)	Tidak tercapai	113.946.265	93.428.503	81,99	Tidak efisien	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,5	2,42	96,8	2.540.000.000	1.190.000.000	46,85	Tidak efisien	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	B	CC (56,77)	Tidak tercapai	113.946.265	93.428.503	81,99	Tidak efisien	Bagian Organisasi Setdakot
			Indeks Kepuasan Masyarakat	77,20	84,76	109,79	51.395.509	26.463.850	51,49	Efisien	Bagian Organisasi
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	2,6775	3,08	115,03	Nihil	Nihil	Nihil	Efisien	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0,70	0,60	85,71	18.953.030.782	14.003.299.676	73,88	Tidak efisien	Bappeda/BPKAD
			Indeks Inovasi Daerah	inovatif	Inovatif (38,64)	Tercapai	Nihil	Nihil	Nihil	Efisien	Bappeda
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur											
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	98	100	102,04	3.999.402.396	2.227.799.306	55,70	Efisien	Dinas Kesehatan
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (Smart City).											
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	137,80	165,75	79,72	206.028.900	164.488.400	79,84	Tidak efisien	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,30	47,42	69,43	101.210.100	76.900.000	75,98	Tidak efisien	PKPLH
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	70	77,75	111,07	23.407.374.347	19.195.971.281	82,01	Efisien	PU, PKPLH
Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.											
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	80	77,52	96,9	Nihil	Nihil	Nihil	Efisien	Bappeda



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			EFISIENSI	SUMBER DATA
				TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Indeks Pendidikan	14,13	13,78	97,52	39.316.848.237	33.291.390.880	84,67	Tidak efisien	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.											
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	80	81,03	101,29	4.203.893.237	3.190.184.400	75,89	Efisien	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	5,20	3,92	75,38	4.394.530.305	3.840.540.045	87,39	Tidak Efisien	Bappeda/Perindag
			Gini Ratio	0,270	0,377	60,37	Nihil	Nihil	Nihil	Tidak efisien	Bappeda/BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	69,72	72,01	103,28	Nihil	Nihil	Nihil	Efisien	Baapeda/BPS
			PDRB Perkapita (Ribu)	78.765,20	78.494,11	99,65	Nihil	Nihil	Nihil	Efisien	Bappeda/BPS
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	9,80	11,39	83,78	266.545.847	45.697.280	17,14	Tidak efisien	Bappeda/Dinas sosial
			Angka Pengangguran	4610	3107	132,60	66.163.231	29.596.400	44,73	Efisien	Bappeda/Koperasi

C7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
MISI 1 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah yang Good Governance dengan Transparansi dan Akuntabel										



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Responsif dan Akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi	Tidak tercapai	Peningkatan kinerja reformasi birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan RB	100	Menunjang	Realisasi Capaian Indikator program (100 %) sesuai dengan target target yang telah ditentukan, capain Indek RB belum mencapai target di tahun 2024, akan tetapi persentase capain Indikator mengalami peningkatan dibanding tahun 2023.Untuk mencapai target RB kedepan dipandang perlu untuk melaksanakan program peningkatan kapasita aparatur melalui pelatihan manageman perubahan budaya kerjaberbasis kinerja.	Bagian Organisasi Setdakot
			Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	96,8	1. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 2. Penyelenggaran Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1. Jumlah waktu penyediaan layanan internet 2. Jumlah waktu pengelolaan dan pengembangan infrastruktur tekhnologi informasi Pemerintah Kota Sibolga	100	Menunjang	Realisasi capain indikator program 100 persen, akan tetapi capaian target indikator SPBE tahun 2024 sebesar 96,80 persen, masih perlu ditingkatkan komitmen bersama terutama pimpinan OPD agar memanfaatkan sarana SPBE sebagai media untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan bersih dan akuntabel.	Kominfo
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah (SAKIP)	Tidak tercapai	Peningkatan Kinerja Reformasi Birokrasi	Jumlah dokumen peningkatan kinerja dan RB	100	Menunjang	Realisasi Capaian Indikator program (100 %) sesuai dengan target yang telah ditentukan, untuk penigkatan nilai SAKIP perlu dilakukan penguatan pendampingan penyusunan dokumen perencanaan, pengukuran dan evaluasi dan pelaporan SAKIP bagi seluruh OPD.	Bagian Organisasi Setdakot
			Indeks Kepuasan Masyarakat	109,79	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tatalaksana	Jumlah laporan hasil Fasilitsi pelayanan publik dan tata laksana	100	Menunjang	Kegiatan pasilitasi dan tatalaksana telah menjadi faktor pendukung dalam menunjang pelaksanaan dan pencapaian indeks kepuasan maayrakat, dimana kegiatan pasilitasi pelayanan publik dilaksanakan melalui monitoring pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan pelaporan. Namun didalam pelaksanaanya terdapat penurunan nilai Indeks kepuasan masyarakat pada beberapa OPD.	Bagian Organisasi



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Daya Saing Daerah atau (IDSD)	115,03	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	100	Menunjang	Program penelitian dan pengembangan daerah mendukung walupun tidak secara langsung untuk mencapai target Indeks Daya Saing tahun 2004, walaupun tidak tersedia anggaran pendukung	Bappeda
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	85,71	1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Persentase capaian kinerja pengelolaan keuangan daerah	100	Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan	Bappeda/BPKAD
					2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2. Persentase capaian kinerja pengelolaan barang milik daerah	100	Menunjang	Telah sesuai dengan yang direncanakan	
					3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3. Persentase capaian pengelolaan pendapatan daerah				
			Indeks Inovasi Daerah	Tercapai	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persenase capaian rencana induk kelitbangan dan perhitungan indeks	100	Menunjang	Dengan pencapaian indeks inovasi daerah mencapai target yakni Inovatif, seiring dengan penguatan pelaksanaan inovasi pelayanan pada dinas yang melaksanakan pelayan dasar kepada masyarakat.	Bappeda
Misi 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan Kesehatan Masyarakat serta Pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur										



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan Masyarakat	102,04	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		100	Menunjang	1. Persentase penangan kesehatan bayi, ibu hamil, ibu bersalin termasuk pemberian vaksin dan vitamin dilaksanakan dengan baik. 2. Penangan dan penanggulangan penyakit tertentu semakin mebaik, seiring dengan derajat kesehatan masyarakat yang makin mebaik.	Dinas Kesehatan
Misi 3 : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang proporsional berbasis jumlah penduduk untuk menta pemukiman warga agar terciptanya lingkungan yang sehat dan infrastruktur kota yang terang dengan memanfaatkan tata ruang yang berawasan kota pintar (Smart City).										
3	Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Resiko Bencana	79,72	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Peningkatan pengurangan risiko bencana	100	Menunjang	Jumlah kegiatan pada program penanggulangan bencana yang dilaksanakan /jumlah kegiatan pada program penanggulangan becana adalah 100 % (dengan kata lai sesuai dengan yang direncanakan)	BPBD
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,43	Ketersediaan data pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup yang terhadap media air, udara dan laut	100	Menunjang	Realisasi capain indikator kinerja 100 persen, walupun capain indikator kinerja hanya 69, 42. Dengan keterbatasan kemampuan anggaran, dengan demikian tidak dapat dilaksanakan pengujian kualitas air melalui uji laboratirum.	PKPLH



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah	Indeks Infrastruktur	111,07	1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) Persentases rumah tangga yang memiliki air minum layak dan berkelanjutan Persentase rumah tangga yang bersanitasi total bermasyarakat(STMB)	68,96 118,69 46,61	Menunjang Menunjang Menunjang	Realisasi Program/Kegiatan (100 %) sama dengan target (100%) analisis capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori sangat tinggi Realisasi Program/Kegiatan (100 %) sama dengan target (100%) analisis capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori sangat tinggi Realisasi Program/Kegiatan (100 %) sama dengan target (100%) analisis capaian Indikator Kinerja sebesar (100%). Indikator Kinerja masuk pada kategori sangat tinggi	PU, PKPLH
<p>Misi 4 : Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas, Memberikan Subsidi Penuh terhadap Kebutuhan Belajar 9 Tahun, dan Memberikan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi untuk Melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi, serta Meningkatkan Kesejahteraan Guru.</p>										
4	Mewujudkan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	96,9	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Persentase capaian koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	Menunjang	Program koordinasi dan sinkronisasi peencanaan pembangunan daerah mendukung Indeks Pembangunan Manusia di Kota Sibolga, walaupun realisasi hanya sebesar 96,9 dari target yang ditentukan akan tetapi, pada tahun sebelumnya Indeks Pembangunan telah memenuhi target oleh karena itu nilai 80 merupakan target baru. Koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia tetap terlaksana ,walaupun anggaran tak tersedia .	Bappeda
			Indeks Pendidikan	97,52	Program Pengelolaan Pendidikan		100	Menujng	Capain indikator program 100 persen, walaupun capain indicator kinerja hanya 97,52 persen, ada upaya yang dilakukan untuk meningkatkan indeks pendidikan melalui pelaksanaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									pendidikan Paket C dan Paket B	
Misi 5 : Membuka lapangan kerja dan peluang berusaha dengan pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi dan kewirausahaan serta menjalin kerjasama dan pelaku ekonomi lainnya di Kota Sibolga maupun di luar Kota Sibolga.										
5	Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	101,29	Pengadaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	100	Menunjang	Capaian indicator kinerja 100 % namun tidak secara langsung menunjang indeks ketahanan pangan karna perhitungan nilai indikator dan hasilnya dilakukan oleh Kementerian melalui survei di Kota Sibolga	Dinas Perikanan, Kelautan dan Ketahanan Pangan
			Pertumbuhan Ekonomi	75,38	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan	100	Menunjang	Realisasi Capaian indicator program 100 % sesuai dengan target yang ditetapkan 100 %	Bappeda/Perindag
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian dan stabilitasi harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting	100	Menunjang		
			Gini Ratio	60,37	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase pencapaian indicator kota terhadap pembangunan	100	Menunjang	Tidak ada program/kegiatan penunjang (hanya rilis BPS)	Bappeda/BPS
			Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)	103,28	-			-	Tidak ada program /kegiatan penunjang (hanya rilis BPS)	Bappeda/BPS
PDRB Perkapita (Ribu)	99,65	-			-	Tidak ada program/ kegiatan penunjang (hanya rilis BPS)	Bappeda/BPS			



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN (%)	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG	ANALISIS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	83,78	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Penduduk yang mendapatkan pelayanan jaminan sosial	100	Menunjang	Angka kemiskina di Kota Sibolga masih sangat tinggi, namun jika kita melihat dari data, bahwa angka kemiskinan dikota Sibolga mengalami penurunan, oleh karena itu Program Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan salah satu program untuk penanggulangan kemiskinan disampaing program lain seperti pemberdayayn ekonomi dan pelatiah ketrampilan dan akses modal bagi pelaku usaha miikro dan kecil.	Bappeda/BPS
			Angka Pengangguran	132,60	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan	100	Menunjang	Pembekalan ketrampilan bagi bagi pencari kerja salah satu usaha pemerintah Kota Sibolga untuk memberikan bekal bagi pencari kerja,maupun bagi yang ingin membangun usaha mengingat keterbatasan lapangan kerja yang tersedia di Kota Sibolga.	Bappeda/BPS



MISI 1 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAH YANG GOOD GOVERNANCE DENGAN TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Tujuan : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang responsif dan akuntabel

1. Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi sendiri adalah skor pengukuran capaian reformasi birokrasi dengan sekitar 132 komponen, mulai dari manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga nilai persepsi korupsi yang melibatkan survei eksternal. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kota Sibolga tidak berjalan dengan baik dengan berbagai kendala dan hambatan. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama strategis Indeks Reformasi Birokrasi dari tahun 2021 - 2024, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III.3 Target Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sibolga Tahun 2021 – 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian	
2021	C	C	42,54	Tercapai
2022	B	C	45,96	Tidak tercapai
2023	B	C	47,44	Tidak tercapai
2024	B	CC	56,88	Tidak tercapai

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sibolga tahun 2024 belum mencapai target, dimana capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi adalah CC dari target adalah B, walaupun dari persentase nilai pencapaian mengalami peningkatan dari tahun ketahun. Untuk mencapai target indikator kinerja ini terdapat hambatan/kendala sebagai berikut:

1. Belum tersedia dokumen perencanaan tentang RB seperti ROAP MAP RB;
2. Penetapan target atas kegiatan utama belum sepenuhnya berdasarkan baseline tahun sebelumnya;
3. Penyusunan renaksi yang belum berupa intervensi terhadap prioritas permasalahan utama dan belum relevan untuk mencapai target kegiatan utama;
4. Belum sepenuhnya SDM memiliki kemampuan untuk penyusunan dokumen RB.



Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target indikator Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Sibolga adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan kegiatan pendampingan penguatan RB kepada OPD dengan menghadirkan Tim Ahli dari Smard ID untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam penyusunan dokumen RB.
- b. Menyusun Tim Reformasi Birokrasi Kota Sibolga tiap tahunnya dan Tim Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah dan melibatkan semua pihak.
- c. Membangun komitmen melalui pimpinan agar indeks Reformasi Birokrasi menjadi perhatian bersama dengan mengalokasikan program kegiatan yang mendukung Indeks Reformasi pada Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sibolga.

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparat sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak lainnya. Sebagaimana diatur melalui Perpres No. 98 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

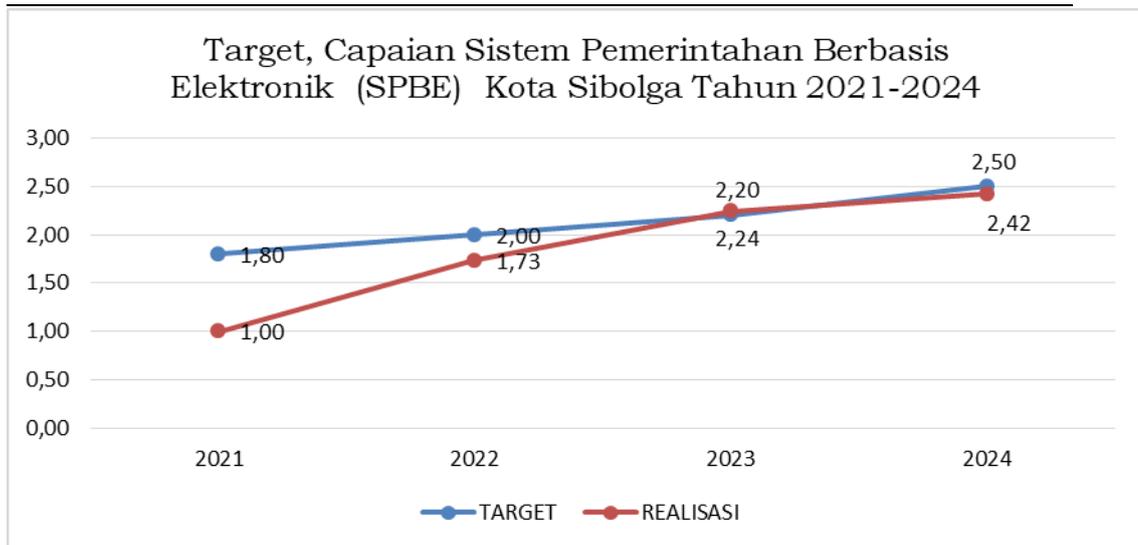
Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan indikator kinerja utama yang menjadi salah satu target utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama strategis Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari tahun 2021 - 2024, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III.4 Target, Capaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Kota Sibolga Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	1,80	1	Tidak tercapai
2022	2,00	1,73	Tidak tercapai
2023	2,20	2,24	Tercapai
2024	2,50	2,42	96,8%

Sumber : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Sibolga tahun 2024 tidak mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar 2,42 atau 96,8 % dari target sebesar 2,50.

Untuk mencapai target indikator kinerja ini terdapat hambatan/kendala sebagai berikut:

1. Kurangnya komitmen pimpinan OPD dalam memanfaatkan media SPBE untuk mempublikasikan seluruh Program /Kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan
2. Petugas operator (JR) pada sebagian OPD belum terbentuk berdasarkan Surat Keputusan atau Surat Perintah Tugas

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian target indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kota Sibolga adalah memberdayakan tenaga paruh waktu pada Dinas Kominfo Kota Sibolga untuk menjadi petugas operator sementara pada Perangkat Daerah yang tidak memiliki petugas operator.

3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.



Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mendorong Instansi fokus pada Pencapaian Sasaran. Dalam upaya Pencapaian Sasaran perlu sebuah Alat Ukur yang dinamakan Indikator Kinerja. Indikator kinerja berupa :

- Hasil (*Outcome*) :
- Keluaran (*Output*) :

Penilaian indikator pelaporan AKIP menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.

Pelaksanaan Penilaian AKIP dilingkungan Pemerintah didasarkan oleh indikator yang telah ditetapkan di RPJMD Kota Sibolga dan memuat target-target yang harus di capai perangkat daerah yang menjadi sebagai target capaian Pemerintah Kota Sibolga. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator sasaran utama strategis Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dari tahun 2021 - 2024, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III.5
Target , Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi		Capaian
2021	B	CC	53,29	Tidak Tercapai
2022	B	CC	53,51	Tidak Tercapai
2023	B	CC	54,60	Tidak tercapai
2024	B	CC	56,77	Tidak tercapai

Sumber : Sekretariat Daerah Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga dari tahun 2021 sampai dengan 2024 belum pernah mencapai target walaupun dari capaian mengalami peningkatan setiap tahun, seperti tahun 2024 capaian Indeks Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Kota Sibolga



adalah CC dari target adalah B. Penyampaian laporan AKIP Kota Sibolga dan Perangkat Daerah tiap tahun rutin dilaksanakan, termasuk penyampaian hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Laporan AKIP, perjanjian kinerja perangkat daerah dan hal-hal yang menjadi dokumen pelaporan.

Dalam mencapai target indikator tersebut, komitmen dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD sangatlah penting untuk mewujudkan laporan laporan AKIP Kota Sibolga menjadi lebih baik. Namun dalam pelaksanaan masih terdapat masalah/kendala yang dihadapi yaitu masih terdapat kelemahan dalam dokumen antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja :
 - a. PK belum disampaikan secara lengkap
 - b. Penjenjangan kinerja belum sepenuhnya terlihat proses kinerja antara level jabatan secara berjenjang
 - c. Indikator Kinerja PK Pemko yang belum memenuhi kriteria SMART
 - d. Indikator Kinerja OPD belum terukur dan rencana aksi OPD yang belum memuat penjabaran target triwulan
 - e. Terdapat sasaran strategis dan Indikator OPD belum berorientasi hasil.
 - f. Renaksi yang disusun OPD
2. Pengukuran Kinerja:
 - a. IKU OPD belum lengkap dengan defenisi dan formula
 - b. Aplikasi e-sakip belum dimanfaatkan dengan maksimal
 - c. Belum sepenuhnya melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang
 - d. Hasil pengukuran kinerja belum dipergunakan sebagai dasar pengambilan keputusan
3. Pelaporan :
 - a. Laporan Kinerja Pemda dan OPD belum dipublikasikan
 - b. Laporan Kinerja OPD kurang memadai
 - c. Informasi dalam laporan OPD belum sepenuhnya dipergunakan untuk perbaikan tahun berikutnya
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal :
 - a. LHE belum menggambarkan kondisi sebenarnya
 - b. LHE belum menyajikan rekomendasi yang cukup
 - c. OPD belum memanfaatkan hasil LHE dari inspektorat untuk meningkatkan kinerja.

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Sibolga untuk mengatasi kendala diatas meningkatkan nilai dan kualitas laporan AKIP yaitu :



1. Membangun kerja sama TIM SAKIP Kota Sibolga, antara Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Bagian Organisasi.
2. Penguatan SAKIP Kota Sibolga, Pedoman Penyusunan SAKIP Kota Sibolga dan Pemberian Reward dan Punishment oleh Inspektorat Kota Sibolga.
3. Melaksanakan kegiatan pendampingan penguatan SAKIP kepada seluruh OPD dengan menghadirkan TIM Ahli dari SMARTID guna menambah pengetahuan OPD untuk meningkatkan kualitas SAKIP Pemerintah Sibolga.

4. Indeks Kepuasan Masyarakat

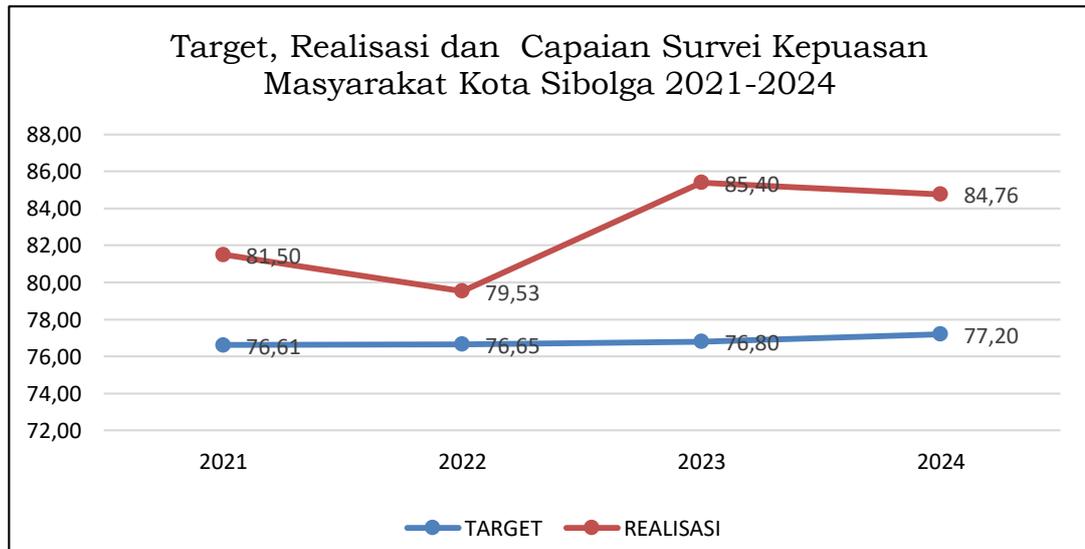
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka.

Untuk mengukur indikator menggunakan nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kota Sibolga Tahun 2024 yang merupakan nilai rata-rata nilai Survei Kepuasan Masyarakat yang dilaksanakan sekali setahun. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Survei Kepuasan Masyarakat dari 2021 - 2024, dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III.6
Target, Realisasi dan Capaian Survei Kepuasan Masyarakat Kota Sibolga
Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	76,61	81,50	106,38%
2022	76,65	79,53	103,75%
2023	76,80	85,40	111,197%
2024	77,20	84,76	109,79%

Sumber : SKM Kota Sibolga Tahun 2024 Bagian Organisasi Setdakot



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Survei Kepuasan Masyarakat Kota Sibolga tahun 2024 dapat mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 84,76 atau 109,79% dari target sebesar 77,20. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 84,76, merupakan nilai rata-rata dari 30 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, yang berarti mutu pelayanan masuk dalam kategori baik dan dari 9 usur pelayanan publik yang diukur oleh 30 Perangkat Daerah yang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat, rata-rata unsur yang diukur masuk dalam Kategori Baik. Namun dari keberhasilan tersebut jika dibandingkan dari capaian tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar 0,64. Adapun faktor yang mengakibatkan penurunan yaitu terdapat 5 Perangkat Daerah yang mengalami penurunan indeks kepuasan masyarakat, sehingga perlu ditingkatkan lagi untuk tahun-tahun mendatang.

5. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

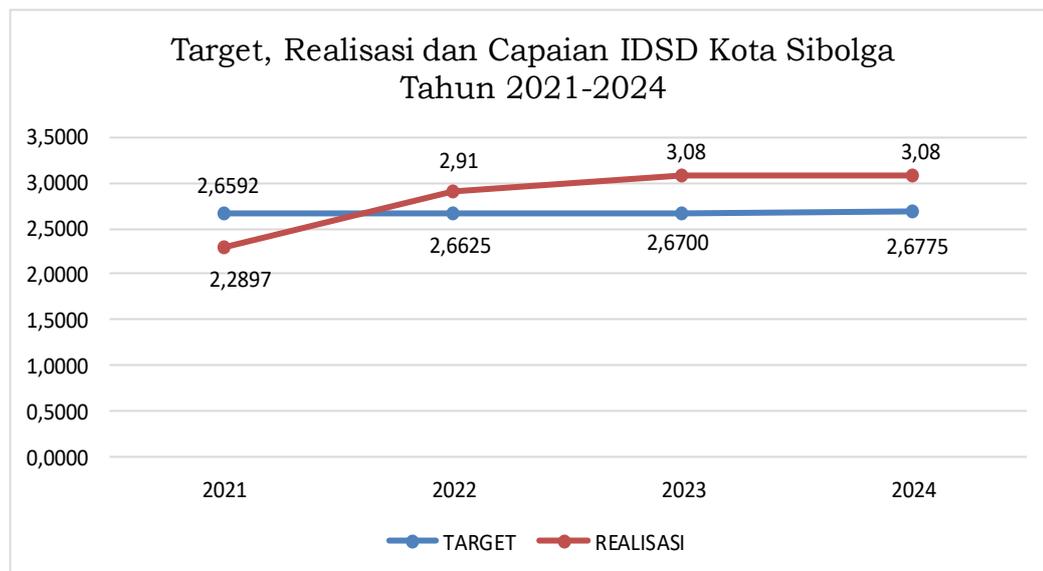
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Untuk mengukur indikator ini menggunakan 4 faktor penilaian dengan 12 pilar turunan penilaian yaitu lingkungan pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar dan Ekosistem Inovasi. Perbandingan antara target, realisasi dan capaian indikator sasaran utama Indeks Daya Saing Daerah Kota Sibolga dari tahun 2021 - 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :



Tabel III.7 Target, Realisasi dan Capaian IDSD Kota Sibolga
Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	2,6592	2,28973	86,10%
2022	2,6625	2,91	109,29%
2023	2,6700	3,08	115,35%
2024	2,6775	3,08	115,03%

SUMBER : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SIBOLGA





Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Daya Saing Kota Sibolga tahun 2024 dapat mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) sebesar 3,08 atau 115,03% dari target sebesar 2,6775.

Adapun penyebab Keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja ini adalah adanya peningkatan nilai pada Pilar 1 antara lain:

- a. Menurunnya angka kriminalitas
- b. Meningkatnya transparansi pengelolaan keuangan
- c. Meningkatnya infrastruktur jalan
- d. Meningkatnya institusi kelembagaan

6. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas tata kelola keuangan daerah. IPKD ditetapkan berdasarkan dimensi dan indikator tertentu meliputi :

- Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
- Kualitas anggaran belanja dalam APBD
- Transparansi pengelolaan keuangan daerah
- Penyerapan anggaran
- Kondisi keuangan daerah
- Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Pada penilaian tahun 2024, Kota sibolga mengalami perubahan pada klaster dari kategori keuangan rendah menjadi kategori sedang namun masih dalam taraf perlu perbaikan. Indikator yang paling mempengaruhi penurunan hasil ada pada dimensi 6, karena opini Keuangan dari WTP menjadi WDP. Pencapaian antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III.8

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sibolga Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	0,70	0,60	85,71

Sumber : Badan Perencana Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2024 dapat mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,60 atau 85,71% dari target sebesar 0,70. Perbandingan data capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah baru dijadikan indikator Pemko Sibolga tahun 2024 sehubungan adanya penyederhanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sibolga yang sebelumnya adalah indikaor Akuntabilitas Pengelola Keuangan Daerah.

Upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Sibolga untuk meningkatkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu :

- a. Melakukan evaluasi dan tindaklanjut
- b. Memanfaatkan SPBE untuk upload dokumen sebagai wujud keterbukaan Informasi dan Pemerintahan yang transparan

7. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah.

Sedangkan penilaian Inovasi Daerah adalah proses penilaian terhadap semua bentuk Inovasi Daerah menggunakan indikator indeks Inovasi Daerah. Data Indeks Inovasi Daerah merupakan dokumen yang memberikan informasi dan data terkait pelaksanaan Inovasi Daerah yang telah berhasil dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pencapaian antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Indeks Inovasi Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III.9

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sibolga Tahun 2024.

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	Inovatif	Inovatif (38,64)	tercapai

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Inovasi Daerah Kota Sibolga Daerah tahun 2024 dapat mencapai target yang ditetapkan dimana realisasi indikator Indeks Inovasi Daerah tahun 2024 adalah sebesar 38,64 (inovatif) dari target adalah Inovatif. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh adanya Penguatan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sibolga, Dinas Sosial Kota Sibolga, Rumah Sakit FL. Tobing Kota Sibolga dan Dinas Kesehatan Kota Sibolga untuk membuat Inovasi Pelayanan. Untuk perbandingan data capain Indeks Indeks Inovasi Daerah tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Inovasi Daerah baru dijadikan indikator Pemko Sibolga tahun 2024 sehubungan adanya penyederhanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sibolga.

MISI 2 : Mewujudkan dan Meningkatkan kesehatan masyarakat serta pelayanan sehingga dapat melahirkan masyarakat yang cerdas, menuju masyarakat yang makmur

Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat

Sasaran : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

8. Indeks Kesehatan Masyarakat

Indeks Kesehatan adalah ukuran yang menunjukkan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan angka harapan hidup kesehatan fisik, mental dan infrastruktur kesehatan. Pengukuran indeks kesehatan bertujuan untuk adalah mengukur kualitas hidup, menunjukkan bagaimana kesehatan seseorang berubah seiring waktu, menunjukkan, menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan kesehatan, membantu membuat keputusan terkait kesehatan dalam skala besar dan atau komunitas dan menunjukkan area yang memerlukan perbaikan. Pencapai antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Indeks Kesehatan Masyarakat Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel III. 10

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kesehatan Masyarakat Kota Sibolga Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	98	100	102,04

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa indikator kinerja Indeks Kesehatan Masyarakat Kota Sibolga tahun 2024 dapat mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Kesehatan Masyarakat sebesar 100 (111,11 dari target sebesar 98. dengan kata lain bahwa indeks pembangunan kesehatan masyarakat mengalami kemajuan. Data Indeks Kesehatan masyarakat dapat diipergunakan sebagai alat untuk memantau dan mengevaluasi keberhasilan pembangunan kesehatan di Kota Sibolga dan data tersebut juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menetapkan kebutuhan dan arah pembangunan kesehatan di Kota Sibolga pada tahun berikutnya. Perbandingan data capain Indeks Kesehatan Masyarakat tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Kesehatan Masyarakat baru dijadikan indikator Pemko Sibolga tahun 2024 sehubungan adanya penyederhanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sibolga, indikator sebelumnya adalah Indeks Pembangunan Manusia, Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Balita, Prevalansi Wasting pada Balita, Prevalansi Angka Stanting, Kualitas Makanan dan Minuman, Penanganan Penyakit Tidak Menular, Ketersediaan Alat Kesehatan sesuai dengan Standar, Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk, Puskesmas Menjadi Blud, Kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Demi mencapai target Indeks Kesehatan di Kota Sibolga tahun 2024, Pemerintah telah melakukan beberapa kebijakan atau program antara lain :

1. Pembangunan kesehatan berwawasan lingkungan;
2. Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) di Kota Sibolga;
3. Menciptakan Kelurahan yang masyarakatnya berperilaku sehat;
4. Menyiapkan petugas kesehatan yang siap siaga;
5. Fasilitas jaminan Kesehatan untuk meringankan biaya pengobatan yang berkesinambungan di Kota Sibolga.

MISI III : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG PROPORSIONAL BERBASIS JUMLAH PENDUDUK UNTUK MENATA PEMUKIMAN WARGA AGAR TERCIPTANYA LINGKUNGAN YANG SEHAT DAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG TERANG DENGAN MEMANFAATKAN TATA RUANG YANG BERWAWASAN KOTA PINTAR (SMART CITY)

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan

Sasaran 1 : Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup



9. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana Indonesia adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian di wilayah Indonesia. Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap kabupaten/kota di Indonesia.

Indeks Risiko Bencana (IRB) ini dapat dihitung berdasarkan rumus berikut :

$$R \approx H * \frac{V}{C}$$

Dimana :

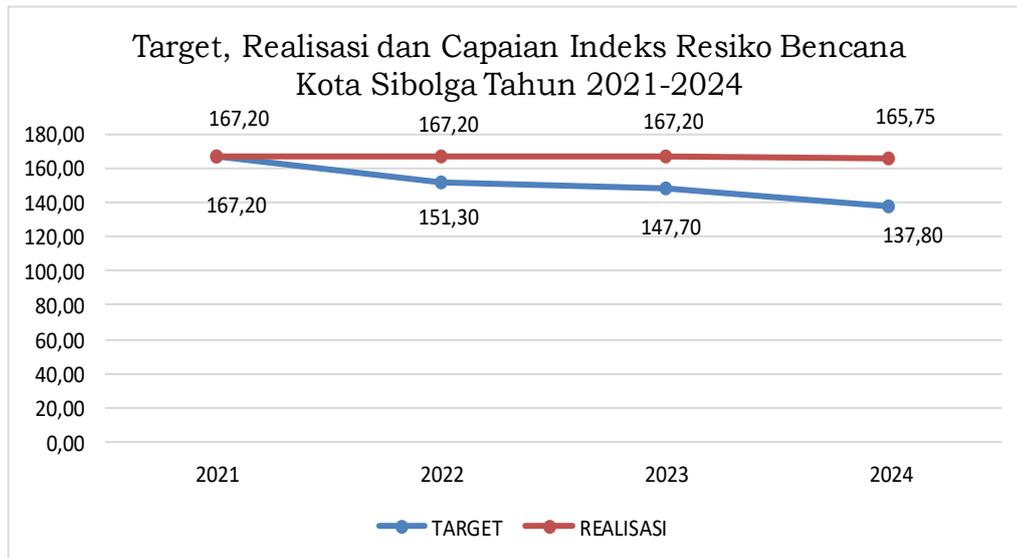
- R = Tingkat Resiko Bencana
- H = Indeks Bahaya
- V = Indeks Kerentanan
- C = Indeks Kapasitas

Di mana hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. *Vulnerability* (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. *Capacity* (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh indikator/prioritas yaitu: (1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Indeks Resiko Bencana dari tahun 2021-2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.11
Target, Realisasi dan Capaian Indeks Resiko Bencana Kota Sibolga
Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	167,20	167,20	100%
2022	151,30	167,20	89,49%
2023	147,70	167,20	86,80%
2024	137,80	165,75	79,72%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tahun 2024 indikator kinerja Indeks Resiko Bencana tidak dapat mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Resiko Bencana adalah 165,92 dari target sebesar 137,80. Walaupun Indeks Resiko Bencana tahun 2024 tidak dapat mencapai target akan tetapi dari data diatas dapat kita lihat juga bahwa dari tahun 2021 sampai tahun 2024 Pemko Sibolga mampu menurunkan Indeks Resiko Bencana. Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Sibolga sehingga yang mengakibatkan tidak tercapainya target Indeks Resiko Bencana yaitu :

1. Belum tersedianya dokumen-dokumen kebencanaan yang mendukung penilaian Indeks Kepastian Daerah yang dapat memengaruhi nilai Indeks Resiko Bencana ;
2. Keterbatasan sarana prasana informasi dan sosialisasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat;
3. Belum terbentuknya penguatan kawasan seperti forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB)

Solusi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

Tetap melaksanakan kegiatan seperti Pengkajian risiko bencana dan perencanaan terpadu, Penanganan tematik kawasan rawan bencana, Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta Pengembangan sistem pemulihan bencana di Kota Sibolga dengan



keterbatasan sarana prasarana pendukung yang tersedia.

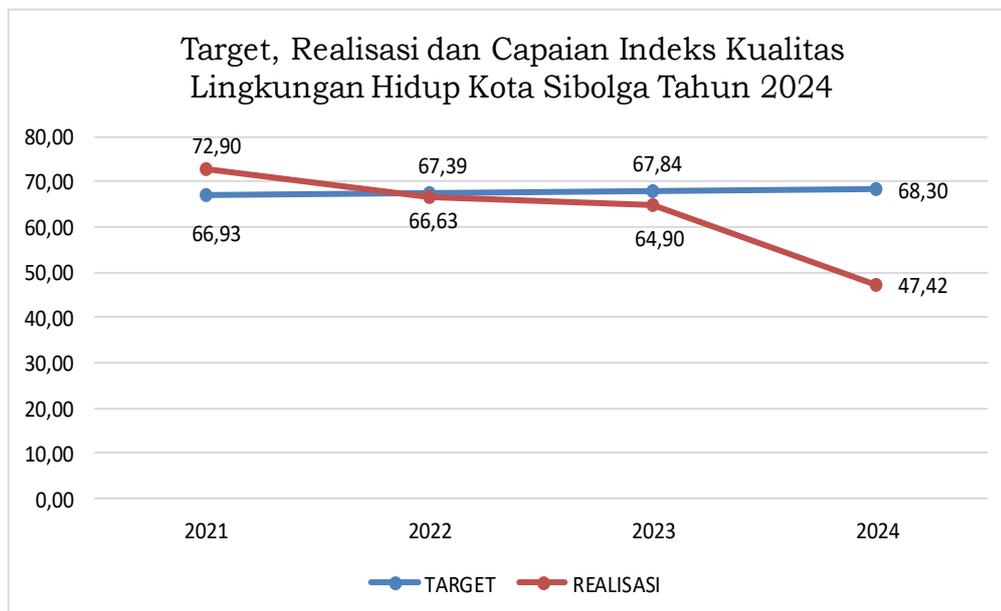
10. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama indeks kualitas lingkungan hidup dari tahun 2021-2024, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.12
Target, Realisasi dan Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sibolga Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	66,93	72,90	108,91%
2022	67,39	66,63	98,08%
2023	67,84	64,90	95,67 %
2024	68,30	47,42	69,43 %

Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Sibolga





Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Sibolga tahun 2024 tidak mencapai target. dimana realisasi indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup adalah 47,92 atau 69,43% dari target sebesar 68,30. Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan capaian nilai Indeks Lingkungan Hidup Tahun 2024 terdapat 3 komponen, dimana salah satu komponen yaitu Indeks Kualitas Air tidak memiliki nilai (0) akibat tidak tersedia anggaran untuk melakukan uji laboratorium analisa/pengujian kualitas air sungai dan laut sehingga mengurangi akumulasi nilai secara keseluruhan.
- b. Proses pengolahan data pemetaan untuk nilai Indeks Kualitas Lingkungan membutuhkan waktu kajian yang dan peninjauan lapangan yang cukup kompleks.

Solusi untuk menyelesaikan permasalahan perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) :

1. Mengupayakan agar anggaran analisa/pengujian kualitas air sungai dan laut dapat tersedia.
2. Melakukan koordinasi dengan pusat pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera untuk mempercepat proses pengolahan data pemetaan.

Tujuan : Mewujudkan Pembangunan Kawasan yang Berkelanjutan

Sasaran 2 : Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung performa wilayah

11. Indeks Infrastruktur

Indeks infrastruktur daerah adalah salah satu komponen indeks pembangunan daerah yang menilai kinerja kota/kabupaten berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada pasilitas-pasilitas mendasar. Pencapai antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Indeks Infrastruktur Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut :



Tabel III.13
Target, Realisasi dan Capaian Indeks Infrastruktur
Kota Sibolga Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	70	77,75	111,07 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa tahun 2024 indikator kinerja Indeks Infrastruktur Kota Sibolga mencapai target dimana realisasi indikator Indeks Infrastruktur 77,75 atau 111,07% dari target sebesar 70. Keberhasilan pencapaian ini didukung oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Berkurangnya panjang jalan yang rusak berat dan rusak ringan dari 23,19 KM menjadi 20,09 KM.
2. Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum.

MISI IV : MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS, MEMBERIKAN SUBSIDI PENUH TERHADAP KEBUTUHAN BELAJAR 9 TAHUN DAN MEMBERIKAN BEASISWA BAGI SISWA BERPRESTASI UNTUK MELANJUTKAN STUDI KE PERGURUAN TINGGI, SERTA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN GURU

Tujuan : Mewujudkan Pendidikan Berkualitas

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat

12. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Melalui pendekatan tiga dimensi dasar yang mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan layak. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan.

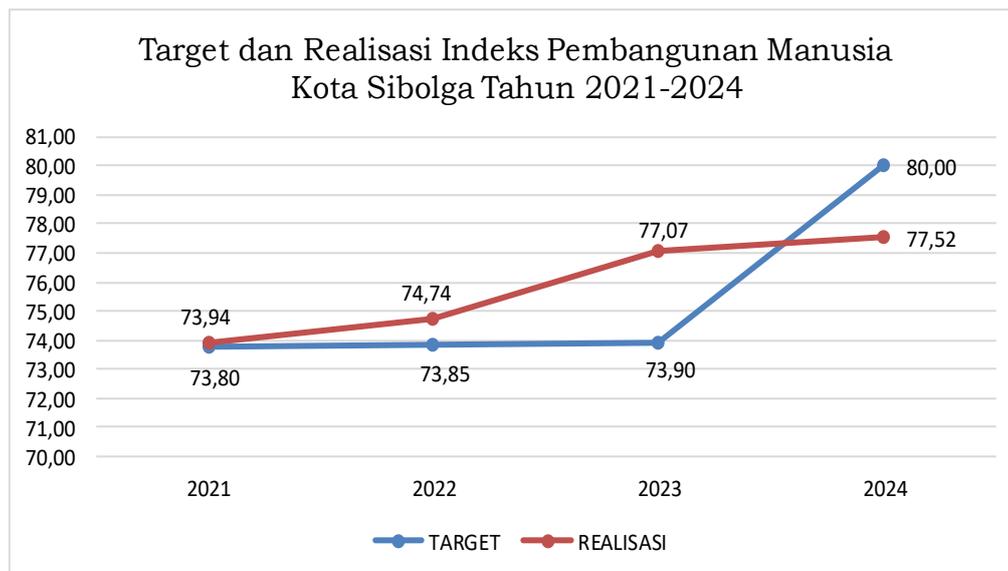


Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2021-2024, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.14
Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Sibolga
Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	73,80	73,94	100,18%
2022	73,85	74,74	101,20%
2023	73,9	77,07	104,29%
2024	80	77,52	96,90%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian indeks Pembangunan Manusia dari tahun 2021-2023 selalu mencapai target baik dari capaian target maupun realisasi target itu sendiri, namun tahun 2024 realisasi indikator Indeks Pembangunan Manusia tidak mencapai target dimana realisasi indikator Indeks Pembangunan Manusia adalah 77,52 atau 96,90% dari target sebesar 80. Walaupun tidak mencapai target yang ditentukan, namun ada perbaikan persentase capaian Indeks rata-rata sekolah dan rata-rata lama sekolah di Kota Sibolga dan tercapainya target Indeks Kesehatan pada tahun 2024 di Kota Sibolga.



Untuk mengatasi hambatan/kendala dalam pencapaian target, Pemerintah Kota Sibolga melakukan upaya untuk memberdayakan akses pendidikan paket C dan Paket B bagi masyarakat Kota Sibolga yang putus sekolah.

13. Indeks Pendidikan

Pendidikan merupakan komponen utama kesejahteraan dan digunakan dalam mengukur pembangunan ekonomi dan kualitas hidup yang merupakan faktor kunci yang menentukan apakah suatu negara merupakan negara maju, berkembang, atau terbelakang. Indeks Pendidikan dikur dengan menggabungkan rata-rata tahun sekolah orang dewasa dengan perkiraan tahun sekolah untuk siswa dibawah umur 25 tahun yang masing-masing diberi bobot. Pencapai antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Indeks Pendidikan Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III.15
Target, Realisasi dan Capaian Indeks pendidikan Kota Sibolga Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	14,13	13,78	97,52 %

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2024 indikator kinerja Indeks Pendidikan Kota Sibolga tidak mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Pendidikan adalah 13,78 atau 97,52% dari target sebesar 14,13. Adapun penyebab ketidakberhasilan pencapaian target pada Tahun 2024 adalah berkurangnya persentase lama sekolah dan harapan lama sekolah di Kota Sibolga akibat faktor ekonomi dan keterbatasan Perguruan Tinggi dan Swasta yang ada di Kota Sibolga. Adapun upaya yang dilakukan adalah Pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Pendidikan mengoptimalkan program Paket C dan program beasiswa kepada anak kurang mampu yang memiliki prestasi demi meningkatkan persentase lama sekolah di Kota Sibolga.

Untuk perbandingan data capaian Indeks Pendidikan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Pendidikan baru dijadikan indikator Pemko Sibolga tahun 2024 sehubungan adanya penyederhanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sibolga, dimana sebelumnya indikator yang dipergunakan adalah Rata-rata Sekolah dan Harapan Lama Sekolah.



MISI 5 : MEMBUKA LAPANGAN KERJA DAN PELUANG BERUSAHA DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG EKONOMI DAN KEWIRUSAHAAN SERTA MENJALIN KERJASAMA DENGAN PELAKU EKONOMI LAINNYA DI KOTA SIBOLGA MAUPUN DI LUAR KOTA SIBOLGA

Tujuan : Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatnya pendapatan masyarakat

14. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks ketahanan pangan adalah alat mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dalam memenuhi urusan wajib pemerintah, dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan daerah dan prioritas intervensi program. Secara khusus, penyusunan IKP Nasional dilakukan dengan tujuan mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah kabupaten/kota dan provinsi, serta memberikan gambaran peringkat (ranking) pencapaian ketahanan pangan wilayah kabupaten/kota dan provinsi dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota dan provinsi lain. IKP yang disusun diharapkan dapat digunakan sebagai dasar saat melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Pencapaian antara target, realisasi dan capaian pada indikator sasaran utama Indeks Ketahanan Pangan Daerah Kota Sibolga Tahun 2024 dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel III.16

Target, Realisasi dan Capaian Indeks Ketahanan Pangan Kota Sibolga Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	80	81,03	101,29%

Sumber : Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dari Tahun 2024 indikator kinerja Indeks Ketahanan Pangan Kota Sibolga dapat mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Ketahanan Pangan sebesar 81,03 atau 101,29% dari target sebesar 80. Hal ini dapat dilihat dari Hasil Survei/Penelitian dari Kementerian Pertanian bahwa :



1. Peta ketersediaan dan kerentanan pangan Kota Sibolga telah menunjukkan Daerah Hijau.
2. Bahwa Akses ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan cukup baik di Kota Sibolga.

Perbandingan data capaian Indeks Ketahanan Pangan tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena Indeks Ketahanan Pangan baru dijadikan indikator Pemko Sibolga Tahun 2024 sehubungan adanya penyederhanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sibolga, sedangkan indikator sebelumnya adalah indikaor Pola Pangan Harapan (PPH).

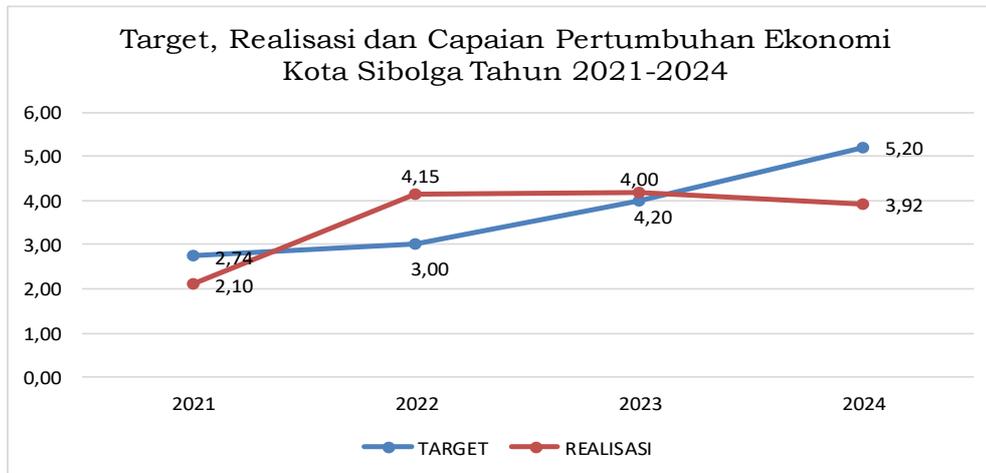
15. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data [produk domestik bruto](#) (PDB) atau pendapatan output perkapita. Penyediaan Akomodasi makan dan minum serta perdagangan Besar dan Eceran menjadi penyumbang besar dalam pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi terbesar dalam PDRB Kota Sibolga. Dalam pencapaian target, capaian Indeks Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga, perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Pertumbuhan Ekonomi dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.17
Target, Realisasi dan Capaian Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sibolga Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	2,74	2,10	76,6%
2022	3,00	4,15	138,3%
2023	4,00	4,20	105%
2024	5,20	3,92	75,38%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga/Badan Pusat Statistik



Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Indeks Pertumbuhan Ekonomi Kota Sibolga tahun 2024 tidak mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Pertumbuhan Ekonomi adalah 3,92 atau 75,38% dari target sebesar 5,20. Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan kemampuan keuangan Pemerintah Kota Sibolga dalam menumbuhkembangkan sektor usaha- usaha baru seperti pengembangan sektor wisata.

16. Gini Rasio

GINI RASIO adalah menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi. Rentang skor 0 - 1. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama Gini Rasio dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.18
Target, Realisasi dan Capaian Gini Rasio Tahun Kota Sibolga 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	0,280	0,276	101,43%
2022	0,2760	0,3460	74,64%
2023	0,2740	0,2460	110,22%
2024	0,270	0,377	60,37%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga

Dari tabel dapat kita lihat bahwa capaian Indikator Gini Rasio Kota Sibolga tidak konsisten, Tahun 2024 indikator Gini Rasio tidak mencapai target, dimana realisasi indikator Indeks Gini Rasio adalah 0,377. Adapun penyebab ketidakberhasilan pencapaian target adalah semakin merata perbandingan masyarakat antara masyarakat kelas atas, dengan masyarakat kelas menengah dan masyarakat kelas bawah di Kota Sibolga. Adapun upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditentukan adalah Pemerintah Kota Sibolga memperkuat pertumbuhan Usaha mikro dan Kecil demi memperkuat pertumbuhan ekonomi.

17. Pendapatan Perkapita Penduduk (Juta)

Pendapatan Per Kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama angka pendapatan perkapita penduduk dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel III.19
Target, Realisasi dan Capaian Pendapatan Per Kapita Penduduk (Juta) Kota Sibolga
Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	64,32	64,46	100,22%
2022	66,12	n/a	n/a
2023	67,92	74,74	110,04%
2024	69,72	72,01	103,28

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Tahun 2024 indikator kinerja Indeks Pendapatan Per Kapita Penduduk Kota Sibolga mencapai target. Adapun faktor pendukung keberhasilan pencapaian target ini adalah semakin banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang tumbuh di Kota Sibolga berdasarkan data pada Dinas Perizinan Kota Sibolga.

18. PDRB Perkapita (Rupiah)

Produk domestik regional bruto merupakan data statistika atas pertumbuhan atau tingkat pendapatan masyarakat yang merangkum keseluruhan akibat kegiatan ekonomi yang berupa perubahan nilai tambah selama periodewaktu tertentu disatu wilayah. PDRB juga sebagai alat menjadikan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi.

Tabel III.20
Target, Realisasi dan Capaian PDRB Perkapita (Juta) Kota Sibolga Tahun 2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2024	78.765,20	78.494,11	99,65

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa Tahun 2024 indikator kinerja PDRB Perkapita Kota Sibolga tidak mencapai target, dimana realisasi indikator PDRB Perkapita Pemerintah Kota Sibolga adalah 78.494,11 atau 99,65% dari target sebesar 78.765,20. Perbandingan data capaian PDRB Perkapita tahun sebelumnya tidak dapat disajikan karena PDRB Perkapita baru dijadikan indikator Pemerintah Kota Sibolga



Tahun 2024, sehubungan adanya penyederhanaan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Sibolga.

Tujuan : Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi

Sasaran 2 : Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin

19. Angka Kemiskinan

Angka kemiskinan adalah persentase penduduk di suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan kemiskinan menunjukkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah.

Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama Angka Kemiskinan dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.21
Target, Realisasi dan Capaian Angka Kemiskinan
Kota Sibolga Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	11,90	12,33	96,39%
2022	11,00	11,47	95,73%
2023	10,00	10,05	99,5%
2024	9,80	11,39	83,78%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga





Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa angka kemiskinan dikota Sibolga tahun 2024 tidak mencapai target, dimana realisasi indikator Angka Kemiskinan sebesar 11,39 dari target 9,80. Adapun faktor penyebab ketidakberhasilan pencapaian target adalah keterbatasan Sumber Daya Alam (SDA) dan Perbandingan lapangan pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang ada di Kota Sibolga.

Pemerintah Kota Sibolga telah berupaya untuk menurunkan angka kemiskinan dengan melakukan program-program penanggulangan kemiskinan antara lain :

- a. Program perlindungan sosial berbasis individu, keluarga dalam rangka pemenuhan hak dasar.
- b. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan kelompok masyarakat.
- c. Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayann usaha mikro dan kecil.
- d. Program lain yang secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

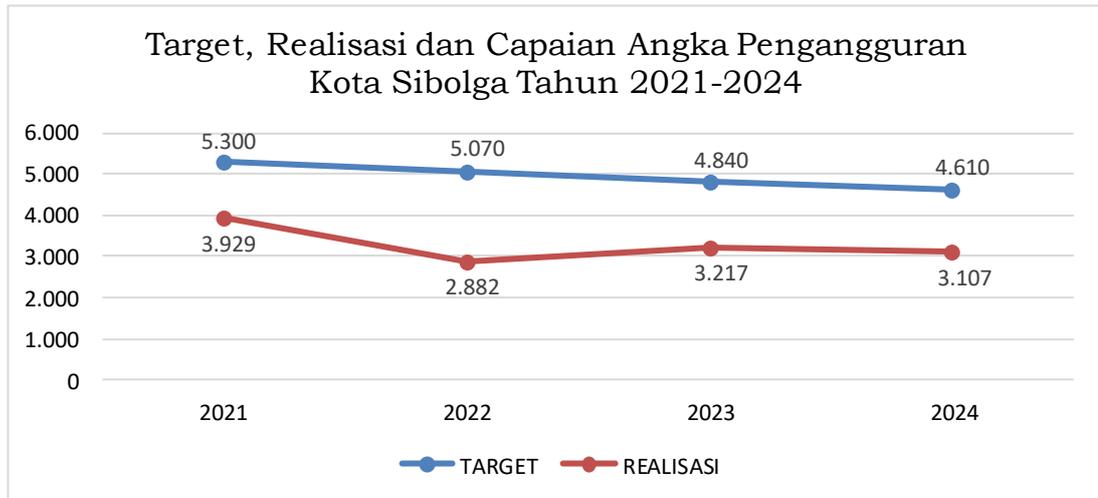
20. Angka Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Perbandingan antara target dan realisasi indikator kinerja utama angka pengangguran dari tahun 2021-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel III.22 Target, Realisasi dan Capaian Angka Pengangguran Kota Sibolga Tahun 2021-2024

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2021	5300	3929	125,87%
2022	5070	2882	143,15%
2023	4840	3217	133,53%
2024	4610	3107	132,60%

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sibolga



Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 angka pengangguran di Kota Sibolga mengalami penurunan baik dari segi capaian target dan realisasi. Seperti halnya tahun 2024 dimana realisasi indikator Angka Pengangguran adalah 3107 dari target sebesar 4610 jiwa. Adapun faktor pendukung pencapaian target ini adalah dengan keterbatasan keuangan Pemerintah Kota Sibolga, namun tetap berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro dan Kecil dan upaya memberikan pelatihan bagi tenaga pra pencari kerja.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kinerja yang dihasilkan Pemerintah Kota Sibolga selama tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan berbagai program, baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum untuk pencapaian indikator – indikator kerja masing-masing berjalan dengan baik dengan walaupun dengan keterbatasan dukungan anggaran tahun 2024 pada Perangkat Daerah yang terkait.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, terdapat 5 (lima) siklus utama yang wajib dilaksanakan terdiri dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengawasan dan pertanggungjawaban.

Era pembangunan berbasis kinerja bukan masalah bagaimana program/kegiatan sudah dilaksanakan atau belum dan seberapa besar realisasi serapan anggaran, melainkan bagaimana target sasaran strategis jangka menengah yang telah ditetapkan tercapai atau tidak sehingga pembangunan berbasis kinerja sesungguhnya merupakan upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.



Berikut ini disampaikan data besaran anggaran yang tersedia dan serapan anggaran dalam mendukung capaian indikator kerja pada masing-masing Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024.



TABEL B1.

f. Analisis Program dan Kegiatan yang mendukung Pencapaian Target Kinerja

No	Nama Program	Total		%	SISA ANGGARAN
		Anggaran	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	101.623.642.132	78.989.804.617	77,73	22.633.837.515
2	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	44.970.605.637	41.338.371.921	91,92	3.632.233.716
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	39.746.420.896	33.476.791.805	84,23	6.269.629.091
4	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	34.215.710.625	23.005.242.056	67,24	11.210.468.569
5	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.032.647.649	573.164.666	55,50	459.482.983
6	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	300.554.255	39.867.670	13,26	260.686.585
7	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	127.536.840	84.230.815	66,04	43.306.025
8	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.801.585.529	1.906.463.950	68,05	895.121.579
9	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.834.700	15.834.700	100,00	0
10	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.878.640.610	2.209.832.528	76,77	668.808.082
11	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	23.159.216	23.159.216	100,00	0
12	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	89.400.721.728	80.739.263.931	90,31	8.661.457.797
13	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	44.188.475.718	43.995.987.079	99,56	192.488.639
14	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.196.828.056	1.703.945.900	77,56	492.882.156
15	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	15.426.290	15.426.290	100,00	0



No	Nama Program	Total		%	SISA ANGGARAN
		Anggaran	Realisasi		
16	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.797.063.370	1.835.370.593	65,62	961.692.777
17	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	24.394.700	24.394.700	100,00	0
18	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.193.545.129	1.711.296.654	78,02	482.248.475
19	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	18.834.700	18.834.700	100,00	0
20	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.693.486.111	6.622.101.084	86,07	1.071.385.027
21	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	552.478.694	498.229.050	90,18	54.249.644
22	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.102.908.399	1.022.236.150	92,69	80.672.249
23	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.648.844.000	1.612.178.800	97,78	36.665.200
24	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	370.167.219	248.165.740	67,04	122.001.479
25	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.699.101.950	1.659.544.800	97,67	39.557.150
26	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	20.655.621.948	16.561.556.331	80,18	4.094.065.617
27	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.041.646.829	14.146.896.654	88,19	1.894.750.175
28	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	307.736.901	88.147.142	28,64	219.589.759
29	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	416.675.274	310.396.890	74,49	106.278.384
30	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.039.173.600	810.430.400	77,99	228.743.200
31	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.621.337.397	9.842.525.256	92,67	778.812.141
32	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	399.878.656	263.063.840	65,79	136.814.816
33	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	18.750.000	18.750.000	100,00	0
34	PROGRAM PENUNJANG	7.319.490.518	5.321.896.316	72,71	1.997.594.202



No	Nama Program	Total		%	SISA ANGGARAN
		Anggaran	Realisasi		
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
35	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	206.028.900	192.599.700	93,48	13.429.200
36	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.182.922.066	3.544.484.945	84,74	638.437.121
37	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.125.124.100	629.910.900	55,99	495.213.200
38	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	384.432.820	270.891.600	70,47	113.541.220
39	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	238.481.997	217.080.380	91,03	21.401.617
40	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	279.387.824	195.166.000	69,85	84.221.824
41	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	79.503.231	73.236.400	92,12	6.266.831
42	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	139.213.630	119.698.300	85,98	19.515.330
43	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	97.534.320	80.506.500	82,54	17.027.820
44	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	58.499.510	0	0,00	58.499.510
45	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	151.221.725	92.359.023	61,08	58.862.702
46	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	29.654.950	25.011.050	84,34	4.643.900
47	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	254.778.275	117.456.546	46,10	137.321.729
48	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	4.203.893.237	3.190.184.400	75,89	1.013.708.837
49	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	101.210.100	67.900.000	67,09	33.310.100
50	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	211.801.050	177.574.800	83,84	34.226.250
51	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	19.949.100	12.740.000	63,86	7.209.100
52	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK	51.419.300	38.338.000	74,56	13.081.300



No	Nama Program	Total		%	SISA ANGGARAN
		Anggaran	Realisasi		
	MASYARAKAT				
53	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	190.075.800	173.766.000	91,42	16.309.800
54	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.307.051.049	4.384.751.264	82,62	922.299.785
55	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	36.769.800	34.146.000	92,86	2.623.800
56	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	79.108.610	70.865.500	89,58	8.243.110
57	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	37.115.200	37.038.000	99,79	77.200
58	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	26.977.600	26.906.000	99,73	71.600
59	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.372.442.528	3.028.146.686	89,79	344.295.842
60	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	70.029.210	62.826.650	89,71	7.202.560
61	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	336.697.013	99.480.050	29,55	237.216.963
62	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.236.152.725	4.432.648.689	84,65	803.504.036
63	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.538.188.912	179.260.200	11,65	1.358.928.712
64	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	6.762.958.631	1.956.888.105	28,94	4.806.070.526
65	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.987.230.795	708.056.155	35,63	1.279.174.640
66	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.742.054.642	6.830.581.667	88,23	911.472.975
67	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	1.237.709.100	978.260.000	79,04	259.449.100
68	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	176.818.800	175.680.000	99,36	1.138.800
69	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.430.343.836	3.791.574.026	85,58	638.769.810
70	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	49.980.000	35.420.000	70,87	14.560.000
71	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	3.045.731.398	1.644.926.100	54,01	1.400.805.298
72	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.770.322.382	2.641.196.859	70,05	1.129.125.523



No	Nama Program	Total		%	SISA ANGGARAN
		Anggaran	Realisasi		
73	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	40.416.120	35.939.600	88,92	4.476.520
74	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	21.658.500	21.593.100	99,70	65.400
75	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	37.010.000	37.010.000	100,00	0
76	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	238.540.600	188.827.300	79,16	49.713.300
77	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.906.757.328	2.957.379.152	75,70	949.378.176
78	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	91.915.800	91.693.700	99,76	222.100
79	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	180.522.800	176.702.400	97,88	3.820.400
80	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	78.707.200	76.296.600	96,94	2.410.600
81	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	16.200.000	16.200.000	100,00	0
82	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.129.847.850	1.111.498.005	98,38	18.349.845
83	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	72.485.800	71.794.000	99,05	691.800
84	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	1.830.864.153	1.484.904.090	81,10	345.960.063
85	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	961.841.600	918.929.600	95,54	42.912.000
86	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	210.382.910	201.319.300	95,69	9.063.610
87	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	344.790.700	251.915.000	73,06	92.875.700
88	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.590.454.519	3.110.591.223	86,64	479.863.296
89	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.722.165.973	4.486.614.242	78,41	1.235.551.731
90	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	15.099.920	14.894.800	98,64	205.120
91	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	7.241.278.758	7.241.278.754	100,00	4
92	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.353.679.807	4.195.036.010	78,36	1.158.643.797
93	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI	260.463.048	252.875.800	97,09	7.587.248



No	Nama Program	Total		%	SISA ANGGARAN
		Anggaran	Realisasi		
	PARIWISATA				
94	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	117.742.300	117.437.200	99,74	305.100
95	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	102.285.290	101.969.090	99,69	316.200
96	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.913.117.628	2.408.435.845	82,68	504.681.783
97	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	1.481.412.677	1.471.319.900	99,32	10.092.777
98	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.706.068.293	7.403.611.386	76,28	2.302.456.907
99	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	583.596.550	534.814.829	91,64	48.781.721
100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	29.858.619.906	26.704.521.712	89,44	3.154.098.194
101	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	6.144.285.265	5.444.943.865	88,62	699.341.400
102	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	2.298.427.377	2.060.320.316	89,64	238.107.061
103	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	26.661.043.932	21.073.994.332	79,04	5.587.049.600
104	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	24.952.550.620	16.783.633.382	67,26	8.168.917.238
105	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.329.919.320	4.006.978.832	75,18	1.322.940.488
106	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	324.389.100	221.267.666	68,21	103.121.434
107	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	175.485.109	107.943.000	61,51	67.542.109
108	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	44.618.463.090	26.922.145.200	60,34	17.696.317.890
109	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	16.850.063.015	10.795.242.687	64,07	6.054.820.328
110	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.797.492.500	1.347.598.622	74,97	449.893.878
111	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	4.192.786.570	2.993.404.593	71,39	1.199.381.977
112	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	6.865.796.940	5.225.317.574	76,11	1.640.479.366



No	Nama Program	Total		%	SISA ANGGARAN
		Anggaran	Realisasi		
	DAERAH KABUPATEN/KOTA				
113	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.017.403.281	663.736.405	65,24	353.666.876
114	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	256.545.700	197.125.899	76,84	59.419.801
115	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.778.204.689	8.019.602.881	91,36	758.601.808
116	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	267.624.196	216.071.900	80,74	51.552.296
117	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	161.850.750	122.146.700	75,47	39.704.050
118	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.448.362.703	5.542.748.976	85,96	905.613.727
119	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	123.763.093	97.885.900	79,09	25.877.193
120	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	29.999.804	29.267.100	97,56	732.704
121	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	20.000.000	16.022.000	80,11	3.978.000
122	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	130.090.737	65,05	69.909.264
123	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	199.933.464	99,97	66.537
124	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	40.138.090	20,07	159.861.910
125	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	153.368.577	76,68	46.631.423
126	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	199.975.256	99,99	24.744
127	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.652.120.633	4.455.124.075	66,97	2.196.996.558
128	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	79.600.025	70.139.600	88,12	9.460.425
129	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	28.779.675	27.344.100	95,01	1.435.575
130	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	26.022.250	16.828.500	64,67	9.193.750



No	Nama Program	Total		%	SISA ANGGARAN
		Anggaran	Realisasi		
131	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	196.915.386	98,46	3.084.614
132	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	197.715.386	98,86	2.284.614
133	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	197.715.386	98,86	2.284.614
134	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	197.715.386	98,86	2.284.614
135	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.382.299.837	4.497.444.555	70,47	1.884.855.282
136	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	114.376.900	102.641.700	89,74	11.735.200
137	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	27.803.600	27.217.600	97,89	586.000
138	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	43.228.146	40.480.660	93,64	2.747.486
139	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	122.200.250	61,10	77.799.750
140	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	158.056.050	79,03	41.943.950
141	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	124.590.450	62,30	75.409.550
142	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	125.351.450	62,68	74.648.550
143	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.321.714.723	5.250.983.991	83,06	1.070.730.732
144	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	24.318.622	22.342.200	91,87	1.976.422
145	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	25.301.518	24.807.800	98,05	493.718
146	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	139.706.450	69,85	60.293.550
147	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	153.805.095	76,90	46.194.905
148	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	87.689.950	43,84	112.310.050



No	Nama Program	Total		%	SISA ANGGARAN
		Anggaran	Realisasi		
149	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	200.000.000	153.513.444	76,76	46.486.556
150	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.327.831.809	1.860.016.169	79,90	467.815.640
151	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	582.180.919	581.394.786	99,86	786.133
152	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	24.171.677.837	23.037.337.426	95,31	1.134.340.411
153	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	4.586.852.032	3.295.136.000	71,84	1.291.716.032
TOTAL		783.924.231.052	634.531.479.175	80,94	149.392.751.877





BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Tugas Pembantuan

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa yang dimaksudkan dengan Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan pemerintahan konkuren. Anggaran untuk melaksanakan Tugas Pembantuan disediakan oleh Kementerian/Lembaga. Selanjutnya penugasan oleh Pemerintah kepada Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan ditetapkan dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintah non kementerian. Dalam penyelenggaraan Tugas Pembantuan, daerah berhak menetapkan kebijakan daerah dalam melaksanakan Tugas Pembantuan, terkait dengan pengaturan mengenai pelaksanaan Tugas Pembantuan di daerahnya.

3.2 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

No	Sub Bidang /Tematik/Kegiatan	Kegiatan			
		Volume	Satuan	Jumlah	Pagu DAK Fisik (Rp)
1	2	3	4	5	6
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

MATRIKS CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN PUSAT YANG DILAKSANAKAN OLEH DAERAH KABUPATEN/KOTA

No	Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Non Kementerian	Dasar Pelaksanaan Penugasan (Tp)	Program, Kegiatan, Output, Dan Rincian Kegiatan	Lokasi	OPD Pelaksana	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL		NIHIL		



BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM Dikdas) merupakan salah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013, disebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan dan tanggung jawab Kabupaten/Kota.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Sibolga.

Jenis Pelayanan Dasar yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga Tahun 2024 yaitu ::

No	Jenis Pelayanan	Indikator
1.	PAUD	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 – 6 Tahun
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D4
2.	PENDIDIKAN DASAR	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun
		Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
		Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional



		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
		Iklm keamanan SD
		Iklm keamanan SMP
		Iklm kebinekaan SD
		Iklm kebinekaan SMP
		Iklm inklusivitas SD
3.	PENDIDIKAN KESETARAAN	Penduduk Usia 7 – 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan

4.1.2 Target Pencapaian SPM oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga tahun 2024 yaitu :

No	Indikator	Target 2024
1.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 – 6 Tahun	100%
2.	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun	100%
3.	Penduduk Usia 7 – 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%
4.	Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	56,48
5.	Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	41,72
6.	Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66,14
7.	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	56,78
8.	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	62,13
9.	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D4	64
10.	Iklm keamanan SD	76,11
11.	Iklm keamanan SMP	73,33



12.	Iklm kebinekaan SD	73,37
13.	Iklm kebinekaan SMP	70,66
14.	Iklm inklusivitas SD	62,04
15.	Iklm Inklusivitas SMP	61,61

4.1.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga selama 1 (satu) tahun anggaran dengan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kota Sibolga

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Target 2024	Realisasi 2024
1.	PAUD	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 5 – 6 Tahun	100%	66,42%
		Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	35,38	65,13%
		Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D4	85%	66%
2.	PENDIDIKAN DASAR	Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Usia 7 - 15 Tahun	100%	98,36%
		Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	56,48	74,96
		Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	41,72	69,87
		Rata-rata Kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	66,14	72,7
		Rata-rata Kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	56,78	65,85
		Iklm keamanan SD	76,11	72,84
		Iklm keamanan SMP	73,33	67,03
		Iklm kebinekaan SD	73,37	74,54
		Iklm kebinekaan SMP	70,66	71,37
		Iklm inklusivitas SD	62,04	56,89



3.	PENDIDIKAN KESETARAAN	Penduduk Usia 7 – 18 Tahun Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	89%	84,95%
----	-----------------------	--	-----	--------

4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Kota Sibolga bersumber dari APBD Kota Sibolga dan juga bersumber dari APBN untuk tahun anggaran 2024, anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan per setiap Jenis Layanan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase
1	PENDIDIKAN DASAR	38.593.973.896	33.597.033.050	87,05
2	PENDIDIKAN KESETARAAN	880.105.523	848.430.500	96,40
3	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	7.674.751.550	7.133.030.937	92,94

4.1.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga yang mendukung pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan di Dinas Pendidikan Kota Sibolga sebanyak 44 orang yang terdiri dari : Adapun personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan di Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga yaitu hampir keseluruhan pegawai Dinas pendidikan dan Kebudayaan kota Sibolga ikut andil dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian SPM Bidang pendidikan yang terdiri dari Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, Bidang Pembinaan Ketenagaan, Pengawas Sekolah serta Satuan Pendidikan PAUD, SD dan SMP se Kota Sibolga.

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) Struktural : 41 orang
- 2) Pegawai Negeri Sipil (NPS) Pengawas : 3 orang
- Jumlah : 44 orang



- Kualifikasi pendidikan :

Sebagai sebuah lembaga teknis daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga menyadari bahwa kapabilitas sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan berkemampuan dalam tugasnya sangat berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga dalam pencapaian tujuannya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga mempunyai komitmen yang kuat untuk tetap memprioritaskan kualitas aparaturnya, baik melalui peningkatan jenjang pendidikan lanjutan maupun melalui pendidikan dan latihan (diklat) teknis dan fungsional, yang semuanya dapat dicapai dengan dukungan Pemerintah Kota Sibolga.

Pada saat ini staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga yang sudah memiliki gelar Master (S2) sebanyak 5 orang (11,36%). Pendidikan dan latihan teknis diberikan seluas-luasnya kepada seluruh staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga apabila kesempatan untuk itu terbuka, agar staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga memiliki kemampuan teknis terutama dalam perencanaan pembangunan.

Secara umum tingkat pendidikan staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga sudah cukup baik, dimana komposisi untuk Strata 1 (S-1) lebih mendominasi yakni sebanyak 24 orang (54,54%) dibandingkan tingkat pendidikan Diploma, SMA, dan SMP. Adapun Keadaan PNS (Struktural) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan adalah sebagai berikut :

**Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan PNS
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sibolga**

Kualifikasi Pendidikan	Jlh	Satuan	Pangkat/Golongan	Jlh	Satuan
Pasca Sarjana (S2)	5	Orang	Pembina Tk. I, IV/b	6	Orang
Sarjana (S1)	24	7Orang	Pembina, IV/a	2	Orang
Diploma	8	Orang	Penata Tk. I, III/d	7	Orang
SLTA	6	Orang	Penata, III/c	9	Orang
SMP	1	Orang	Penata Muda Tk. I, III/b	9	Orang



			Penata Muda, III/a	6	Orang
			Pengatur Tk. I, II/d	2	Orang
			Pengatur Muda Tk. I, II/b	2	Orang
			Golongan IX	1	Orang
Jumlah	44	Orang	Jumlah	44	Orang

Sumber Data : DTK Disdikbud 2024

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

1. Masih rendahnya angka partisipasi PAUD karena capaiannya masih reandah
2. Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1 / D4 kerjanya masih belum bisa mencapai target

Solusi :

1. Sosialisasi Program PAUD ke stakeholder terkait
2. Tetap menghimbau agar Guru PAUD dapat meningkatkan kompetensinya ke Jenjang S1/D4
 Didalam Penambahan Guru/Pendidik PAUD yang menjadi syarat adalah Kualifikasi S1/D4

4.1.7 Program dan Kegiatan

Dalam hal untuk mendukung Penerapan dan Pencapaian Standart Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyusun Program/Kegiatan antara lain :

1. Program Pengelolaan Pendidikan
 - 1.1 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
 - Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah



- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
 - Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar
 - Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik
- 1.2 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik
- 1.3 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - Pengelolaan Dana BOP PAUD
 - Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD
- 1.4 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan
 - Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik



4.2. URUSAN KESEHATAN

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Menurut peraturan permenkes Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Pasal 2 ayat 3 bahwa Jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas:

- a. Pelayanan Kesehatan Ibu hamil;
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- d. Pelayanan kesehatan balita;
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis ; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) Yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.

4.2.2 Target Pencapaian

SPM merupakan hal minimal yang harus dilaksanakan dan dicapai 100% target SPM setiap tahunnya oleh pemda. Dalam pelaksanaannya alokasi anggaran untuk SPM didukung melalui APBD Kota Sibolga dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Berikut dibawah Target Pencapaian SPM, Alokasi Anggaran dan Realisasi SPM.

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target		Ket
		Target (%)	Capaian (%)	
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	99,83%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	95,55%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	98,97%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100,00%	



5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100,00%	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	100,00%	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	99,08%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	91,14%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	95,23%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat	100	98,37%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	204,52%	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	100	128,6%	

4.2.3 Realisasi Capaian Kinerja

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target %	Realisasi %	Ket.
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100	99,83%	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100	95,55%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100	98,97%	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	100	100,00%	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	100	100,00%	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	100	100,00%	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	100	99,08%	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100	91,14%	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100	95,23%	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)Berat	100	98,37%	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	100	204,52%	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	100	128,6%	



4.2.4 Alokasi Anggaran

No.	Program/Kegiatan	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	%
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	129,966,300	94,439,500	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	299.702.700	185,000,00	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	34,053,700	23,112,100	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	1.778.101.433	1.402.709.819	
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	101,480,000	29,434,560	
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	188,664,725	0	
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	276,401,120	0	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	215.544.101	181.945.810	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	136,627,170	134,541,400	
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	14,768,600	0	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	509,049,000	16,900,000	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	115,852,000	53,678,500	

4.2.5 Dukungan Personil

Dukungan personil dalam pelaksanaan SPM adalah seluruh sumber daya kesehatan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kota Sibolga, baik SDM maupun infrastruktur kesehatan yang dimiliki.

Tabel 4. 1 Jumlah SDM

No	Keterangan	Jumlah
1	Dinas Kesehatan	81
2	UPTD Puskesmas Pintu Angin	94
3	UPTD Puskesmas Sambas	89
4	UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas	68
5	UPTD Puskesmas Aek Habil	77



6	UPTD Puskesmas Aek Parombunan	85
7	UPTD Laboratorium	16

Tabel 4. 2 Jumlah Ambulan dan Pusing Roda 4

No	Keterangan	Jumlah Ambulans	Jumlah Pusing
1	UPTD Puskesmas Pintu Angin	1	1
2	UPTD Puskesmas Sambas	1	1
3	UPTD Puskesmas Pelabuhan Sambas	1	1
4	UPTD Puskesmas Aek Habil	1	1
5	UPTD Puskesmas Aek Parombunan	1	1

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Mengingat SPM adalah penyediaan layanan kebutuhan dasar secara minimal bagi warga negara dengan target kinerja seluruh warga negara harus memperoleh pelayanan minimal, dalam hal penganggaran pemenuhan SPM wajib menjadi prioritas utama dan tidak boleh dibatasi. Dalam pelaksanaan SPM bidang kesehatan dibutuhkan dukungan anggaran yang lebih maksimal dan peran OPD serta masyarakat dalam melaksanakan SPM sehingga masyarakat dapat terlayani secara efektif, efisien dan tepat sasaran.

4.2.7 Program dan Kegiatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan (Sub Kegiatan)
1	2	3	4
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil)
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin)
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan



No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan (Sub Kegiatan)
1	2	3	4
		Kesehatan Masyarakat	Bayi Baru Lahir)
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita)
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar)
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif)
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut)
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi)
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus)
10	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat)
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis)
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus = HIV)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV)



4.3 URUSAN PEKERJAAN UMUM

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang telah ditetapkan SPM oleh daerah.

Tabel 4.1

Jenis Pelayanan Dasar Bidang Pekerjaan Umum

No.	Pelayanan Dasar Bidang Urusan Pekerjaan Umum
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik

4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal oleh Daerah

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

Tabel 4.2

Target SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	84,25%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	80%

4.3.3 Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.



Tabel 4.3

Realisasi SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Target	Realisasi
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum	78,83%	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	Persentase penduduk yang terlayani sarana pengelolaan Air Limbah	75%	37,25%

Sumber : Bidang SDA, PLP & AM

4.3.4 Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Air Minum dan Sanitasi, serta dana APBD.

Alokasi Anggaran SPM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	876.197.099	795.524.850	90,79
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota	876.197.099	795.524.850	90,79
	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	876.197.099	795.524.850	90,79
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.648.844.000	1.612.178.800	97,78
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.648.844.000	1.612.178.800	97,78
	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	1.648.844.000	1.612.178.800	97,78

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan Personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan pencapaian SPM, adapun dukungan personil pada Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu: Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 12 Orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 12 orang.



4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh. Adapun permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga dalam penerapan SPM yaitu sebagai berikut:

1. Air Minum

- Sumber air permukaan masih bergantung dari daerah lain.
- Sebaran lokasi rumah tinggal penduduk lebih banyak diatas laut, gunung dan perbukitan yang menyebabkan kesulitan dalam penempatan pipa tertier air minum.
- Debit air kurang memadai

2. Air Limbah

- Ketersediaan lahan kurang memadai untuk pembangunan tangki septik baik individual maupun komunal.
- Sebagian besar penduduk kota Sibolga berlokasi di pesisir pantai dan diatas laut sehingga sulit menempatkan tangki septik.
- Rendahnya kesadaran masyarakat tentang tangki septik.

Berdasarkan permasalahan diatas solusi yang akan dilaksanakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sibolga yaitu sebagai berikut:

1. Air Minum

- Mencari sumber air baku melalui kerjasama dengan Pemkab. Tapanuli Tengah.
- Penganggaran dana yang bersumber dari pusat (DAK) serta APBD Kota Sibolga.
- Pengadaan pompa air untuk mengalirkan air di daerah yang lebih tinggi elevasinya.

2. Sanitasi

- Pemerintah Kota Sibolga diharapkan dapat mempersiapkan lahan untuk pembangunan tangki septik.
- Pembangunan tangki septik individual/komunal yang bisa diakses oleh alat penyedot tinja.



Perlunya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya sanitasi lingkungan dan penegasan tentang bangunan yang memiliki tangki septik

4.3.7 Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Sibolga dalam menerapkan SPM dapat dilihat sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di daerah Kabupaten / Kota
- Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan

2. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat

4.4 URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pasal 9 ayat (2), Jenis Pelayanan Dasar Bidang Perumahan Rakyat terdiri dari:

1. Penyediaan dan Rehabilitasi rumah tidak layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota.
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

4.4.2 Target Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah orang Yang berhak mendapatkan Pelayanan	Target Capaian	Rancangan APBD Tahun 2023
1	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	0	0	0



4.4.3 Realisasi Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Jumlah orang Yang berhak mendapatkan Pelayanan	Target	Realisasi %
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0	0	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	0	0	0

4.4.4 Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	0
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah	0

4.4.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Sumber Daya Manusia yang terlibat di dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman tahun 2023 juga belum di rinci.:

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

- Permasalahan dalam pemenuhan SPM di bidang Perumahan Rakyat dan Permukiman adalah bahwa dalam pelayanan dasar penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah Kabupaten/Kota dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi



masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah tidak dapat di tetapkan karena kegiatan yang belum di tampung akibat Refocusing Anggaran APBD Kota Sibolga Tahun Anggaran 2023.

- Solusi atas permasalahan tersebut adalah dengan melanjutkan program di tahun 2024 dengan menampung kegiatan penerapan dan pencapaian SPM di APBD Pemerintah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 untuk di peruntukkan bagi warga yang belum memperoleh layanan di dibidang SPM Perumahan Rakyat dan Permukiman..

4.4.7 Program dan Kegiatan

- Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana
- Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah

4.5 URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Permendagri nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota

4.5.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

- Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

4.5.1.2 Target Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%



2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%
----	--	--	------

4.5.1.3 Realisasi Capaian

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target	%
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	0	0
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	12 Kejadian Kebakaran	100%

4.5.1.4 Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Anggaran
1.	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	559.123.536
2.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	18,750,000

4.5.1.5 Dukungan Personil

Pelaksanaan SPM Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kebakaran pada Tahun 2023 didukung oleh personil sebanyak 293 orang antara lain .:

- Jumlah Pegawai Satpol PP Januari s.d bulan Desember 2023 adalah 293 Orang dengan status sebagai berikut.:
 - a. Pegawai Negeri Sipil : 23 orang
 - b. Non Pegawai Negeri Sipil/THL : 270 orang

4.5.1.6 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Belum adanya gedung kantor Satpol PP Kota Sibolga sehingga kurangnya kenyamanan dalam melaksanakan tugas.



- Belum adanya kendaraan DALMAS sebagai sarana pengangkut personil secara massa dan alat pengangkut barang-barang sitaan/pengamanan
- Kurangnya dukungan anggaran dalam pemenuhan sarana dan prasarana Satpol PP serta banyaknya kegiatan yang tidak tertampung anggarannya
- Minimnya PPNS pada Satpol PP Kota Sibolga

Solusi

- Perlunya pembangunan gedung kantor Satpol PP yang layak untuk menampung personil dan kendaraan dinas
- Agar pengadaan kendaraan DALMAS segera di anggarkan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- Agar adanya pertimbangan untuk menambah anggaran Satpol PP Kota Sibolga
- Perlunya personil Satpol PP Kota Sibolga untuk mengikuti Diklat Pembentukan PPNS

4.5.1.7 Program / Kegiatan

a. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

- Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan
- Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
- Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota



4.5.2 PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4.5.2.1 Jenis pelayanan dasar

BPBD berdasarkan tupoksinya berada pada urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sub urusan bencana. Jenis pelayanan dasar sub-urusan bencana meliputi:

- Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
- Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
- Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana..

4.5.2.2 Target Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %

4.5.2.3 Realisasi Capaian

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian	Realisasi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %	13,88 %
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %	100 %
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %	100 %



4.5.2.4 Alokasi Anggaran

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Alokasi Anggaran pada APBD TA.2023	
			APBN	APBD
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan informasi rawan bencana	-	431.519.725
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-	201.948.500
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-	216.963.049

4.5.2.5 Dukungan Personil

No	Jenis Pelayanan Dasar	Dukungan Personil	
		PNS	Non PNS
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	18	85
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	18	85
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	18	85

4.5.2.6 Permasalahan dan Solusi

Adapun permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 yaitu :

1. Anggaran yang masih kurang memadai sehingga membuat program/kegiatan yang mendukung kegiatan Standard Pelayanan Minimal (SPM) tidak berjalan;
2. Belum tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) Kota Sibolga yang merupakan dokumen induk dalam penanggulangan bencana;
3. Belum disusunnya Perda Penanggulangan Bencana yang menjadi Payung Hukum Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Sibolga;
4. Minimnya pelatihan teknis tentang kebencanaan bagi SDM di BPBD untuk dapat lebih professional dan mengerti dalam pencegahan, penanggulangan dan pasca bencana;



5. Kurangnya peralatan dan perlengkapan kantor pendukung sehingga menghambat kinerja dan tugas yang akan dilaksanakan;
6. Belum Optimalnya Peran Serta Masyarakat yang di Koordinir oleh BPBD dalam Penanggulangan Bencana.

Setiap permasalahan yang dihadapi pasti ada upaya untuk mengatasi dan upaya – upaya mengatasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga Tahun Anggaran 2023 yaitu :

1. Program/kegiatan yang belum terlaksana tetap diusulkan untuk tahun berikutnya;
2. Mengusulkan kegiatan kajian resiko bencana dan rencana penanggulangan bencana serta dokumen lainnya pada anggaran tahun berikutnya;
3. Mengadakan pengadaan fasilitas kantor kepada pegawai sehingga dapat lebih cepat dalam pengerjaan laporan bencana dan mengadakan pengadaan peralatan perlindungan bagi anggota dan peralatan /alat-alat penanggulangan bencana lainnya;

Mengadakan pelatihan kepada personil sesuai dengan anggaran yang disediakan.

4.5.2.7 PROGRAM DAN KEGIATAN

- 1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**
 - Sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana kabupaten/kota (per jenis bencana)
- 2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**
 - Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
 - Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana
- 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**
 - Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana kabupaten/kota



4.6 URUSAN SOSIAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Urusan Sosial di Kota Sibolga dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Sibolga sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya.

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota. Jenis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial di daerah Kabupaten/Kota terdiri atas :

- a) Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Telantar di luar Panti Sosial;
- b) Rehabilitasi Sosial dasar Anak Telantar di luar Panti Sosial;
- c) Rehabilitasi Sosial dasar Lanjut Usia Telantar di luar Panti Sosial;
- d) Rehabilitasi Sosial dasar tuna sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial;
- e) Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat Bencana Alam dan Sosial bagi Korban Bencana daerah kabupaten/kota

4.6.2 Target Capaian

Peraturan Menteri Sosial Nomor 09 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang digunakan oleh Dinas Sosial Kota Sibolga Tahun 2024. Adapun target pencapaian SPM yang ditetapkan oleh daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini.



TABEL
TARGET PENCAPAIAN SPM

No.	Jenis Pelayanan	Standar Pelayanan Minimal (SPM)				
		Sasaran/Indikator	Target Nasional (%)	Target Pemerintah Kota Sibolga (%)		
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitas Sosial Dasar penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar serta Gelandangan pengemis di Luar Panti,	<p>Sasaran :</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar serta Gelandangan dan pengemis di Luar Panti.</p> <p>Indikator :</p> <p>Persentase penyandang Disabilitas terlantar, Anak terlantar, lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di Luar panti</p>	100,00	50,00	60,00	70,00
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial.	<p>Sasaran :</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota.</p> <p>Indikator :</p> <p>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.</p>	100,00	80,00	80,00	80,00

4.6.3 Realisasi Capaian

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) Tahun Anggaran. Realisasi Pencapaian SPM Pelayanan Dasar Urusan Sosial tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal (SPM)				Ket
		Sasaran/Indikator	Target SPM Tahun 2023 (%)	Realisasi SPM Tahun 2022 (%)	Realisasi SPM Tahun 2023 (%)	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti.	<p>Sasaran :</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti.</p> <p>Indikator :</p> <p>Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.</p> $\frac{44 \times 100}{132}$	30,00	53,01	58,00	.
2.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Sosial.	<p>Sasaran :</p> <p>Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial daerah kabupaten/kota.</p> <p>Indikator :</p> <p>Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.</p> $\frac{409 \times 100}{409}$	80,00	100,00	100,00	



4.6.4 Alokasi Anggaran

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target	Realisasi	Ket
1	2	3	4	5
1	Program Rehabilitasi Sosial	384.432.820,00	270.891.600,00	-
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	384.432.820,00	270.891.600,00	-
	Penyediaan Permakanan	36.481.750,00	34.840.800,00	-
	Penyediaan Sandang	20.902.900,00	11.902.900,00	-
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	9.339.820,00	780.000,00	-
	Pemberian Bimbingan fisik, mental spritual dan sosial	233.953.900,00	167.400.500,00	
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	6.649.150,00	0,00	
	Pemberian Layanan Rujukan	77.105.300,00	55.967.400,00	
2.	Program Penanganan Bencana	279.387.824,00	195.166.000,00	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	279.387.824,00	195.166.000,00	
	Penyediaan Makan	167.667.824,00	120.574.000,00	
	Penyediaan Sandang	111.720.000,00	74.592.000,00	

4.6.5 Dukungan Personil.

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM. Seluruh Pegawai pada Dinas Sosial Kota Sibolga pada tahun 2024 berjumlah 24 (dua puluh tiga) orang PNS.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi.

Beberapa permasalahan dan Solusi dalam penerapan SPM bidang urusan Sosial pada Dinas Sosial Kota Sibolga antara lain:

- a) Kurangnya tenaga aparatur yang berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial, berjiwa sosial dan yang mempunyai sertifikat sosial sehingga program dan kegiatan yang disusun belum maksimal menerapkan capaian SPM,
Upaya pemecahannya : Menyampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) agar menempatkan aparatur yang berlatar belakang pendidikan kesejahteraan sosial, berjiwa sosial dan yang mempunyai sertifikat sosial
- b) Belum adanya tempat penampungan yang memadai bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di Kota Sibolga.



Upaya pemecahannya : Merencanakan rehab total Kantor Dinas Sosial Kota Sibolga yang didalamnya tersedia satu ruangan sebagai rumah singgah/shelter di kota Sibolga.

- c) Kegiatan yang diaggarkan oleh Dinas Sosial Kota Sibolga belum terfokus kepada pencapaian SPM.

Upaya pemecahannya : Membuat perencanaan program dan kegiatan tahun berikutnya dengan lebih memeperhatikan pencapaian SPM dan RPJMD.

- d) Belum sinkronnya data PMKS/PPKS dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kota Sibolga sehingga sulit menentukan siapa saja yang berhak menerima pelatihan keterampilan dan Bantuan Sosial.

Upaya pemecahannya : Melakukan kegiatan pendataan yang lebih baik dan berkelanjutan, dengan menggunakan aplikasi yang terkoordinasi langsung dengan Pusdatin Kementerian Sosial.

4.6.7 Program dan Kegiatan

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti:

- Penyediaan Permakanan
- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
- Pemberian Layanan Rujukan

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan:

- Penyediaan Makanan
- Penyediaan Sandang



BAB V P E N U T U P

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah selama 1 (satu) tahun anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024 merupakan laporan pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2024 dengan mengacu pada kewenangan Pemerintah Kota Sibolga, pelaksanaan asas desentralisasi, pengelolaan keuangan, tugas pembantuan serta tugas umum pemerintahan. Dari hasil kinerja yang dilaporkan pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun Anggaran 2024, dapat disimpulkan bahwa dalam pembangunan yang telah dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan, pada umumnya dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Hasil pembangunan di Kota Sibolga pada hakekatnya merupakan hasil sinergi dari kinerja eksekutif, legislatif, masyarakat dan dunia usaha. Keberhasilan pembangunan tersebut, tidak terlepas dari itikad baik, kerja keras, kreativitas, dan inovasi dari semua pihak yang memiliki keterkaitan fungsi sesuai dengan bidang tugas dan usahanya masing-masing khususnya DPRD Kota Sibolga, Forum Pimpinan Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Orsospol, Lembaga Profesi, Perguruan Tinggi, Tokoh-tokoh Agama, Insan Pers, dan seluruh lapisan masyarakat Kota Sibolga lainnya.



Tabel Daftar Penghargaan Kota Sibolga Tahun 2024

No.	Nama Penghargaan	Instansi	Tahun
1.	Penghargaan Universal Health Coverage (Uhc) Untuk Pemerintah Kota Sibolga Di Uhc Award 2024 Tk. Nasional Dengan Kategori Madya	Dinas Kesehatan Kota Sibolga	2024
2.	Penghargaan Penganugerahan Predikat Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Opini Pengawasan Penyelenggaraan Pelayanan Publik) Tahun 2024 Oleh Ombudsman Republik Indonesia Dengan Kategori Hijau	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sibolga	2024
3.	Penghargaan Atas Capaian Gerakan Ayo Ke BKB/Posyandu Tingkat Provinsi Sumatera Utara Sebagai Terbaik	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga	2024
4.	Penghargaan Pengelolaan Data Terbaik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Dengan Kategori Cakupan Desa/Kelurahan Terveral Sebagai Terbaik II	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Sibolga	2024
5.	Penghargaan Pengelolaan Data Terbaik Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Dengan Kategori Cakupan Pelaporan Data Pelayanan KB Sebagai Terbaik II	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Sibolga	2024
6.	Penghargaan Pelibatan Remaja Yang Bermakna Pada Program Genre Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Sebagai Terbaik II	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Sibolga	2024
7.	Penghargaan Paritrana Award Kategori Pemerintahan Daerah Dalam Program BPJS Ketenagakerjaan Sebagai Juara II	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kota Sibolga	2024





PEMERINTAH KOTA SIBOLGA I N S P E K T O R A T

Jalan Srikandi No. 1 Telp./Fax (0631) 21044 Sibolga
Email : inspektoratkotasibolga@gmail.com

Sibolga, 26 Maret 2025

Nomor : 710.4/12/III/LHP.Re/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Sibolga
Cq. Kepala Bagian Pemerintahan
Di Sibolga

Dengan ini Kami sampaikan Laporan Hasil Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 sebagai berikut :

I. PERNYATAAN REVIU

Kami telah mereviu dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun 2024 dimana Substansi Informasi yang dimuat dalam dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 adalah menjadi tanggungjawab Manajemen Pemerintah Kota Sibolga.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Sibolga Tahun 2024 serta memberikan keyakinan terbatas (limited assurance) bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun berdasarkan peraturan yang berlaku.

II. URAIAN HASIL REVIU

Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Sibolga Tahun 2024 telah dilaksanakan, dimana Isi materi dokumen LPPD dan sistematika serta data dukung IKK telah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada beberapa hal yang perlu perbaikan, antara lain :

Pada Bab I :

1. Permintaan Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tidak sesuai dengan Jadwal pelaksanaan Reviu yang sudah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
2. Pada Matrix Program Pembangunan Kota Sibolga Tahun 2024 (tabel 19) masih banyak terdapat Indikator Kinerja Program dan Target Capaian Program tahun 2024 yang belum terisi;
3. Capaian Kinerja Makro belum menjabarkan secara spesifik mengenai keberhasilan capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat, Angka Kemiskinan dan Angka pengangguran yang menurun;

Pada Bab II :

1. Masih terdapat beberapa OPD yang belum menyajikan Indikator Kinerja Kunci Hasil;
2. Terdapat ketidak konsistenan pencantuman besaran Capaian Kinerja makro , antara lain :
 - a) Besaran Capaian Kinerja Indikator Makro (Angka Kemiskinan) Tahun 2024 sebesar 9,99 berbeda dengan Capaian Angka Kemiskinan pada Capaian Kinerja Organisasi point C1 (hal 188), dimana capaian Angka Kemiskinan tahun 2024 sebesar 11,39
 - b) Besaran Capaian Kinerja Makro (Angka Pengangguran) Tahun 2024 sebesar 6,52 berbeda dengan Capaian Angka Kemiskinan pada Capaian Kinerja Organisasi point C1 (hal188), dimana capaian Angka Pengangguran sebesar 31,07
 - c) Besaran Capaian Kinerja Makro (Pendapatan Perkapita Penduduk) Tahun 2024 sebesar 72,01 berbeda dengan Capaian Angka Pendapatan Perkapita Penduduk pada Capaian Kinerja Organisasi point C1 (hal 187), dimana Pendapatan Perkapita Penduduk sebesar Rp. 72,01.
3. Pada Tabel III.21 (Target, Realisasi dan Capaian Angka Kemiskinan Tahun 2021-2024) terdapat realisasi yang meningkat dibandingkan target, namun peningkatan ini bersifat negative, sehingga capaian yang tercantum pada LPPD ini tidak sesuai dengan rumus pengukuran kinerja.

4. Pada Lampiran Indikator Kinerja Kunci Urusan Perencanaan dan Keuangan masih terdapat beberapa OPD yang belum terisi.

III. REKOMENDASI

Tim Reviu menyarankan kepada Tim Penyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) , antara lain :

1. Agar Tim Penyusun LPPD menyelaraskan Jadwal Reviu LPPD sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan dalam Pedoman Penyusunan LPPD (Minggu ketiga Januari);
2. Agar Tim LPPD segera mengisi Indikator Kinerja Program dan target Capaian Program tahun 2024 pada tabel 19
3. Agar Tim Penyusun LPPD menjabarkan secara spesifik mengenai Indeks Pembangunan Manusia , Angka Kemiskinan dan Angka Pengangguran.
4. Agar Tim Penyusun LPPD berkoordinasi dengan OPD terkait untuk segera menyajikan data Indikator Kinerja Kunci Hasil
5. Agar Tim Penyusun LPPD konsisten dalam membuat Capaian Kinerja Makro.
6. Agar Tim Penyusun LPPD berkoordinasi dengan Bagian Organisasi terkait peningkatan angka kemiskinan yang negative untuk dilakukan perbaikan.

IV. PENUTUP

Demikian Laporan Hasil Reviu LPPD Kota Sibolga Tahun 2024 ini dibuat sesuai dengan dokumen yang peroleh selama reviu dilakukan untuk dapat digunakan sesuai keperluan.

Sibolga, 26 Maret 2025

INSPEKTUR KOTA SIBOLGA


ICHWAN SIMATUPANG, S.Sos, MSP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660401 198602 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Wakil Walikota Sibolga (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Wakil Walikota Sibolga (sebagai laporan);
3. Pertinggal